



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN

TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa Sanitasi merupakan kebutuhan dasar Masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan Masyarakat Sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang berkelanjutan dan dalam rangka melaksanakan pemenuhan infrastruktur Sanitasi yang tepat sasaran, perlu percepatan pembangunan Sanitasi secara menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu berdasarkan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pembentukan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2026-2030, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2026-2030;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN BREBES 2026-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan Sanitasi.
5. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan PKP.
8. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Brebes Tahun 2026-2030 yang selanjutnya disebut Dokumen SSK adalah dokumen perencanaan Sanitasi Daerah yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Sanitasi yang terpadu dan menyeluruh di Daerah untuk jangka menengah tahun 2026-2030.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Sanitasi secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan di Daerah.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menyusun dan menetapkan Dokumen SSK untuk melakukan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan.
- (2) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi kebijakan dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi sesuai dengan jangka waktu rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB III

DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN

Bagian Kesatu

Kelompok Kerja

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati mendelegasikan kepada Pokja PKP yang membidangi Sanitasi di Daerah.
- (2) Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan di bidang persampahan dan air limbah domestik.
- (3) Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas yaitu:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, dan pelaku lainnya;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah kabupaten;
 - c. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan Daerah; dan
 - d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja PKP melaksanakan fungsi yaitu:
- a. koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi bidang Sanitasi di kabupaten melalui pengoordinasian penyusunan, pemutakhiran, dan implementasi Dokumen SSK serta pengoordinasian kegiatan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Sanitasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - b. advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen para pemangku kepentingan di kabupaten untuk percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan; dan
 - c. pemberian saran untuk peningkatan kinerja layanan Sanitasi berkelanjutan di kabupaten.
- (5) Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan Perangkat Daerah yang menangani perencanaan Daerah, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan dan kawasan permukiman, urusan kesehatan, urusan lingkungan hidup, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan informasi dan komunikasi, urusan pertanian, urusan energi dan sumber daya mineral, dan/atau urusan perindustrian.
- (6) Selain keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan akademisi atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Dokumen SSK

Pasal 5

- (1) Penyusunan Dokumen SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian.
- (2) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. instrumen kebijakan pengembangan Sanitasi Daerah jangka menengah;

- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan;
 - c. media internalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan Perangkat Daerah yang terkait Strategi Sanitasi Kabupaten; dan
 - d. acuan pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja Daerah bagi program peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi.
- (3) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi kebijakan dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi sesuai dengan jangka waktu rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat:
- a. profil Sanitasi Daerah;
 - b. kerangka pengembangan Sanitasi Daerah;
 - c. strategi pengembangan Sanitasi Daerah;
 - d. program, kegiatan, dan indikasi pendanaan Sanitasi Daerah; dan
 - e. monitoring dan evaluasi capaian Dokumen SSK.
- (2) Rincian Dokumen SSK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dokumen SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diintegrasikan dalam dokumen perencanaan Daerah yang meliputi:

- a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
- c. rencana kerja Perangkat Daerah;
- d. rencana strategis Pemerintah Daerah; dan
- e. integrasi Strategi Sanitasi Kabupaten dalam program/kegiatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan masyarakat.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan dan implementasi Dokumen SSK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian serta Kelompok Kerja yang membidangi Sanitasi Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di Daerah dan implementasi Dokumen SSK.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi Pembangunan Sanitasi dan/atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi terkait Sanitasi.

Pasal 10

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penyusunan dan pelaksanaan Dokumen SSK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 12 Juni 2026
BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 12 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd.

Dr. TAHRONI, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19710609 199802 1 001
BERITA DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 26 TAHUN 2026

PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H.
Pembina – IV/a
NIP. 198712142010012020





**KETERANGAN
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES**

**TENTANG
STRATEGI SANITASI KABUPATEN TAHUN 2026-2030**

**KABUPATEN BREBES
TAHUN 2026**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG DOKUMEN STRATEGI
SANITASI KABUPATEN TAHUN
2026-2030**

**PEMERINTAH
KABUPATEN BREBES**



NASKAH AKADEMIS

**STRATEGI SANITASI
KABUPATEN BREBES
(SSK)**

TAHUN 2026-2030



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Brebes untuk periode 2026 hingga 2030 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pemutakhiran dan kelanjutan dari rencana strategis sebelumnya, sekaligus menjadi landasan utama bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, bersih, dan berkelanjutan.

Pembangunan sanitasi adalah investasi mendasar bagi kualitas hidup masyarakat dan kesehatan publik. Sejalan dengan komitmen nasional dalam mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu akses sanitasi layak dan aman bagi seluruh penduduk, SSK 2026–2030 ini dirancang untuk mengatasi tantangan sanitasi yang kompleks, mencakup penanganan Air Limbah Domestik, Persampahan, serta Drainase Lingkungan.

Penyusunan dokumen ini tidak lepas dari kolaborasi aktif seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah, lembaga legislatif, dunia usaha, akademisi, hingga partisipasi aktif dari kelompok masyarakat. Sinergi ini tercermin dalam lima pilar strategis yang tertuang, yang akan mendorong transisi dari sanitasi layak menuju sanitasi aman di seluruh wilayah Kabupaten Brebes.

Kami berharap, Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Brebes Tahun 2026–2030 ini dapat dipedomani dan diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi Kabupaten Brebes sebagai wilayah yang berketahanan sanitasi dapat terwujud.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Brebes periode 2026–2030 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang strategis untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu menjamin akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh penduduk. Dokumen ini menjadi pedoman komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Brebes.

Masa berlaku dokumen SSK sebelumnya adalah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, dengan capaian pembangunan sanitasi sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 98,4 % penduduk di Kabupaten Brebes telah memiliki akses terhadap sanitasi aman dan layak, sedangkan akses belum layak tersisa 1,6%, untuk BABS sudah tidak ada;
2. sebanyak 1,1 % penduduk di Kabupaten Brebes menggunakan sistem pengolahan limbah yang diselesaikan secara terpusat/komunal melalui jaringan pengumpul yang diteruskan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik, sehingga dikategorikan telah memiliki akses aman sanitasi;
3. Tingkat Layanan Pengumpulan Sampah Kabupaten Brebes mencapai 34,4%. ;
4. Sampah Terkelola secara total baru mencapai 3,0%, yang terdiri dari 1,0% sampah terolah dan 2,0% sampah terdaur ulang. Sementara itu, capaian Residu di LUR (Lokasi Ujung Rantai/TPA) tercatat sebesar 15,4%.;

Berdasarkan capaian didapat pada tahun 2025, Pokja PKP Kabupaten Brebes bersepakat untuk menetapkan target capaian di akhir tahun 2030 sebagai berikut:

1. Sebanyak 100% penduduk di Kabupaten Brebes ditargetkan memiliki akses terhadap sanitasi akses layak baik layak bersama maupun layak mandiri, dan terget 10% akses sanitasi aman;
2. Sebanyak 100% timbulan sampah perkotaan dapat tertangani sebesar 70% dan berkurang sebesar 25 %.

Strategi Sanitasi 2026–2030 difokuskan pada tiga pilar utama, dengan penekanan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan perubahan perilaku masyarakat:

1. Air Limbah Domestik (ALD). Fokus: Transisi dari sanitasi layak menuju sanitasi aman. Program Kunci: Pembangunan dan perbaikan septic tank individual yang sesuai standar; pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat (komunal) di wilayah padat penduduk; serta pembangunan sarana Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) untuk memastikan lumpur tinja dikelola secara aman (Fecal Sludge Management).
2. Persampahan. Fokus: Pengurangan, penanganan, dan pemrosesan akhir sampah yang berkelanjutan. Program Kunci: Peningkatan efisiensi pengumpulan dan pengangkutan sampah; pengembangan bank sampah dan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) berbasis masyarakat; serta optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan.
3. Drainase Lingkungan. Fokus: Pengendalian genangan air dan risiko banjir. Program Kunci: Rehabilitasi dan pembangunan jaringan drainase primer dan sekunder di kawasan permukiman rawan genangan; normalisasi saluran air dan edukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran drainase.

Dokumen ini mengamanatkan penguatan kapasitas Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Brebes. Diperlukan komitmen pendanaan multi-sumber, termasuk alokasi APBD yang memadai, mobilisasi dana dari sektor swasta, dan pemanfaatan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Strategi pembiayaan akan berfokus pada efisiensi anggaran dan keberlanjutan operasional dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi yang telah dibangun.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR PETA	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Metodologi Penyusunan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	3
BAB II PROFIL SANITASI.....	6
2.1. Gambaran Wilayah	6
2.1.1 Administrasi Kewilayahan	6
2.1.2 Wilayah Kajian SSK	7
2.1.3 Kependudukan dan Jumlah Penduduk Miskin	10
2.2. Profil Sanitasi Saat Ini	10
2.2.1. Air Limbah Domestik	10
2.2.2. Pengelolaan Sampah	29
2.2.3. Drainase Lingkungan	70
2.3. Area Berisiko Sanitasi dan Permasalahan Sanitasi	82
2.3.1. Area Berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestic.....	82
2.3.2. Area Berisiko dan Permasalahan Persampahan.....	92
2.3.3. Area Berisiko dan Permasalahan Drainase Lingkungan.....	101
BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI	111
3.1. Visi Dan Misi Sanitasi	111

3.2.	Rencana Pengembangan Sanitasi	116
3.2.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi	116
3.2.2.	Tahapan Pengembangan Sanitasi	119
3.2.3.	Skenario pencapaian sasaran	140
3.3.	Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah.....	141
BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI		146
4.1.	Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	146
4.2.	Pengelolaan Persampahan.....	153
BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI.....		162
5.1.	Ringkasan.....	162
5.2.	Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah 165	
5.3.	Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah	168
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK		170
6.1.	Gambaran Umum Struktur Monitoring dan Evaluasi Sanitasi.....	170
6.2.	Pelaporan Monev Implementasi SSK	171
LAMPIRAN		172

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Tabel Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah per-Kecamatan	8
Tabel II. 2 Capaian Akses Air Limbah Domestik	10
Tabel II. 3 Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat.....	11
Tabel II. 4 SPALDS-Subsistem Pengolahan Setempat	11
Tabel II. 5 SPALDS Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja	12
Tabel II. 6 Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah	15
Tabel II. 7 Analisis Keberfungsian Infrastruktur Air Limbah	16
Tabel II. 8 Kelembagaan Pemerintah Daerah	17
Tabel II. 9 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah Domestik	18
Tabel II. 10 Kelembagaan Masyarakat.....	20
Tabel II. 11 Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah	25
Tabel II. 12 Analisa Pemangku Kepentingan	26
Tabel II. 12 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik	27
Tabel II. 14 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi.....	28
Tabel II. 15 Tabel Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Air Limbah	28
Tabel II. 16 Tabel Capaian Akses Layanan Sampah	29
Tabel II. 17 Timbulan Sampah.....	30
Tabel II. 18 Pengumpulan.....	30
Tabel II. 19 Kapasitas Pengangkut Sampah	31
Tabel II. 20 Pengolahan Sampah	33
Tabel II. 21 Pemrosesan Akhir Sampah	45
Tabel II. 22 Prosentase Layanan Persampahan Kabupaten Brebes	50
Tabel II. 1 Analisis Gap Pencapaian Akses Persampahan Berdasarkan Target RPJMN 2025-2029.....	51
Tabel II. 24 Kelembagaan Pemerintah Daerah	53
Tabel II. 25 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Sampah.....	54
Tabel II. 26 Kelembagaan Masyarakat.....	56
Tabel II. 27 Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah	62
Tabel II. 28 Analisa Pemangku Kepentingan	64
Tabel II. 29 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Persampahan	65

Tabel II. 30 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Persampahan	67
Tabel II. 31 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Persampahan	68
Tabel II. 32 Tabel Lokasi Genangan	71
Tabel II. 33 Tabel Database Drainase Kabupaten Brebes	77
Tabel II. 34 Tabel Status Area Berisiko ALD Kabupaten Brebes	84
Tabel II. 35 Tabel Permasalahan Air Limbah Domestik	91
Tabel II. 36 Tabel Status Area Berisiko Persampahan Kabupaten Brebes	94
Tabel II. 37 Tabel Permasalahan Persampahan.....	101
Tabel II. 37 Tabel Status Area Berisiko Drainase Kabupaten Brebes	103
Tabel II. 39 Tabel Permasalahan Drainase	110
Tabel III. 1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Brebes	114
Tabel III. 2 Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik.....	117
Tabel III. 3 Tujuan dan Sasaran Persampahan.....	118
Tabel III. 4 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik	121
Tabel III. 5 Zona Sistem Air Limbah Domestik	123
Tabel III. 6 Tahapan Pengembangan Persampahan.....	131
Tabel III. 7 Zona Sistem Persampahan.....	132
Tabel III. 8 Target Cakupan Layanan Sanitasi.....	140
Tabel III. 9 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Sanitasi..	141
Tabel III. 10 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan	142
Tabel III. 11 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi.....	143
Tabel III. 12 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun	144
Tabel III. 13 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten/Kota dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK	145
Tabel IV. 1 Analisis SWOT Air Limbah Domestik.....	147
Tabel IV. 2 Matriks Kerangka Kerja Logis Air Limbah Domestik.....	148
Tabel IV. 3 Analisis SWOT Persampahan	154
Tabel IV. 4 Matriks Kerangka Kerja Logis Persampahan	156
Tabel V. 1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun .	162

Tabel V. 2 Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 tahun	163
Tabel V. 3 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran.....	164
Tabel V. 4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten.....	165
Tabel V. 5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi	166
Tabel V. 6 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN	167
Tabel V. 7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR.....	168
Tabel V. 8 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat	169

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Sub-sistem Pengangkutan SPALD-T	11
Gambar 2. 2 Sub-sistem Pengolahan SPALD-T	12
Gambar 2. 3 Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja	13
Gambar 2. 4 Rantai Layanan Pengelolaan ALD	16
Gambar 2. 2 Foto Sarana Pengumpulan.....	31
Gambar 2. 3 Foto Sarana Pengangkutan	32
Gambar 2. 4 Foto TPA Kaliwlingi dan TPA Kalijurang	48
Gambar 2. 5 Analisis Rantai Layanan Sanitasi.....	52

DAFTAR PETA

Peta 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Brebes.....	6
Peta 2. 2 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Brebes	7
Peta 2. 3 Peta Struktur Ruang Kabupaten Brebes	8
Peta 2. 4 Peta Pola Ruang Kabupaten Brebes.....	9
Peta 2. 5 Peta Cakupan Layanan SPAL Domestik Kabupaten Brebes.....	14
Peta 2. 6 Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Persampahan Kabupaten Brebes	49
Peta 2. 7 Peta Kerawanan Bencana Banjir Kabupaten Brebes	75
Peta 2. 8 Peta Status Area Berisiko ALD Kabupaten Brebes	83
Peta 2. 9 Peta Status Area Berisiko Persampahan Kabupaten Brebes	93
Peta 2. 10 Peta Status Area Berisiko Drainase Kabupaten Brebes	102
Peta 3. 1 Peta Zona Sistem Air Limbah Domestik.....	130
Peta 3. 2 Peta Zona Sistem Persampahan.....	139

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) merupakan dokumen perencanaan strategis sanitasi jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi jangka menengah sekaligus menjadi wujud perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sanitasi bagi masyarakat di daerahnya dalam rangka pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari sektor sanitasi. Mengingat SSK merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah, maka SSK memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

Tahun 2025 merupakan tahun berakhirnya dokumen perencanaan SSK Kabupaten Brebes periode 2021 – 2025, oleh karena itu perlu dilakukan pemutakhiran dokumen oleh Pokja PKP. Pemutakhiran dokumen SSK sangat penting dilakukan mengingat masa berlakunya dokumen SSK sebelumnya telah berakhir. Hal ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan proses perencanaan dan keberlanjutan pembangunan sanitasi. Terlebih lagi, dengan adanya perubahan arah kebijakan pembangunan, baik pusat maupun daerah, maka dokumen SSK harus disesuaikan. Sebagaimana diketahui, SSK Kabupaten Brebes periode 2021–2025 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional RPJMN 2020–2024, RPJMD Kabupaten Brebes 2017–2022, serta dokumen RTRW Kabupaten Brebes 2019–2039. Saat ini, sejumlah dokumen perencanaan telah berganti periode, termasuk ditetapkan RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta RPJMD Kabupaten Brebes 2025–2029. Oleh karena itu, penyusunan dan pemutakhiran SSK menjadi penting untuk memastikan keterpaduan arah pembangunan sanitasi dengan dokumen perencanaan terbaru tersebut.

Setidaknya terdapat empat hal yang menjadi pertimbangan perlunya dilakukan pemutakhiran dokumen SSK Kabupaten Brebes, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Periode pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen SSK sebelumnya telah melampaui masa berlaku atau telah kadaluarsa, dimana periode SSK Kabupaten Brebes sebelumnya adalah 2021-2025.
2. Perlunya dilakukan penyesuaian terhadap target akses universal di bidang sanitasi.
3. Perlunya peningkatan kualitas dari SSK sebelumnya yang disebabkan oleh tidak lengkapnya data maupun akibat adanya keraguan atas validitas data yang digunakan. Hal ini terkait dengan dinamika yang terjadi pada saat proses penyusunan dokumen SSK Periode sebelumnya, sehingga pada saat ini perlu

dilakukan penyesuaian data terkini.

4. Adanya penyesuaian/perubahan dokumen perencanaan, baik nasional (RPJMN) maupun daerah (RPJMD) yang menjadi acuan dari SSK.

1.2 Metodologi Penyusunan

Proses penyusunan SSK Kabupaten Brebes disusun dengan pendekatan partisipatif. Penyusunan SSK difasilitasi oleh Pokja PKP Kabupaten Brebes dengan berpedoman pada Buku Pedoman Penyusunan dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) bagi kabupaten/kota peserta Program PPSP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Proses penyusunan SSK dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Melaksanakan Internalisasi dan Penyamaan Persepsi.

Pokja PKP Kabupaten Brebes telah menyepakati bahwa pengarusutamaan pembangunan sanitasi harus diakomodir di dalam dokumen perencanaan sektoral dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan strategis daerah. Dalam rangka hal tersebut, Pokja PKP bersepakat untuk memutakhirkan dokumen SSK, yang selanjutnya dirumuskan kesepakatan rencana kerja sekaligus pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota pokja dalam pemutakhiran dokumen SSK.

2. Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi

Pokja PKP Kabupaten Brebes telah merumuskan pemetaan kondisi sanitasi saat ini dengan mengacu pada data dari hasil studi EHRA dan/atau dokumen hasil studi lainnya untuk menetapkan strategi dalam mengatasi kondisi sanitasi yang diinginkan di Kabupaten Brebes;

3. Skenario Pembangunan Sanitasi

Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi kabupaten, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi disesuaikan dengan dokumen perencanaan daerah RPJMD Kabupaten Brebes. Di dalam tahapan ini akan diketahui kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan pada tahun rencana;

4. Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi

Merumuskan strategi sanitasi kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi Kabupaten Brebes jangka menengah (5 tahunan), dari tahun 2025 – 2029, sesuai dengan beberapa dokumen perencanaan

baik pusat maupun daerah, seperti RPJPN 2025 – 2045, RPJMN 2025 – 2029, RPJPD Kabupaten Brebes 2025 – 2045, RPJMD Kabupaten Brebes 2025 – 2029.

5. Finalisasi

Dokumen SSK Kabupaten Brebes tahun 2021-2025 yang dimutakhirkan ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Brebes tahun 2026-2030.

Adapun Jenis data yang digunakan oleh Pokja PKP sebagai acuan dalam Penyusunan SSK, diantaranya:

1. Data capaian Sustainable Development Goals (SDGs);
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045;
3. RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029, serta RPJMD Kabupaten Brebes 2025–2029;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes 2019–2039;
5. Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kabupaten Brebes;
6. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Aturan-aturan terkait pengembangan kota dan proses perencanaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, termasuk ketentuan mengenai keuangan, penganggaran, dan monitoring serta evaluasi.

1.3 Dasar Hukum

Pemutakhiran SSK 2026–2030 mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 43 Tahun 2023 tentang Desa Mandiri Sampah Melalui Gerakan Brebes Bebas Sampah Plastik Pilah Pilih Olah Sampah dari Rumah;
16. Peraturan Bupati Brebes Nomor 70 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen SSK Kabupaten Brebes 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan
Menggambarkan tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum, dan sistematika penulisan.
- Bab II. Profil Sanitasi Saat Ini
Berisi uraian gambaran wilayah, profil sanitasi saat ini, target akses kabupaten/kota yang ingin dicapai, permasalahan sanitasi dan area beresiko sanitasi.
- Bab III. Kerangka Pengembangan Sanitasi
Berisi uraian tentang visi dan misi sanitasi, rencana pengembangan sanitasi, dan kemampuan pendanaan sanitasi daerah.
- Bab IV. Strategi Pengembangan Sanitasi
Berisi uraian dari air limbah domestic dan pengelolaan persampahan.
- Bab V. Program, Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan Sanitasi
Berisi ringkasan yang berkaitan dengan program dan kegiatan serta uraian tentang program dan kegiatan dari masing-masing sub sektor sanitasi yaitu air limbah domestik, persampahan dan drainase
- Bab VI. Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK
Berisi mengenai strategi pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari program dan kegiatan sanitasi yang akan dilakukan Kabupaten Brebes dalam rangka pencapaian target yang diharapkan.

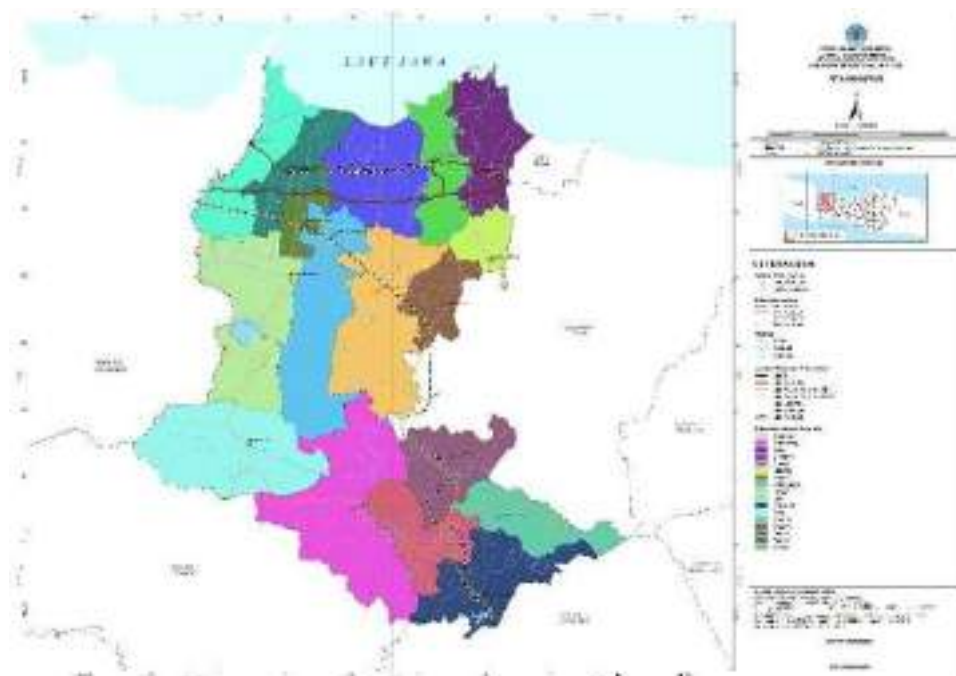
BAB II PROFIL SANITASI

2.1. Gambaran Wilayah

Gambaran wilayah akan memberikan penjelasan singkat mengenai kondisi administratif, wilayah kajian SSK, kependudukan, jumlah penduduk miskin dan kebijakan penataan ruangnya beserta beberapa peta dan tabel pendukungnya.

2.1.1 Administrasi Kewilayahan

Kabupaten Brebes secara administratif terdiri dari 17 kecamatan dan 297 desa/kelurahan dengan luas kurang lebih 175.806 hektar membentang diantara 6⁰44' dan 7⁰21' Lintang Selatan dan antara 108⁰41' dan 109⁰11' Bujur Timur. Secara geografis Kabupaten Brebes terletak di ujung utara barat Provinsi Jawa Tengah berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat, dimana batas sebelah utara berupa laut jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat, dimana batas sebelah utara berupa laut jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.

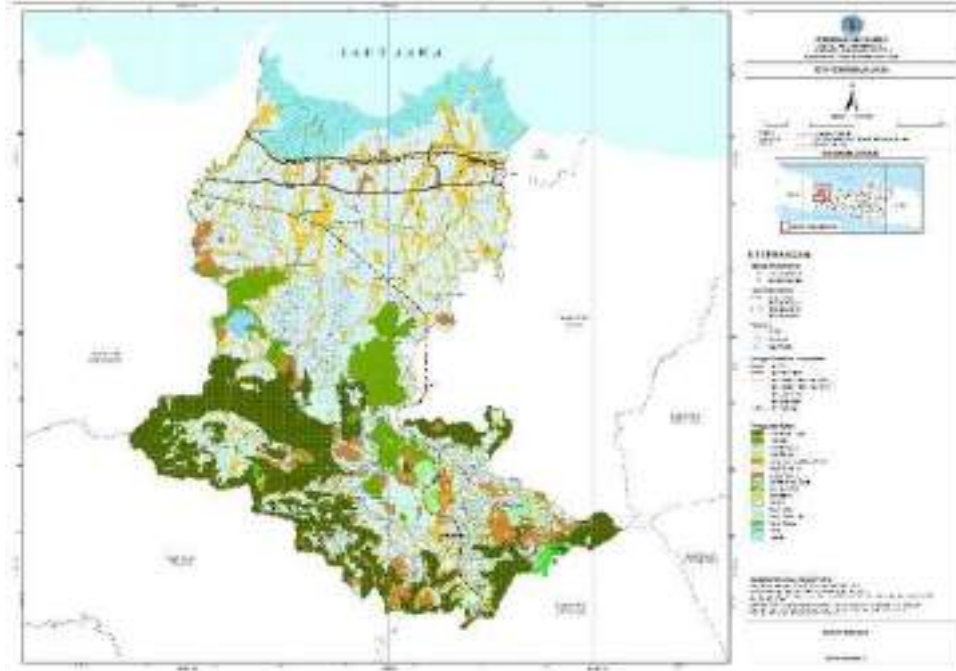


Sumber: Perda Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 Tentang RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039

Peta 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Brebes

2.1.2 Wilayah Kajian SSK

Wilayah kajian dokumen SSK meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Brebes, terdiri dari 17 Kecamatan, 297 Desa, 5 Kelurahan beserta seluruh RT/RW di dalamnya, sebagaimana peta di bawah ini.



Sumber: Perda Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 Tentang RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039

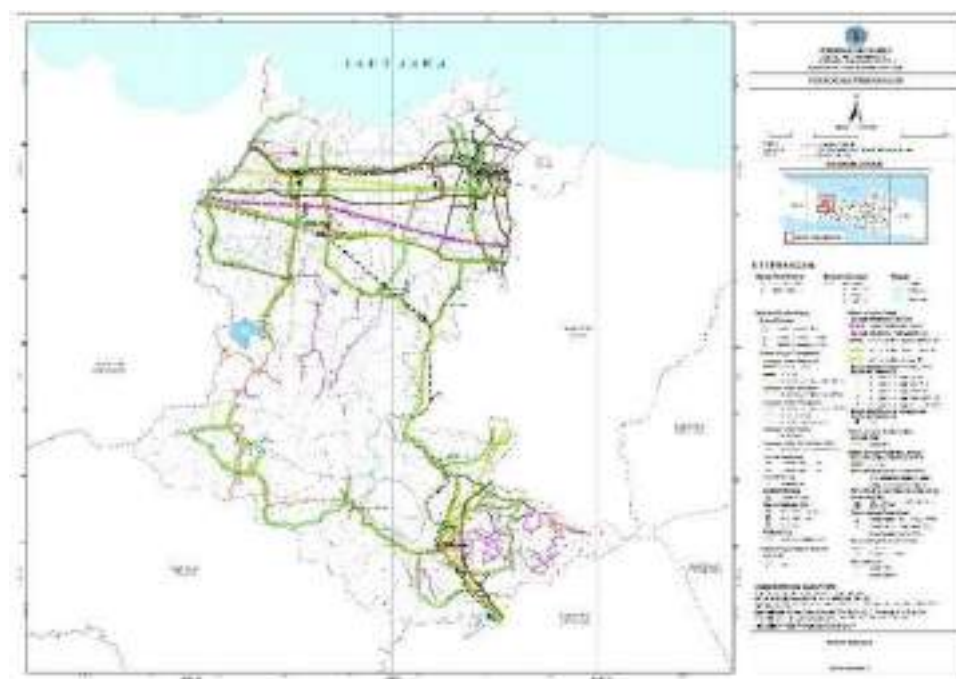
Peta 2. 2 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Brebes

Dari Peta di atas dapat diketahui bahwa dengan luas wilayah administrasi 175.806 hektar Kabupaten Brebes terdiri dari 17 Kecamatan, 297 Desa dan 5 Kelurahan yang terbagi habis menjadi 1.177 dusun, 1.628 RW/Lingkungan dan 8.458 RT dimana luas kawasan terbangun (permukiman/pekarangan) sebesar 19.250 ha atau 11,58% dari luas wilayah kabupaten dan jumlah kawasan terbangun di masing-masing kecamatan yang cukup bervariasi, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 1 Tabel Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah per-Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan		Luas Area Terbangun (ha)	Luas Area Terbangun (ha)		Jumlah Penduduk (jiwa)		Kepadatan di area terbangun (jiwa/ha)
	Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
Salem	20	1	3.012,79	557,59	2.455,20	14.193	2.121	21,65
Bantarkawung	18	0	3.309,76	-	3.309,76	26.623	-	32,17
Bumiayu	4	11	1.883,81	1.051,17	832,64	8.462	20.614	61,73
Paguyangan	7	5	2.092,25	718,17	1.374,08	18.851	10.631	56,36
Sirampog	12	1	1.268,58	136,90	1.131,68	15.835	2.293	57,14
Tonjong	11	3	1.675,07	517,63	1.157,44	14.075	5.970	47,85
Larangan	8	3	3.138,23	1.019,35	2.118,88	25.066	16.048	52,40
Ketanggungan	12	9	3.011,82	979,02	2.032,80	19.709	18.216	50,36
Banjarharjo	22	3	2.808,33	460,65	2.347,68	27.972	5.375	47,48
Losari	17	5	1.815,16	703,00	1.112,16	27.997	8.095	79,51
Tanjung	11	7	1.556,5	755,54	800,96	14.952	12.605	70,80
Kersana	6	7	758,01	582,01	176,00	8.067	9.456	92,43
Bulakamba	9	10	3.254,1	2.336,18	917,92	19.531	28.242	58,71
Wanasari	9	11	2.221,06	1.806,34	414,72	15.270	27.264	76,59
Songgom	7	3	1.221,29	673,77	547,52	14.362	8.291	74,18
Jatibarang	13	9	894,01	528,73	365,28	11.394	11.412	102,00
Brebes	7	16	2.251,19	1.344,95	906,24	12.264	35.474	84,81

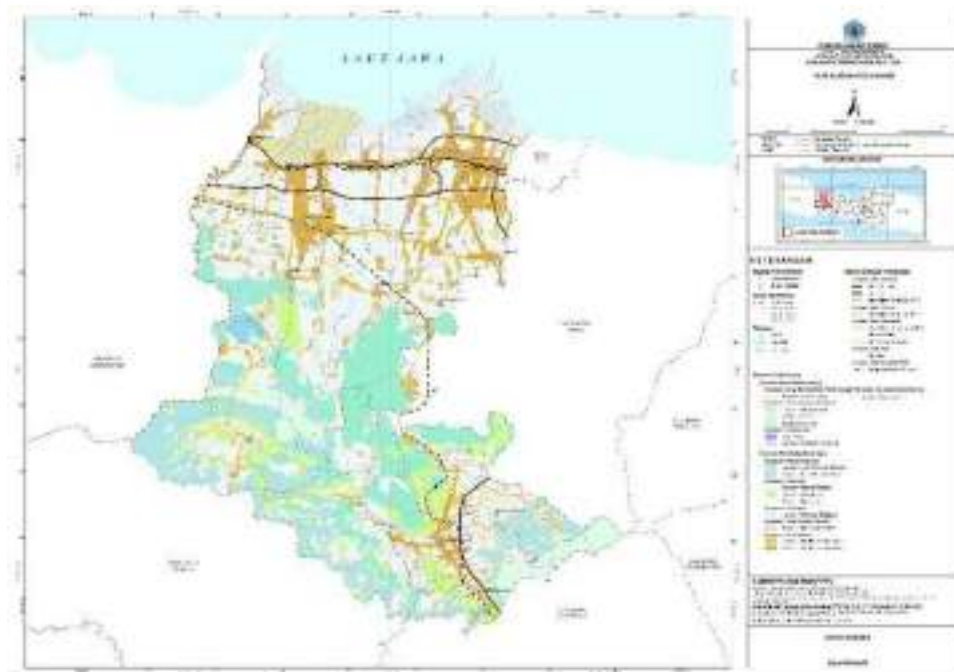
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, 2025



Sumber: Perda Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 Tentang RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039

Peta 2. 3 Peta Struktur Ruang Kabupaten Brebes

Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Brebes menunjukkan keterkaitan pusat kegiatan dan jaringan transportasi yang membentuk struktur wilayah. Jaringan jalan arteri, kolektor, lokal, serta jalur kereta api lintas utara menjadi tulang punggung konektivitas antarwilayah, dilengkapi terminal, pelabuhan, dan simpul transportasi lainnya. Pusat kegiatan ditata berjenjang dari PKN, PKW, hingga PKL yang mendukung pemerintahan, perdagangan, industri, jasa, hingga pariwisata, sementara kawasan lindung dan strategis juga diperhatikan untuk keseimbangan pembangunan. Struktur ruang ini dirancang guna memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan.



Sumber: Perda Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 Tentang RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039

Peta 2. 4 Peta Pola Ruang Kabupaten Brebes

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Brebes menggambarkan peruntukan ruang wilayah yang dibagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi hutan lindung, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan resapan air, serta daerah rawan bencana, sedangkan kawasan budidaya diperuntukkan bagi permukiman, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, hingga infrastruktur strategis. Jaringan jalan arteri, kolektor, dan jalur kereta api yang melintasi wilayah turut mendukung keterhubungan antar kawasan. Dengan pola ruang ini, pengembangan Kabupaten Brebes diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan pemanfaatan

ruang produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan.

2.1.3 Kependudukan dan Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk di Kabupaten Brebes Tahun 2025 sebesar 2.084.348 jiwa yang terdiri dari 1.058.482 laki-laki dan 1.025.866 perempuan, dengan lahan terbangun seluas 36.171,96 Ha maka kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Brebes sebesar 58 jiwa/Ha. Jumlah penduduk tersebut tersebar di wilayah perkotaan sejumlah 895.753 dan di wilayah perdesaan 1.188.595.

Jumlah keluarga yang tercatat sebanyak 694.887 KK, tersebar di wilayah perkotaan 298.621 KK dan 396.266 KK di wilayah perdesaan. Jumlah keluarga pra Sejahtera/Masyarakat Berpenghasilan Rendah sejumlah 47.822 KK yang tersebar di wilayah perkotaan 16.450 KK dan 31.372 KK di wilayah perdesaan.

2.2. Profil Sanitasi Saat Ini

2.2.1. Air Limbah Domestik

(1) Sistem dan Infrastruktur

Capaian Akses Air Limbah di Kabupaten Brebes menurut hasil analisis tim dibagi menjadi 5 kategori, yaitu Akses Aman, Akses Layak (Termasuk Aman), Akses Belum Layak, BABS Tertutup, dan BABS di Tempat Terbuka. Akses Aman diperoleh angka sebesar 1,1% yaitu sejumlah 7.620 KK, untuk akses Layak termasuk aman yaitu sebesar 98,4% atau sebesar 683.451 KK, sedangkan untuk akses belum layak tercatat sebesar 1,6% atau 11.022 KK.

Tabel II. 2 Capaian Akses Air Limbah Domestik

No	Komponen	Capaian (%) Tahun:2025	Jumlah (KK)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Akses Aman	1,1%	7.620
2	Akses Layak (Termasuk Aman)	98,4%	683.451
3	Akses Belum Layak	1,6%	11.022
4	BABS Tertutup	0,0%	0,0%
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Tabel II. 3 Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
	Pemerintah Daerah		
1	Jumlah truk tinja	Unit	0
2	Status aset	Serah terima aset atau pembelian sendiri (UPTD)	
3	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	4
4	Volume Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	0
5	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	0
6	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	0

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Kabupaten Brebes belum memiliki subsistem pengangkutan SPALD setempat baik berupa tinja motor ataupun sarana pengangkutan lainnya jadi untuk data masih belum dapat terisi dan untuk foto juga belum ada gambar yang bisa ditampilkan.

Belum Ada Foto	Belum Ada Foto
----------------	----------------

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Gambar 2. 1 Sub-sistem Pengangkutan SPALD-T

Persentase rumah tangga yang memiliki jamban dan tangki septik sebagai subsistem pengolahan setempat di Kabupaten Brebes adalah sebesar 97,4% untuk rumah tangga yang terkoneksi ke dalam SPALD-T sebesar 1%.

Tabel II. 4 SPALDS-Subsistem Pengolahan Setempat

No	Deskripsi	Persentase
1	Layak	
	Persentase RT yang memiliki jamban dan tangki septik	97,4%
	Persentase RT yang terkoneksi ke SPALD-T	1,0%
3	Persentase RT menggunakan fasilitas yang belum layak	2%
4	Persentase RT yang BABS terselubung	0%
5	Persentase RT yang BABS di tempat terbuka	0,0%

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Belum Ada Foto	Belum Ada Foto
----------------	----------------

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Gambar 2. 2 Sub-sistem Pengolahan SPALD-T

Kabupaten Brebes belum memiliki Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja atau IPLT, namun sejak tahun 2024 Kabupaten Brebes telah menyiapkan anggaran untuk penyediaan lahan calon lokasi IPLT Kabupaten Brebes juga telah mengalokasikan anggaran untuk produk rencana masterplan dan rencana detail pembangunan IPLT, proses ini masih terkendala terkait kesepakatan dengan warga di sekitar calon Lokasi IPLT. Kerjasama juga dilakukan oleh Pemkab Brebes dengan Pemkot Tegal terkait kondisi eksisting pembuangan limbah tinja sebagian kecil masyarakat Brebes di IPLT Kota Tegal.

Tabel II. 5 SPALDS Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja

No	Deskripsi	Satuan	IPLT 1
	SPALD-S		
1	Nama IPLT		-
2	Status aset		Belum Ada
3	Kapasitas IPLT	m3/hari	0
4	Tahun Pembangunan		0
5	Tahun Rehabilitasi		0
6	Wilayah Ckupan Pelayanan		0
7	Wilayah layanan terjauh	km	0
	Deskripsi IPLT		
1	Sistem yang digunakan		Tidak ada - Tidak ada - Tidak ada - Tidak ada
2	Kondisi IPLT		Belum Ada
3	Kualitas Effluen		
4	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)		
5	Kondisi jalan akses		

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

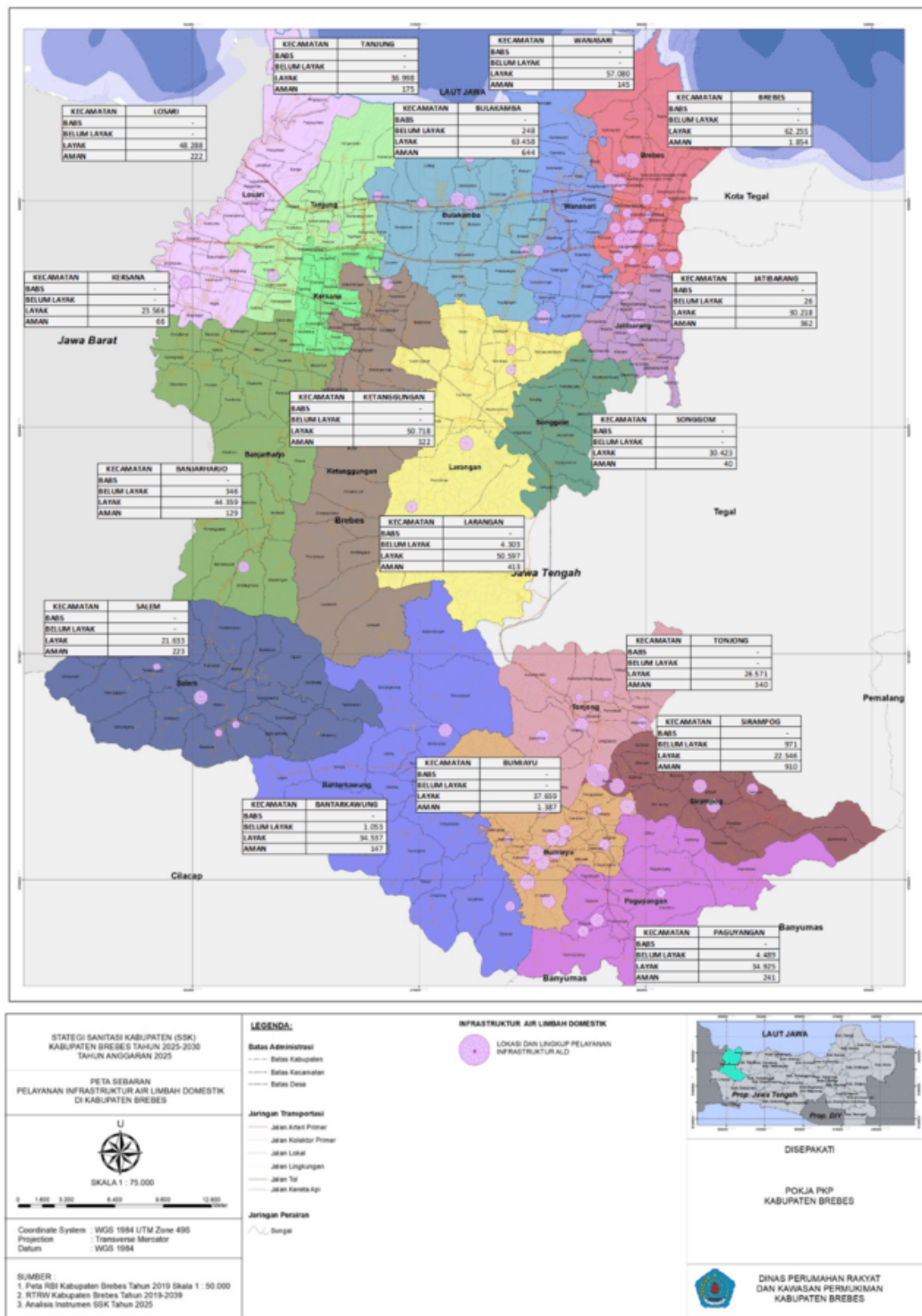
Belum Ada Foto	Belum Ada Foto
----------------	----------------

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Gambar 2. 3 Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pemenuhan Pelayanan Air Limbah domestic di Kabupaten Brebes berupa pelayanan infrastruktur Sistem Pelayanan Air Limbah Domestik Terpusat yang tersebar di 58 Desa/Kelurahan dalam 15 Kecamatan., yaitu:

1	Salem	Banjaran	30	Losari	Randusari
2	Salem	Salem	31	Tanjung	Mundu
3	Salem	Tembongraja	32	Tanjung	Sengon
4	Bantarkawung	Cinanas	33	Bulakamba	Banjaratma
5	Bantarkawung	Bantarwaru	34	Bulakamba	Bulusari
6	Bumiayu	Pruwatan	35	Bulakamba	Kluwut
7	Bumiayu	Laren	36	Bulakamba	Cimohong
8	Bumiayu	Kalierang	37	Bulakamba	Bulakamba
9	Bumiayu	Langkap	38	Bulakamba	Pulogading
10	Bumiayu	Adisana	39	Wanasari	Tegalgandu
11	Bumiayu	Bumiayu	40	Wanasari	Siasem
12	Bumiayu	Kaliwadas	41	Jatibarang	Kendawa
13	Bumiayu	Kalisumur	42	Jatibarang	Kedungtukang
14	Paguyangan	Wanatirta	43	Jatibarang	Kalialang
15	Paguyangan	Pakujati	44	Brebes	Pemaron
16	Sirampog	Batursari	45	Brebes	Kalimati
17	Sirampog	Sridadi	46	Brebes	Lembarawa
18	Sirampog	Benda	47	Brebes	Krasak
19	Tonjong	Galuhtimur	48	Brebes	Padasugih
20	Tonjong	Kutamendala	49	Brebes	Wangandalem
21	Tonjong	Karangjungkeng	50	Brebes	Terlangu
22	Tonjong	Tonjong	51	Brebes	Pulosari
23	Tonjong	Negarayu	52	Brebes	Kelurahan Brebes
24	Tonjong	Purbayasa	53	Brebes	Kelurahan Gandasuli
25	Larangan	Pamulihan	54	Brebes	Kaligangsa Kulon
26	Ketanggungan	Siandong	55	Brebes	Kelurahan Limbangan Kulon
27	Banjarharjo	Ciduwet	56	Brebes	Kelurahan Pasarbatang
28	Banjarharjo	Sindangheula	57	Brebes	Pagejungan
29	Losari	Bojongsari	58	Brebes	Kedunguter



Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Peta 2. 5 Peta Cakupan Layanan SPAL Domestik Kabupaten Brebes

Peta Cakupan Layanan SPAL Domestik Terpusat di Kabupaten Brebes memberi informasi mengenai sebaran penggunaan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Brebes dengan deliniasi sistem layanan air limbah domestik disesuaikan dengan keadaan nyata di lokasi.

Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berisi tentang analisa gap akses air limbah domestik kabupaten Brebes terhadap target yang ingin dicapai sampai tahun 2029 dengan menyandingkan dengan . target RPJMN 2025-2029. Capaian akses aman Kabupaten Brebes yaitu sebesar 1,1% masih memiliki gap terhadap target jangka pendek sebesar 3,9% dan terhadap target 2029 sebesar 13,9%. Target capaian akses aman Kabupaten Brebes tahun 2029 yang sebesar 15% cukup jauh di bawah target nasional yang sebesar 30% dan juga target provinsi yang sebesar 40%. Capaian akses layak yang termasuk di dalamnya akses aman di Kabupaten Brebes ada tahun 2025 yaitu 98,4% yang masih memiliki gap sebesar 1,6% terhadap target jangka pendek maupun jangka Panjang, sedangkan untuk akses belum layak masih menyisakan 1,6%, yang akan segera ditangani dalam jangka waktu pendek.

Tabel II. 6 Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah

No	Komponen	Target RPJMN Nasional 2025-2029 (%)	Target - 2030 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun:2025	GAP (%) Terhadap Target 2030	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Brebes	Kabupaten Brebes			
1	Akses Aman	30%	40,0%	15,0%	5,0%	1,1%	13,9%	3,9%
2	Akses Layak (Termasuk Aman)	100%	100,0%	100,0%	100,0%	98,4%	1,6%	1,6%
3	Akses Belum Layak	0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	-1,6%	-1,6%
4	BABS Tertutup	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting dilakukan menggunakan informasi tentang kapasitas penggunaan dari truk tinja dan IPLT yang telah dimiliki, namun seperti yang telah diijelaskan di pembahasan sebelumnya Kabupaten Brebes belum memiliki truk tinja maupun IPLT. Kabupaten Brebes memiliki SPALD-T di beberapa lokasi yang bersumber dari anggaran DAK Sanitasi yang didanai oleh APBN sejak tahun 2021, terdapat pula SPALD-T yang dibangun sebelum tahun 2020 dengan sumber anggaran dari APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten. Kapasitas penggunaan SPALD-T berbasis masyarakat di Kabupaten Brebes rata-rata sudah

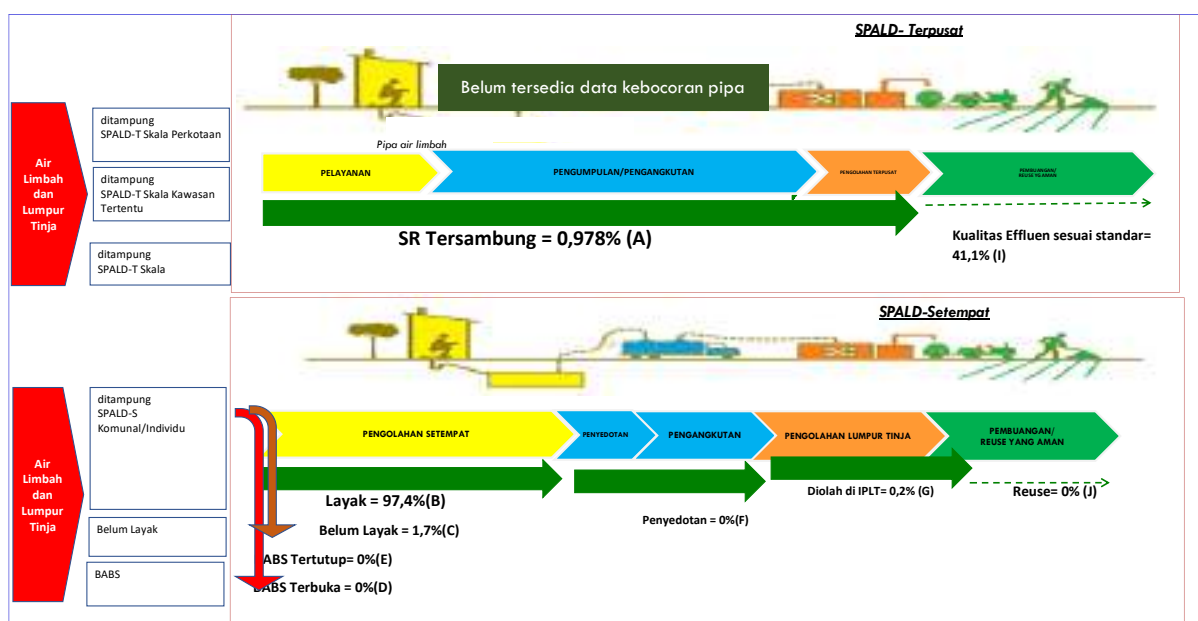
melebihi kapasitas yang direncanakan, hal ini menjadi catatan bersama terkait peningkatan kapasitas maupun kebutuhan pembangunan SPALD-T yang baru.

Tabel II. 7 Analisis Keberfungsian Infrastruktur Air Limbah

Infrastruktur	Persentase
IPLT	
Kapasitas Penggunaan IPLT	0,00%
Kapasitas penggunaan truk	0,00%
Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain)	0,00%
Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	0,00%
Kapasitas IPLT terhadap total RT	0,00%
SPALD-T	
Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman Berbasis Masy	103,87%
Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman	0%
Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	0%
Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	106%

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Analisis Rantai Layanan Sanitasi dilakukan menggunakan informasi tentang infrastruktur pengelolaan air limbah domestik (tangki septik individual, MCK Komunal, IPAL Domestik, IPLT, dll) yang ada di Kabupaten Brebes. Kondisi yang digambarkan dalam rantai layanan adalah kondisi pengelolaan air limbah saat ini di suatu Kabupaten Brebes.



Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Gambar 2. 4 Rantai Layanan Pengelolaan ALD

(2) *Kelembagaan dan Kebijakan /Peraturan*

A. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pemetaan institusi yang berwenang dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Brebes (baik operator maupun regulator) terdiri dari 3 OPD yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, dan Dinas Kesehatan Daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel II. 8 Kelembagaan Pemerintah Daerah

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah termasuk di dalamnya Air Limbah Domestik.
2.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes	Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum, sub-urusan jalan, cipta karya, dan bangunan/Gedung, termasuk di dalamnya urusan drainase perkotaan.
3.	Dinas Kesehatan Daerah	Menjaga, meningkatkan, dan mengembangkan kesehatan Masyarakat termasuk di dalamnya mengenai akses sanitasi.

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Tabel II. 9 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Fungsi/Kegiatan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/ BLU	PD dan sebagai lainnya
PERENCANAAN			
Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian Target	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
PENGADAAN SARANA			
Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
PENGELOLAAN			
Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
Mengelola IPLT dan atau IPAL	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestik	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-

Fungsi/Kegiatan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/ BLU	PD dan sebagai lainnya
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
Mengatur prosedur penyediaan layanan Air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah Domestik	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
MONITORING DAN EVALUASI			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/Kota	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

B. Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan masyarakat pengelola infrastruktur air limbah domestik di Kabupaten Brebes berupa KSM yaitu kelompok swadaya masyarakat. Terdapat 12 fasilitas yang dikelola oleh masyarakat yang tersebar di 12 desa mulai tahun 2021 hingga tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 10 Kelembagaan Masyarakat

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukannya	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	IPALD Kec. Bantarkawung Desa Cinanas	KSM Cinanas, 2023	Kelompok Swadaya Masyarakat, SK	10	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Desa Cinanas, Kec. Bantarkawung	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL – Dinas Perwaskim	Aktif/ jaringan terpelihara dan tidak ada kebocoran pipa jaringan, tidak ada
2	IPALD Kec. Bumiayu Desa Adisana	KSM Adisana, 2023	Kelompok Swadaya Masyarakat, SK	10	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Desa Adisana, Kec. Bumiayu	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL – Dinas Perwaskim	Aktif/ jaringan terpelihara dan tidak ada kebocoran pipa jaringan, tidak ada

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	IPALD Kec. Paguyangan Desa Wanatirta	KSM Wanatirta, 2023	Kelompok Swadaya Masyarakat, SK	10	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Desa Wanatirta Kec. Paguyangan	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL – Dinas Perwaskim	Aktif/ jaringan terpelihara dan tidak ada kebocoran pipa jaringan, tidak ada
4	IPALD Kec. Bumiayu Desa Kalierang	KSM Kalierang, 2023	Kelompok Swadaya Masyarakat, SK	10	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Desa Kalierang Kec. Bumiayu	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL – Dinas Perwaskim	Aktif/ jaringan terpelihara dan tidak ada kebocoran pipa jaringan, tidak ada
5	IPALD Kec. Bumiayu Desa Laren	KSM Laren, 2023	Kelompok Swadaya Masyarakat, SK	10	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Desa Laren Kec. Bumiayu	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL – Dinas Perwaskim	Aktif/ jaringan terpelihara dan tidak ada kebocoran pipa jaringan, tidak ada

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	IPALD Kec. Tonjong Desa Kutamendala	KSM Kutamendala, 2023	Kelompok Swadaya Masyarakat, SK	10	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Desa Kutamendala Kec. Tonjong	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL – Dinas Perwaskim	Aktif/ jaringan terpelihara dan tidak ada kebocoran pipa jaringan, tidak ada
7	IPALD Kec. Tonjong Purbayasa	KSM Purbayasa, 2023	Kelompok Swadaya Masyarakat, SK	10	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Desa Purbayas Kec. Tonjong a	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL – Dinas Perwaskim	Aktif/ jaringan terpelihara dan tidak ada kebocoran pipa jaringan, tidak ada
8	IPALD Kec. Tonjong Karangjengkeng	KSM Karangjengkeng, 2023	Kelompok Swadaya Masyarakat, SK	10	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Desa Karangjengkeng Kec. Tonjong	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL – Dinas Perwaskim	Aktif/ jaringan terpelihara dan tidak ada kebocoran pipa jaringan, tidak ada

No	Fasilitas yang dikelola		Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
9	IPALD Bumiayu	Kec. Desa Kalisumur	KSM Kalisumur, 2023	Kelompok Swadaya Masyarakat, SK	10	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Desa Kalisumur Kec. Bumiayu	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL – Dinas Perwaskim	Aktif/ jaringan terpelihara dan tidak ada kebocoran pipa jaringan, tidak ada
10	IPALD Salem	Kec. Desa Salem	KSM Salem, 2023	Kelompok Swadaya Masyarakat, SK	10	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Desa Salem Kec. Salem	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL – Dinas Perwaskim	Aktif/ jaringan terpelihara dan tidak ada kebocoran pipa jaringan, tidak ada
11	IPALD Salem Banjaran	Kec. Desa Banjaran	KSM Banjaran, 2023	Kelompok Swadaya Masyarakat, SK	10	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Desa Banjaran Kec. Salem	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL – Dinas Perwaskim	Aktif/ jaringan terpelihara dan tidak ada kebocoran pipa jaringan, tidak ada

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	IPALD Kec. Salem Desa Tembongraja	KSM Tembongraja, 2023	Kelompok Swadaya Masyarakat, SK	10	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Desa Tembongraja Kec. Salem	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL – Dinas Perwaskim	Aktif/ jaringan terpelihara dan tidak ada kebocoran pipa jaringan, tidak ada

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

C. Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Pemangku kepentingan di sektor air limbah domestik di Kabupaten Brebes terdiri dari berapa sektor non pemerintah mulai dari anggota legislative, sektor swasta organisasi massa, hingga yayasan atau kelompok Masyarakat.

Tabel II. 11 Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	Legislasi Panganggaran Pengawasan	Tim anggaran terkait Alokasi APBD Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah
Pengusaha / Swasta: -	Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Mendapatkan PROPER	Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah
292 BUMDes		
Organisasi Massa (Ormas): - Baznas	Pendayagunaan dana ZISWAF/Baznas untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat terutama masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI	Pemanfaatan dana ZISWAF/Baznas untuk program air minum dan sanitasi.
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll): - Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Mendukung dan mendampingi Pokja PKP dalam menjalankan urusan di bidang PKP	Advokasi dan komunikasi sanitasi.
Tokoh Masyarakat		

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Tabel II. 12 Analisa Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	- Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD - Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk peningkatan pelayanan sanitasi	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
Pengusaha / Swasta: -	Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Sedang	Sedang	Tidak
Organisasi Massa (Ormas): Baznas	Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.	Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat	Tinggi	Sedang	Tidak
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll): Forum PKP	Advokasi dan komunikasi sanitasi	SK Forum PKP	Tinggi	Sedang	Tidak

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

D. Regulasi

Peraturan dan kebijakan pengelolaan yang terkait air limbah domestik yang telah ada di Kabupaten Brebes berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Tabel II. 13 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik

No			
1	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada √	Tidak Ada
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan.		
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Perda tentang RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 dan Perda tentang P2KPKPK Tahun 2023	
4	Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	Tidak Ada
a	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD : SPALD-S dan SPALD-T	√	
b	Substansi pengaturan Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi	√	
c	Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan	√	
d	Substansi pembinaan dan pengawasan		
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Sudah ada √	Belum ada
6	Sebutkan semua turunan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada	1. Perbup RDTR 2. SK Kumuh 3. 4.	
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum	Ada	Belum Ada √

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

(3) *Komunikasi dan Media*

Kegiatan komunikasi terkait promosi hygiene dan sanitasi, peta media komunikasi dan kerjasama terkait sanitasi di Kabupatn Brebes dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II. 14 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Pemicuan STBM	2013	Dinas Kesehatan	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari-hari.	Masyarakat di 100 RT pada 13 Desa/Kelurahan prioritas yang menurut kajian EHRA memiliki Indek Risiko Sanitasi Tertinggi.	Sanitasi buruk dan perilaku hidup tidak bersih dan tidak sehat itu menjijikan, memalukan dan membuat sakit, karenanya perlu kita	Terbatasnya tenaga fasilitator yang handal, membuat pemicuan di sejumlah RT kurang sukses, perlu peningkatan jumlah fasilitator handal.

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Tabel II. 15 Tabel Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Air Limbah

No	Jenis Media a)	Khalayak b)	Pendanaan c)	Isu yang Diangkat d)	Pesan Kunci e)	Efektivitas f)
1	Radio SS : Produksi dan penyiaran Talk Show dan ILM	Masyarakat Umum terutama masyarakat Surabumi yang bertempat tinggal di daerah banjir.	Produksi dan penyiaran dari Radio SS, nara sumber dan data informasi dari Pokja Sanitasi.	Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Banjir dan Mengurangi Risiko Banjir	Bersama-sama mencegah banjir dan mengurangi risiko banjir.	Dari hasil evaluasi, 5 dari 10 responden masyarakat Surabumi mengaku mendengar informasi tentang pencegahan banjir dari Mengurangi Risiko Banjir dari Radio SS.
2	JTV : Produksi dan penyiaran liputan , Talkshow dan ILM	Masyarakat Umum dan Masyarakat Target Sambungan IPAL.	Pengelola IPAL menyelenggarakan jumpa pers dan JTV menindaklanjuti dengan memproduksi dan menayangkan	Mengajak masyarakat di daerah yang dilalui saluran IPAL untuk menyambungkan pembuangan limbahnya ke IPAL.	Sambungan buangan limbah cair ke IPAL lebih hemat dan lebih sehat.	Tayangan JTV membantu meyakinkan target untuk ikut menyambung ke saluran IPAL.

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

2.2.2. Pengelolaan Sampah

(1) Sistem dan Infrastruktur

Berdasarkan data capaian akses layanan sampah Kabupaten Brebes pada tahun 2024, tingkat Layanan Pengumpulan Sampah baru mencapai 34,4%. Angka capaian ini mengindikasikan bahwa sistem pengumpulan sampah belum menjangkau dua pertiga dari populasi atau wilayah layanan. Lebih lanjut, capaian pada komponen pengelolaan sampah menunjukkan angka yang sangat rendah, di mana Sampah Terkelola secara total baru mencapai 3,0%, yang terdiri dari 1,0% sampah terolah dan 2,0% sampah terdaur ulang. Rendahnya angka ini mencerminkan minimnya aktivitas pengolahan dan daur ulang yang efektif. Sementara itu, capaian Residu di LUR (Lokasi Ujung Rantai/TPA) tercatat sebesar 15,4%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan sampah masih berada pada level yang sangat minimal, dengan tantangan utama berada pada peningkatan cakupan layanan pengumpulan dan perbaikan drastis pada aspek pengolahan dan daur ulang..

Tabel II. 16 Tabel Capaian Akses Layanan Sampah

No	Komponen	Capaian (%) Tahun: 2025
1	Layanan Pengumpulan Sampah	34,4%
2	Sampah Terolah	3,0%
	Sampah terolah	1,0%
	Sampah terdaur ulang	2,0%
3	Residu di LUR	15,4%

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Tabel II. 17 Timbulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Timbulan Sampah Rumah Tangga	Ton/Hari	1.021,54
	Data komposisi Sampah :		KOMPOSISI SAMPAH BERDASARKAN JENIS SAMPAH - Kayu/Ranting: 50% - Plastik: 25% - Kertas/Karton: 5% - Logam: 4% - Kain: 4% - Sisa Makanan: 5% - Lainnya: 5%
2	Timbulan Sampah Non Permukiman	Ton/hari	200-300

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Data menunjukkan bahwa total timbulan sampah harian merupakan volume yang sangat besar, dengan sampah rumah tangga mencapai 1.021,54 Ton/Hari dan sampah non-permukiman menambahkan sekitar 200-300 Ton/Hari. Dari keseluruhan timbulan tersebut, analisis komposisi sampah menyoroiti dominasi bahan organik keras dan anorganik, di mana Kayu/Ranting menyumbang mayoritas hingga 50%, diikuti oleh Plastik yang mencapai 25%, sementara sampah lain seperti sisa makanan, kertas/karton, dan logam menyumbang persentase yang lebih kecil. Tingginya timbulan harian ini, terutama dari rumah tangga, ditambah dengan dominasi Kayu/Ranting dan Plastik, memberikan tantangan signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi pengelolaan sampah, terutama dalam hal pemilahan dan daur ulang.

Tabel II. 18 Pengumpulan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Gerobak/Motor/Becak/Pick Up	Unit	Gerobak: 145 Motor Roda Tiga: 120 Pick Up : 30
2	Kapasitas (Total) Angkut	m ³ /Unit	Gerobak: 1,5 Motor Roda Tiga: 4 Pick Up : 30
3	Ritase	Rit/hari	2

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Data sarana angkut sampah menunjukkan bahwa unit armada yang digunakan terdiri dari 145 Gerobak, 120 Motor Roda Tiga, dan 30 Pick Up. Kapasitas angkut untuk masing-masing jenis sarana bervariasi secara signifikan: Gerobak memiliki kapasitas terkecil sebesar 1,5 m³/Unit, Motor Roda Tiga sebesar 4 m³/Unit, dan Pick Up memiliki kapasitas terbesar, yaitu 30 m³/Unit. Meskipun terdapat perbedaan kapasitas angkut, frekuensi pengangkutan (Ritase) untuk setiap unit rata-rata adalah 2 rit per hari. Efektivitas pengelolaan sampah sangat bergantung pada optimalisasi pemanfaatan armada ini, terutama mengingat tingginya volume timbulan sampah harian yang telah diuraikan sebelumnya.



Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Gambar 2. 5 Foto Sarana Pengumpulan

Tabel II. 19 Kapasitas Pengangkut Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah TPS (Bak Biasa)	Unit	11
2	Kapasitas TPS	m ³ /Unit	23

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Jumlah Dump Truck, Mini Dump Truck, Arm Roll	Unit	Dumptruck : 23 Mini Dump Truck : 1 Armroll truck : 1
4	Kapasitas Dump Truck, Mini Dump Truck, Arm Roll	m ³ /Unit	Dumptruck : 6 Mini Dump Truck : 4 Armroll truck : 6
5	Ritasi Pengangkutan	Rit/hari	Dumptruck : 2 Mini Dump Truck : 2 Armroll truck : 2

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah lanjutan meliputi ketersediaan tempat penampungan sementara (TPS) dan armada truk. Saat ini terdapat 11 unit TPS (bak biasa) dengan total kapasitas 23 m³/Unit. Untuk pengangkutan sampah dari TPS ke tempat pemrosesan akhir (TPA), armada yang tersedia terdiri dari 23 Dumptruck, 1 Mini Dump Truck, dan 1 Arm Roll Truck. Masing-masing jenis truk memiliki kapasitas yang berbeda: Dumptruck memiliki kapasitas 6 m³/Unit, Mini Dump Truck 4 Unit dan Arm Roll Truck 6 m³/Unit. Seluruh jenis truk ini memiliki frekuensi pengangkutan atau Ritasi Pengangkutan yang seragam, yaitu 2 rit per hari.



Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Gambar 2. 6 Foto Sarana Pengangkutan

Tabel II. 20 Pengolahan Sampah

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Dibangun	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah Didaur Ulang (ton/hari)	Jumlah Sampah Diolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Produk Pengolahan (kompos, material daur ulang)	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Persentase sampah yang berhasil diolah	Estimasi jumlah RT terlayani dari jumlah sampah masuk (RT)
	(TPS3R/ Bank Sampah/Sektor Informal/Pelapak yang bekerjasama dengan Pemda)														
1	Bank Sampah	2016	0	0,000833333	0,000833333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
2	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
3	Bank Sampah	2016	0	0,002333333	0,002333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
4	Bank Sampah	2016	0	0,002666667	0,002666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
5	Bank Sampah	2016	0	0,004	0,004	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
6	Bank Sampah	2016	0	0	0	0	0	Material Daur Ulang	Tidak ada	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	0%	0
7	Bank Sampah	2016	0	0,000633333	0,000633333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
8	Bank Sampah	2016	0	0,0004	0,0004	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
9	Bank Sampah	2016	0	0,002666667	0,002666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
10	Bank Sampah	2016	0	0,003266667	0,003266667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
11	Bank Sampah	2016	0	0	0	0	0	Material Daur Ulang	Tidak ada	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	0%	0
12	Bank Sampah	2016	0	0,008333333	0,008333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	6
13	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
14	Bank Sampah	2016	0	0,01	0,01	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	7
15	Bank Sampah	2016	0	0,009	0,009	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	6
16	Bank Sampah	2016	0	0,0063	0,0063	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
17	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
18	Bank Sampah	2016	0	0,003166667	0,003166667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
19	Bank Sampah	2016	0	0,004	0,004	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
20	Bank Sampah	2016	0	0,0065	0,0065	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
21	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
22	Bank Sampah	2016	0	0,007666667	0,007666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	6
23	Bank Sampah	2016	0	0,0084	0,0084	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	6
24	Bank Sampah	2016	0	0	0	0	0	Material Daur Ulang	Tidak ada	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	0%	0
25	Bank Sampah	2016	0	0,001733333	0,001733333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Dibangun	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah Didaur Ulang (ton/hari)	Jumlah Sampah Diolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Produk Pengolahan (kompos, material daur ulang)	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Persentase sampah yang berhasil diolah	Estimasi jumlah RT terlayani dari jumlah sampah masuk (RT)
	(TPS3R/ Bank Sampah/Sektor Informal/Pelapak yang bekerjasama dengan Pemda)														
26	Bank Sampah	2016	0	0,002	0,002	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
27	Bank Sampah	2016	0	0,001166667	0,001166667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
28	Bank Sampah	2016	0	0,0052	0,0052	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
29	Bank Sampah	2016	0	0,001666667	0,001666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
30	Bank Sampah	2016	0	0,005	0,005	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
31	Bank Sampah	2016	0	0,002166667	0,002166667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
32	Bank Sampah	2016	0	0,006666667	0,006666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
33	Bank Sampah	2016	0	0,006333333	0,006333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
34	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
35	Bank Sampah	2016	0	0,001333333	0,001333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
36	Bank Sampah	2016	0	0,009333333	0,009333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	7
37	Bank Sampah	2016	0	0,002333333	0,002333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
38	Bank Sampah	2016	0	0,011666667	0,011666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	8
39	Bank Sampah	2016	0	0,001333333	0,001333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
40	Bank Sampah	2016	0	0,003233333	0,003233333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
41	Bank Sampah	2016	0	0,002	0,002	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
42	Bank Sampah	2016	0	0,000666667	0,000666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
43	Bank Sampah	2016	0	0,0005	0,0005	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
44	Bank Sampah	2016	0	0,0032	0,0032	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
45	Bank Sampah	2016	0	0,001666667	0,001666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
46	Bank Sampah	2016	0	0,0013	0,0013	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
47	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
48	Bank Sampah	2016	0	0,001266667	0,001266667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
49	Bank Sampah	2016	0	0,000666667	0,000666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
50	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
51	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Dibangun	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah Didaur Ulang (ton/hari)	Jumlah Sampah Diolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Produk Pengolahan (kompos, material daur ulang)	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Persentase sampah yang berhasil diolah	Estimasi jumlah RT terlayani dari jumlah sampah masuk (RT)
	(TPS3R/ Bank Sampah/Sektor Informal/Pelapak yang bekerjasama dengan Pemda)														
52	Bank Sampah	2016	0	0,0032	0,0032	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
53	Bank Sampah	2016	0	0	0	0	0	Material Daur Ulang	Tidak ada	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	0%	0
54	Bank Sampah	2016	0	0,000966667	0,000966667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
55	Bank Sampah	2016	0	0,000933333	0,000933333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
56	Bank Sampah	2016	0	0,003733333	0,003733333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
57	Bank Sampah	2016	0	0	0	0	0	Material Daur Ulang	Tidak ada	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	0%	0
58	Bank Sampah	2016	0	0	0	0	0	Material Daur Ulang	Tidak ada	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	0%	0
59	Bank Sampah	2016	0	0,004166667	0,004166667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
60	Bank Sampah	2016	0	0,000833333	0,000833333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
61	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
62	Bank Sampah	2016	0	0,002333333	0,002333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
63	Bank Sampah	2016	0	0,002666667	0,002666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
64	Bank Sampah	2016	0	0,004	0,004	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
65	Bank Sampah	2016	0	0	0	0	0	Material Daur Ulang	Tidak ada	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	0%	0
66	Bank Sampah	2016	0	0,000633333	0,000633333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
67	Bank Sampah	2016	0	0,0004	0,0004	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
68	Bank Sampah	2016	0	0,002666667	0,002666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
69	Bank Sampah	2016	0	0,003266667	0,003266667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
70	Bank Sampah	2016	0	0	0	0	0	Material Daur Ulang	Tidak ada	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	0%	0
71	Bank Sampah	2016	0	0,008333333	0,008333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	6
72	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
73	Bank Sampah	2016	0	0,01	0,01	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	7
74	Bank Sampah	2016	0	0,009	0,009	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	6
75	Bank Sampah	2016	0	0,0063	0,0063	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
76	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
77	Bank Sampah	2016	0	0,003166667	0,003166667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Dibangun	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah Didaur Ulang (ton/hari)	Jumlah Sampah Diolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Produk Pengolahan (kompos, material daur ulang)	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Persentase sampah yang berhasil diolah	Estimasi jumlah RT terlayani dari jumlah sampah masuk (RT)
	(TPS3R/ Bank Sampah/Sektor Informal/Pelapak yang bekerjasama dengan Pemda)														
78	Bank Sampah	2016	0	0,004	0,004	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
79	Bank Sampah	2016	0	0,0065	0,0065	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
80	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
81	Bank Sampah	2016	0	0,007666667	0,007666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	6
82	Bank Sampah	2016	0	0,0084	0,0084	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	6
83	Bank Sampah	2016	0	0	0	0	0	Material Daur Ulang	Tidak ada	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	0%	0
84	Bank Sampah	2016	0	0,001733333	0,001733333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
85	Bank Sampah	2016	0	0,002	0,002	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
86	Bank Sampah	2016	0	0,001166667	0,001166667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
87	Bank Sampah	2016	0	0,0052	0,0052	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
88	Bank Sampah	2016	0	0,001666667	0,001666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
89	Bank Sampah	2016	0	0,005	0,005	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
90	Bank Sampah	2016	0	0,002166667	0,002166667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
91	Bank Sampah	2016	0	0,006666667	0,006666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
92	Bank Sampah	2016	0	0,006333333	0,006333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
93	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
94	Bank Sampah	2016	0	0,001333333	0,001333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
95	Bank Sampah	2016	0	0,009333333	0,009333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	7
96	Bank Sampah	2016	0	0,002166667	0,002166667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
97	Bank Sampah	2016	0	0,006666667	0,006666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
98	Bank Sampah	2016	0	0,006333333	0,006333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
99	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
100	Bank Sampah	2016	0	0,001333333	0,001333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
101	Bank Sampah	2016	0	0,009333333	0,009333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	7
102	Bank Sampah	2016	0	0,002333333	0,002333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
103	Bank Sampah	2016	0	0,011666667	0,011666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	8

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Dibangun	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah Didaur Ulang (ton/hari)	Jumlah Sampah Diolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Produk Pengolahan (kompos, material daur ulang)	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Persentase sampah yang berhasil diolah	Estimasi jumlah RT terlayani dari jumlah sampah masuk (RT)
	(TPS3R/ Bank Sampah/Sektor Informal/Pelapak yang bekerjasama dengan Pemda)														
104	Bank Sampah	2016	0	0,001333333	0,001333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
105	Bank Sampah	2016	0	0,003233333	0,003233333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
106	Bank Sampah	2016	0	0,002	0,002	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
107	Bank Sampah	2016	0	0,000666667	0,000666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
108	Bank Sampah	2016	0	0,0005	0,0005	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
109	Bank Sampah	2016	0	0,0032	0,0032	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
110	Bank Sampah	2016	0	0,001666667	0,001666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
111	Bank Sampah	2016	0	0,0013	0,0013	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
112	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
113	Bank Sampah	2016	0	0,001266667	0,001266667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
114	Bank Sampah	2016	0	0,000666667	0,000666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
115	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
116	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
117	Bank Sampah	2016	0	0,0032	0,0032	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
118	Bank Sampah	2016	0	0	0	0	0	Material Daur Ulang	Tidak ada	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	0%	0
119	Bank Sampah	2016	0	0,000966667	0,000966667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
120	Bank Sampah	2016	0	0,000933333	0,000933333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
121	Bank Sampah	2016	0	0,003733333	0,003733333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
122	Bank Sampah	2016	0	0	0	0	0	Material Daur Ulang	Tidak ada	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	0%	0
123	Bank Sampah	2016	0	0	0	0	0	Material Daur Ulang	Tidak ada	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	0%	0
124	Bank Sampah	2016	0	0,004166667	0,004166667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
125	Bank Sampah	2016	0	0,000833333	0,000833333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
126	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
127	Bank Sampah	2016	0	0,002333333	0,002333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
128	Bank Sampah	2016	0	0,002666667	0,002666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
129	Bank Sampah	2016	0	0,004	0,004	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Dibangun	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah Didaur Ulang (ton/hari)	Jumlah Sampah Diolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Produk Pengolahan (kompos, material daur ulang)	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Persentase sampah yang berhasil diolah	Estimasi jumlah RT terlayani dari jumlah sampah masuk (RT)
	(TPS3R/ Bank Sampah/Sektor Informal/Pelapak yang bekerjasama dengan Pemda)														
130	Bank Sampah	2016	0	0	0	0	0	Material Daur Ulang	Tidak ada	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	0%	0
131	Bank Sampah	2016	0	0,000633333	0,000633333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
132	Bank Sampah	2016	0	0,0004	0,0004	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
133	Bank Sampah	2016	0	0,002666667	0,002666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
134	Bank Sampah	2016	0	0,003266667	0,003266667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
135	Bank Sampah	2016	0	0	0	0	0	Material Daur Ulang	Tidak ada	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	0%	0
136	Bank Sampah	2018	0	0,008333333	0,008333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	6
137	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
138	Bank Sampah	2016	0	0,01	0,01	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	7
139	Bank Sampah	2016	0	0,009	0,009	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	6
140	Bank Sampah	2016	0	0,0063	0,0063	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
141	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
142	Bank Sampah	2016	0	0,003166667	0,003166667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
143	Bank Sampah	2016	0	0,004	0,004	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
144	Bank Sampah	2016	0	0,0065	0,0065	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
145	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
146	Bank Sampah	2016	0	0,007666667	0,007666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	6
147	Bank Sampah	2016	0	0,0084	0,0084	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	6
148	Bank Sampah	2016	0	0	0	0	0	Material Daur Ulang	Tidak ada	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	0%	0
149	Bank Sampah	2016	0	0,001733333	0,001733333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
150	Bank Sampah	2016	0	0,002	0,002	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
151	Bank Sampah	2016	0	0,001166667	0,001166667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
152	Bank Sampah	2016	0	0,0052	0,0052	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
153	Bank Sampah	2016	0	0,001666667	0,001666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
154	Bank Sampah	2016	0	0,005	0,005	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
155	Bank Sampah	2016	0	0,002166667	0,002166667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Dibangun	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah Didaur Ulang (ton/hari)	Jumlah Sampah Diolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Produk Pengolahan (kompos, material daur ulang)	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Persentase sampah yang berhasil diolah	Estimasi jumlah RT terlayani dari jumlah sampah masuk (RT)
	(TPS3R/ Bank Sampah/Sektor Informal/Pelapak yang bekerjasama dengan Pemda)														
156	Bank Sampah	2016	0	0,006666667	0,006666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
157	Bank Sampah	2016	0	0,006333333	0,006333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
158	Bank Sampah	2016	0	0,003333333	0,003333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
159	Bank Sampah	2016	0	0,001333333	0,001333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
160	Bank Sampah	2016	0	0,009333333	0,009333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	7
161	Bank Sampah	2016	0	0,002333333	0,002333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
162	Bank Sampah	2016	0	0,011666667	0,011666667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	8
163	Bank Sampah	2016	0	0,001333333	0,001333333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
164	Bank Sampah	2016	0	0,003233333	0,003233333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
165	Bank Sampah	2018	0	0,002	0,002	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
166	Bank Sampah	2017	0	0,095	0,095	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	64
167	Bank Sampah	2017	0	0,011466667	0,011466667	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	8
168	Bank Sampah	2020	0	0,021833333	0,021833333	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	15
169	TPS 3R	2013	0	1,5	0,1	0	1,4	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Tidak Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	7%	1000
170	TPS 3R	2019	0	2	0,891	0,4	0,709	Kompos, Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	65%	1334
171	TPS 3R	2023	0	0	0	0	0	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	0%	0
172	TPS 3R	2023	0	0	0	0	0	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	0%	0
173	TPS 3R	2023	0	0	0	0	0	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	0%	0
174	TPS 3R	2023	0	0	0	0	0	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	0%	0
175	TPS 3R	2023	0	0,72	0,06	0,4	0,26	Kompos, Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	64%	480
176	TPS 3R	2023	0	0	0	0	0	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	0%	0
177	TPS 3R	2023	0	0	0	0	0	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	0%	0
178	TPS 3R	2023	0	0,55	0,055	0,15	0,345	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Kurang Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	37%	367

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Dibangun	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah Didaur Ulang (ton/hari)	Jumlah Sampah Diolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Produk Pengolahan (kompos, material daur ulang)	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Persentase sampah yang berhasil diolah	Estimasi jumlah RT terlayani dari jumlah sampah masuk (RT)
	(TPS3R/ Bank Sampah/Sektor Informal/Pelapak yang bekerjasama dengan Pemda)														
179	TPS 3R	2023	0	1,75	0,075	0,675	1	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Kurang Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	43%	1167
180	TPS 3R	2023	0	0	0	0	0	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	0%	0
181	TPS 3R	2023	0	0	0	0	0	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	0%	0
182	TPS 3R	2024	0	0	0	0	0	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	0%	0
183	TPS 3R	2024	0	0	0	0	0	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	0%	0
184	TPS 3R	2024	0	0	0	0	0	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	0%	0
185	TPS 3R	2024	0	0	0	0	0	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	0%	0
186	TPS 3R	2024	0	0	0	0	0	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	0%	0
187	TPS 3R	2024	0	0,5	0,2765	0,025	0,1985	Kompos, Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	60%	334
188	TPS 3R	2024	0	0	0	0	0	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	0%	0
189	TPS 3R	2024	0	0	0	0	0	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	0%	0
190	TPS 3R	2024	0	0	0	0	0	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	0%	0
191	TPS 3R	2024	0	0	0	0	0	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	0%	0
192	TPS 3R	2024	0	0,42	0,245	0,095	0,08	Kompos, Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	81%	280
193	TPS 3R	2024	0	0	0	0	0	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	0%	0
194	TPS 3R	2024	0	2,3	0,751	1,008	0,541	Kompos, Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	76%	1534
195	TPS 3R	2024	0	0,25	0,14	0,084	0,026	Kompos, Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	90%	167
196	TPS 3R	2024	0	2,5	0,06	0,636	1,804	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	28%	1667

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Dibangun	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah Didaur Ulang (ton/hari)	Jumlah Sampah Diolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Produk Pengolahan (kompos, material daur ulang)	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Persentase sampah yang berhasil diolah	Estimasi jumlah RT terlayani dari jumlah sampah masuk (RT)
	(TPS3R/ Bank Sampah/Sektor Informal/Pelapak yang bekerjasama dengan Pemda)														
197	TPS 3R	2024	0	0	0	0	0	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	0%	0
198	TPS 3R	2024	0	0	0	0	0	(isi sesuai kondisi lapangan)	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah	Iuran Masyarakat	0%	0
199	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2021	0	1	1	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	667
200	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2021	0	1	1	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	667
201	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2021	0	1	1	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	667
202	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,42	0,42	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	280
203	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,29	0,29	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	194
204	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,165	0,165	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	110
205	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,098	0,098	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	66
206	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,13	0,13	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	87
207	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,14	0,14	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	94
208	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,128	0,128	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	86
209	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,195	0,195	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	130
210	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,245	0,245	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	164

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Dibangun	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah Didaur Ulang (ton/hari)	Jumlah Sampah Diolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Produk Pengolahan (kompos, material daur ulang)	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Persentase sampah yang berhasil diolah	Estimasi jumlah RT terlayani dari jumlah sampah masuk (RT)
	(TPS3R/ Bank Sampah/ Sektor Informal/ Pelapak yang bekerjasama dengan Pemda)														
211	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,25	0,25	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	167
212	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,29	0,29	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	194
213	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,185	0,185	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	124
214	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,51	0,51	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	340
215	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,31	0,31	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	207
216	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,41	0,41	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	274
217	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,46	0,46	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	307
218	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	1,42	1,42	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	947
219	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	1,72	1,72	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	1147
220	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	1,625	1,625	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	1084
221	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,015	0,015	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	10
222	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,152	0,152	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	102
223	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,062	0,062	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	42

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Dibangun	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah Didaur Ulang (ton/hari)	Jumlah Sampah Diolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Produk Pengolahan (kompos, material daur ulang)	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Persentase sampah yang berhasil diolah	Estimasi jumlah RT terlayani dari jumlah sampah masuk (RT)
	(TPS3R/ Bank Sampah/Sektor Informal/Pelapak yang bekerjasama dengan Pemda)														
224	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,152	0,152	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	102
225	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,255	0,255	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	170
226	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,505	0,505	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	337
227	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,505	0,505	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	337
228	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,154	0,154	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	103
229	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	1,51	1,51	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	1007
230	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,255	0,255	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	170
231	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,605	0,605	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	404
232	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,202	0,202	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	135
233	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,041	0,041	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	28
234	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,052	0,052	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	35
235	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,052	0,052	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	35
236	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,03	0,03	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	20

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Dibangun	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah Didaur Ulang (ton/hari)	Jumlah Sampah Diolah (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Produk Pengolahan (kompos, material daur ulang)	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Persentase sampah yang berhasil diolah	Estimasi jumlah RT terlayani dari jumlah sampah masuk (RT)
	(TPS3R/ Bank Sampah/Sektor Informal/Pelapak yang bekerjasama dengan Pemda)														
237	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,062	0,062	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	42
238	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,041	0,041	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	28
239	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	1,37	1,37	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya	100%	914
240	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	1	1	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya		
241	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	0,9	0,9	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya		
242	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	2	2	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya		
243	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	1	1	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya		
244	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	1,5	1,5	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya		
245	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2024	0	2,5	2,5	0	0	Material Daur Ulang	Bangunan Baik	Optimal	Swasta	Belum Diproses	Lainnya		

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Tabel II. 21 Pemrosesan Akhir Sampah

No	Deskripsi	Satuan	TPA	TPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nama dan Lokasi TPA		Desa Kaliwlingi Kec. Brebes	Desa Kalijurang Kec. Tonjong
	Wilayah Pelayanan		Kecamatan Brebes, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Kersana, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Jatibarang	Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong
2	Tahun pembangunan		2002	2005
	Tahun Optimalisasi		2003	2005
	Usia Pakai TPA (tahun)		30	30
3	Status aset (pilih salah satu)		Sudah	Dalam Proses
4	Luas lahan efektif landfill tersedia	Ha	0	0
5	Luas lahan efektif landfill terpakai	Ha	0	0
6	Sistem TPA yang digunakan	pilih	Open Dumping	Open Dumping
	Periode penutupan sampah		Tidak ada	Tidak ada
	Apakah dilakukan pemadatan sampah	pilih	Dilakukan	Dilakukan
	Apakah dilakukan penimbangan dan pencatatan sampah masuk	pilih	Tidak Dilakukan	Tidak Dilakukan
7	Kondisi TPA	pilih	Beroperasi	Beroperasi
8	Alat berat: <i>bulldozer, excavator, backhoe</i>	Unit	Excavator : 1, Backhoeloader : 1, Bulldozer: 1	Excavator : 1, Bulldozer: 1
9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	1	0
10	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/beton atau	Tanah	Tanah

No	Deskripsi	Satuan	TPA	TPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		perkerasan atau tanah		
11	Kapasitas desain	Ton/hari	0	0
12	Kapasitas operasional			
	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA Kabupaten Brebes	Ton/hari	150	80
	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA dari seluruh wilayah layanan	Ton/hari	150	80
13	Jumlah sampah yang didaur ulang di TPA	Ton/hari	0	0
14	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	Tidak Ada	Tidak Ada
15	Listrik	Gwh/hari	0	0
16	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya secara rutin (3-6 bulan sekali)		Dilakukan	Tidak Dilakukan
17	Jarak terdekat dengan area permukiman	km	1,3	1
18	Tinggi timbunan sampah eksisting	meter	15	15
19	Hari operasi	hari/tahun	365	365
20	Jenis TPA	(Regional/ Kabupaten)	Kabupaten	Kabupaten

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

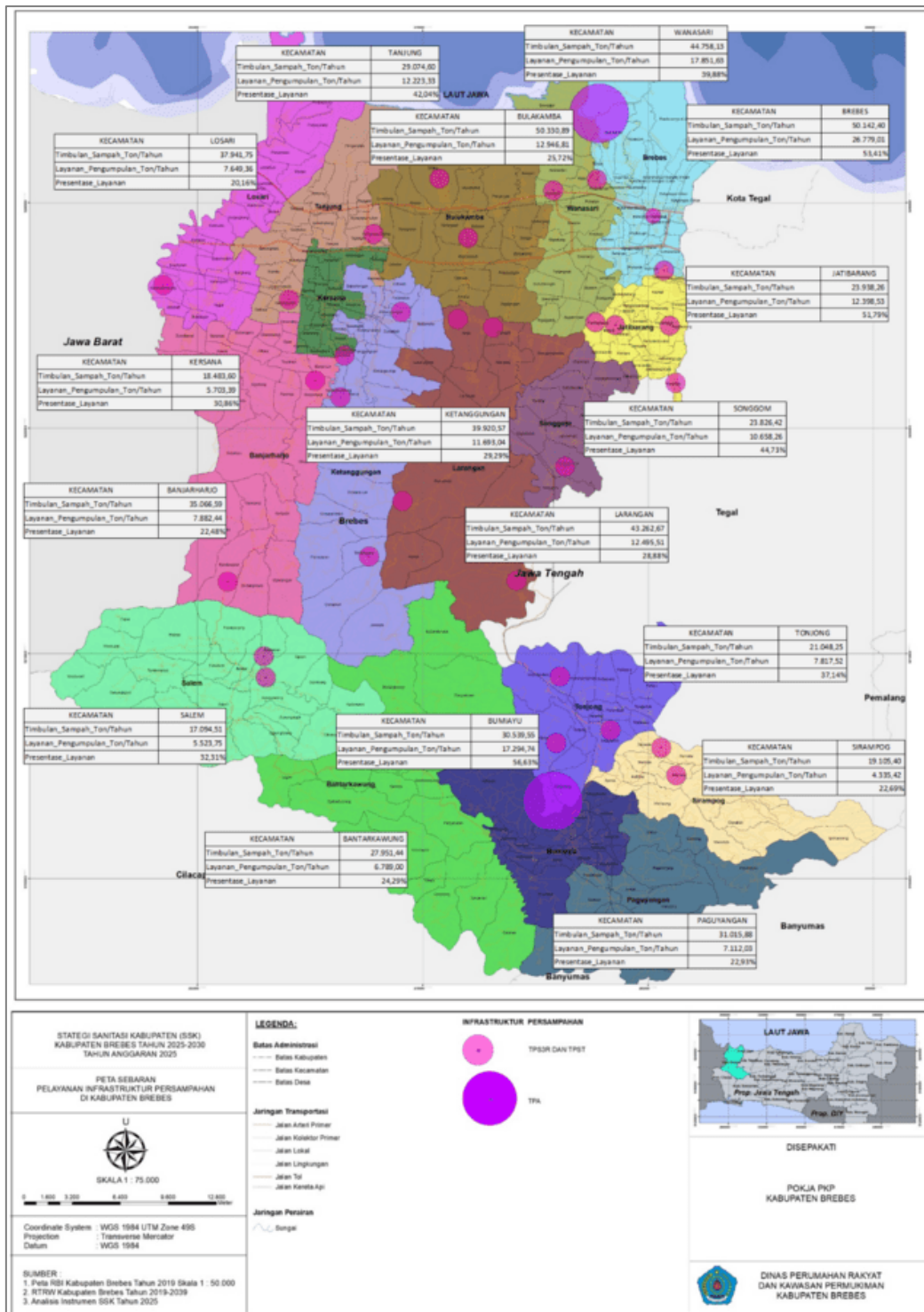
TPA Kaliwlingi (dibangun 2002 dan optimalisasi 2003) melayani sebagian besar wilayah Brebes (14 kecamatan), sementara TPA Kalijurang (dibangun 2005 dan optimalisasi 2005) melayani 5 kecamatan. Kedua TPA ini memiliki usia pakai yang diperkirakan 30 tahun dan sama-sama masih menggunakan sistem Open Dumping, tanpa adanya penutupan sampah berkala, meskipun pemadatan sampah dilaporkan dilakukan pada keduanya. Sayangnya, tidak ada penimbangan dan pencatatan sampah masuk yang dilakukan di kedua TPA. Dari sisi infrastruktur, TPA Kalijulungi memiliki ketersediaan jembatan timbang (1 unit), sementara Kalijurang tidak, dan keduanya memiliki kondisi akses masuk berupa tanah. TPA Kalijulungi didukung oleh alat berat berupa 1 Excavator, 1 Backhoe loader, dan 1 Bulldozer, sedangkan TPA Kalijurang didukung oleh 1 Excavator dan 1 Bulldozer, dengan kondisi alat berat di kedua TPA dilaporkan Beroperasi.

Aspek operasional kedua TPA menunjukkan bahwa TPA Kalijulungi menimbun sampah dari seluruh wilayah layanan sebanyak 150 Ton/hari, sementara TPA Kalijurang menimbun 80 Ton/hari. Kedua TPA merupakan jenis TPA Kabupaten dengan tinggi timbunan eksisting 15 meter dan beroperasi 365 hari/tahun, namun tidak ada desain dan kapasitas operasional yang terukur. Hal yang patut disoroti adalah nihilnya jumlah sampah yang didaur ulang di TPA, serta tidak adanya recovery gas metan dan produksi listrik (0 GWh/hari). Selain itu, meskipun pemeriksaan efluen lindi dilaporkan "Dilakukan" di TPA Kalijulungi dan "Tidak Dilakukan" di Kalijurang, jarak kedua TPA dari permukiman relatif dekat (1,3 km dan 1 km), sehingga minimnya pengolahan lindi dan gas metan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang serius bagi masyarakat sekitar.

 Open Dumping TPA Kaliwlingi	 Open Dumping TPA Kalijurang
 Sumur Pantau	
 Kolam Lindi	

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Gambar 2. 7 Foto TPA Kaliwlingi dan TPA Kalijurang



Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Peta 2. 6 Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Persampahan Kabupaten Brebes

Peta diatas memberi informasi mengenai sebaran penggunaan sistem pengelolaan sampah perkotaan beserta nilai persentase penduduk yang terkait. Terdapat 2 TPA yang berlokasi di.Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes dan Desa Kalijurang Kecamatan Bantarkawung.

Selain TPA, di Kabupaten Brebes juga terdapat layanan persampahan lain berupa TPS3R dan TPST yang tersebar di 32 Desa/Kelurahan dalam 12 Kecamatan, untuk lebih jelas, Lokasi pelayanan persampahan di Kabuapten Brebes dapat dilihat pada daftar berikut:

1	Salem	Banjaran	17	Banjarharjo	Bandungsari
2	Salem	Ciputih	18	Banjarharjo	Banjarharjo
3	Salem	Bentarsari	19	Losari	Karangsambung
4	Sirampog	Mlayang	20	Tanjung	Kubangputat
5	Tonjong	Buniwah	21	Tanjung	Kemurang Wetan
6	Tonjong	Galuh Timur	22	Bulakamba	Bulusari
7	Tonjong	Kutamendala	23	Bulakamba	Griting
8	Tonjong	Linggapura	24	Wanasari	Klampok
9	Larangan	Wlahar	25	Wanasari	Pesantunan
10	Larangan	Pamulihan	26	Songgom	Songgom Lor
11	Larangan	Slati	27	Jatibarang	Kebogadung
12	Ketanggungan	Sitanggal	28	Jatibarang	Karanglo
13	Ketanggungan	Sindangjaya	29	Jatibarang	Pamengger
14	Ketanggungan	Sindangjaya	30	Jatibarang	Bojong
15	Ketanggungan	Karangbandung	31	Jatibarang	Kalipucang
16	Ketanggungan	Ketanggungan	32	Brebes	Kelurahan Gandasuli

Prosentase layanan persampahan di Kabupaten Brebes per-Kecamatan dengan nilai tertinggi berada di Kecamatan Bumiayu sebesar 56,63%, yaitu dengan timbulan sampah 30.539,55 ton/tahun dengan layanan pengumpulan sampah 17.294,74 ton/tahun. Kecamatan dengan Tingkat pelayanan terendah yaitu Kecamatan Losari sebesar 20,16%, yaitu dengan timbulan sampah 37.941,75 ton/tahun dengan layanan pengumpulan sampah 7.649,36 ton/tahun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel II. 22 Prosentase Layanan Persampahan Kabupaten Brebes

No	Kecamatan	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Layanan Pengumpulan (Ton/Tahun)	Presentase Layanan
1	Salem	17.094,51	5.523,75	32,31%
2	Bantarkawung	27.951,44	6.789,00	24,29%
3	Bumiayu	30.539,55	17.294,74	56,63%
4	Paguyangan	31.015,88	7.112,03	22,93%
5	Sirampog	19.105,40	4.335,42	22,69%
6	Tonjong	21.048,25	7.817,52	37,14%
7	Larangan	43.262,67	12.495,51	28,88%
8	Ketanggungan	39.920,57	11.693,04	29,29%
9	Banjarharjo	35.066,59	7.882,44	22,48%
10	Losari	37.941,75	7.649,36	20,16%

No	Kecamatan	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Layanan Pengumpulan (Ton/Tahun)	Presentase Layanan
11	Tanjung	29.074,60	12.223,33	42,04%
12	Kersana	18.483,60	5.703,39	30,86%
13	Bulakamba	50.330,89	12.946,81	25,72%
14	Wanasari	44.758,13	17.851,63	39,88%
15	Songgom	23.826,42	10.658,26	44,73%
16	Jatibarang	23.938,26	12.398,53	51,79%
17	Brebes	50.142,40	26.779,01	53,41%

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Analisis Gap Pencapaian Akses Persampahan berdasarkan target RPJMN 2025-2029

Secara umum, data menunjukkan bahwa komponen pengelolaan sampah (Layanan Pengumpulan, Sampah Terkelola, dan Residu di LUR) di Kabupaten Brebes masih jauh dari target yang ditetapkan, baik target jangka pendek (Target Jangka Pendek Brebes) maupun target jangka panjang (Target 2029). Layanan Pengumpulan Sampah memiliki target tertinggi dan kesenjangan persentase terbesar terhadap target 2029 (50,6%). Sampah Terkelola menunjukkan capaian persentase terendah pada tahun 2024 (3,0%), mengindikasikan bahwa upaya pengolahan dan daur ulang (yang baru mencapai 1% dan 2%) harus ditingkatkan secara drastis.

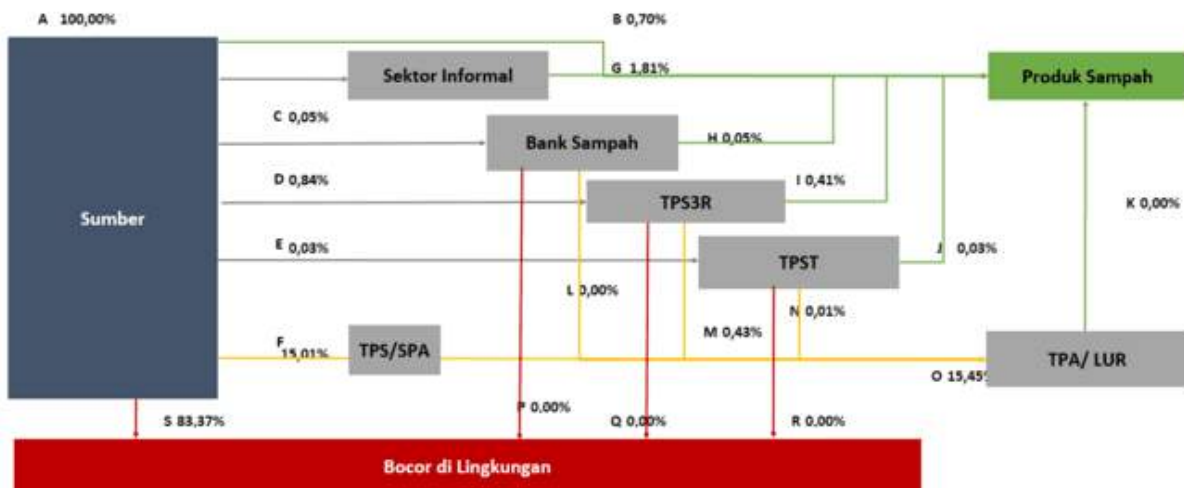
Tabel II. 23 Analisis Gap Pencapaian Akses Persampahan Berdasarkan Target RPJMN 2025-2029

No	Komponen	Target RPJMN Nasional 2025-2029 (%)	Target - 2030 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun: 2025	GAP (%) Terhadap Target 2030	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Jawa Tengah	Kab. Brebes	Kab. Brebes			
1	Layanan Pengumpulan Sampah	85%	78,0%	85,0%	68,4%	34,4%	50,6%	33,9%
2	Sampah Terolah	38%	61,0%	36,9%	28,9%	3,0%	33,9%	25,9%
	Sampah terolah					1,0%		
	Sampah terdaur ulang					2,0%		
3	Residu di LUR	47%	17,0%	48,1%	39,5%	15,4%	32,7%	24,0%

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Analisis Rantai Layanan Sanitasi

Bagian ini memuat informasi tentang infrastruktur pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Brebes. Kondisi yang digambarkan dalam rantai layanan Adalah kondisi pengelolaan sampah saat ini di suatu Kabupaten Brebes.



		ton/hari	Persentase (%)
A	Total Timbulan sampah	1489	100,00%
B	Sampah diolah di sumber	10,44	0,70%
C	Sampah dikumpul ke Bank Sampah	0,70	0,05%
D	Sampah dikumpul ke TPS3R	12,49	0,84%
E	Sampah dikumpul ke TPST	0,50	0,03%
F	Sampah dari sumber diangkut ke TPA/LUR	223,51	15,01%
G	Sampah didaur ulang oleh Sektor informal	26,91	1,81%
H	Sampah didaur ulang di bank sampah	0,70	0,05%
I	Sampah didaur ulang & diolah di TPS3R	6,13	0,41%
J	Sampah didaur ulang & diolah di TPST	0,38	0,03%
K	Sampah diolah di TPA	0,00	0,00%
L	Residu dari bank sampah	0,00	0,00%
M	Residu dari TPS3R	6,36	0,43%
N	Residu dari TPST	0,13	0,01%
O	Total residu yang masuk ke TPA/LUR	230,00	15,45%
P	Sampah bocor dari Bank Sampah	0,00	0,00%
Q	Sampah bocor dari TPS3R	0,00	0,00%
R	Sampah bocor dari TPST	0,00	0,00%
S	Sampah bocor di sumber	1241,40	83,37%

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Gambar 2. 8 Analisis Rantai Layanan Sanitasi

(2) *Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan*

A. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi utama, yang dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah untuk operasional lapangan. Selain itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak lain, termasuk swasta, akademisi (seperti Universitas Muhadi Setiabudi), dan masyarakat melalui gerakan seperti Saripah Bestie Pipih Opah, untuk menciptakan pengelolaan sampah yang terintegrasi dari tingkat rumah tangga hingga pemanfaatan teknologi.

Tabel II. 24 Kelembagaan Pemerintah Daerah

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	DLH bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, termasuk kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah	DLH memiliki UPTD yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan sampah. Berdasarkan indikasi dari Peraturan Bupati Brebes Nomor 4 Tahun 2025 (tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja UPTD pada Lingkungan Hidup)

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Tabel II. 25 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Sampah

Fungsi/Kegiatan Persampahan	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
Menyusun target pengelolaan Persampahan skala kabupaten	Bidang Persampahan / Dinas Lingkungan Hidup	-	-
Menyusun rencana program Persampahan dalam rangka pencapaian Target	Bidang Persampahan / Dinas Lingkungan Hidup	-	-
Menyusun rencana anggaran program Persampahan dalam rangka pencapaian target	Bidang Persampahan / Dinas Lingkungan Hidup	-	-
PENGADAAN SARANA			
Menyediakan sarana persampahan awal	Bidang Persampahan / Dinas Lingkungan Hidup	UPTD Persampahan	-
Membangun sarana TPST/TPS3R	Bidang Persampahan / Dinas Lingkungan Hidup	-	-
Menyediakan sarana pengangkutan dari rumah ke TPS	-	-	Masyarakat
Menyediakan sarana pengangkutan dari rumah ke TPS ke TPA	Bidang Persampahan / Dinas Lingkungan Hidup	UPTD Persampahan	-
Membangun sarana TPA	Bidang Persampahan / Dinas Lingkungan Hidup	-	-
PENGELOLAAN			
Menyediakan layanan pengumpulan sampah	Bidang Persampahan / Dinas Lingkungan Hidup	UPTD Persampahan	-
Mengelola TPA	Bidang Persampahan / Dinas Lingkungan Hidup	UPTD Persampahan	-
Melakukan penarikan retribusi sampah	-	-	Masyarakat
Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	Bidang Persampahan / Dinas Lingkungan Hidup	-	-
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan	Bidang Persampahan / Dinas Lingkungan Hidup	UPTD Persampahan	-
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
Mengatur prosedur penyediaan layanan Persampahan (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Bidang Persampahan / Dinas Lingkungan Hidup	UPTD Persampahan	-
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan Persampahan	Bidang Persampahan / Dinas Lingkungan Hidup	UPTD Persampahan	-
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan Persampahan	Bidang Persampahan / Dinas Lingkungan Hidup	UPTD Persampahan	-

Fungsi/Kegiatan Persampahan	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
MONITORING DAN EVALUASI	Bidang Persampahan / Dinas Lingkungan Hidup		
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan Persampahan skala Kabupaten	Bidang Persampahan / Dinas Lingkungan Hidup	UPTD Persampahan	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan Persampahan	Bidang Persampahan / Dinas Lingkungan Hidup	UPTD Persampahan	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan Persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan Persampahan	Bidang Persampahan / Dinas Lingkungan Hidup	UPTD Persampahan	-
b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu Persampahan	Bidang Persampahan / Dinas Lingkungan Hidup	UPTD Persampahan	-

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

B. Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan Masyarakat pada fasilitas pengelolaan sampah berbasis komunitas atau unit teknis di luar TPA berupa TPST dan TPS3R. TPST Gandasuli (dibentuk 2011 oleh UPTD Brebes) yang dikelola oleh Pemda dan mengelola sampah organik dan anorganik dengan cakupan wilayah Kecamatan Brebes, didanai oleh Retribusi. Fasilitas ini berstatus Aktif namun dicatat memiliki keterangan "Fasilitas kurang memadai". Fasilitas lainnya merupakan TPS 3R yang dibentuk dan dikelola oleh komunitas (BUMDes, KSM, dan KMP). TPS3R dibangun mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2025 dikelola oleh Lembaga Masyarakat berbentuk KSM, KMP, maupun BUMDesa. Beberapa TPS3R berstatus Tidak Aktif yang disebabkan oleh beberapa factor seperti alat rusak, masalah SDM/operasional, maupun factor lain. Beberapa TPS3R lainnya seperti di Banjarharjo (KSM Panata Bumi, 2019) yang berstatus Aktif, tetapi dicatat "belum optimal". Semua fasilitas berbasis komunitas ini berfokus pada Pengelolaan Sampah Organik dan didanai melalui Iuran Warga. Secara keseluruhan, meskipun terdapat inisiatif pengelolaan sampah di tingkat komunitas, mayoritas fasilitas yang ada (terutama TPS 3R) menghadapi kendala serius, baik itu kerusakan alat maupun masalah SDM/operasional, yang mengakibatkan ketidakaktifan atau kinerja yang belum optimal. Hal ini menunjukkan kontribusi fasilitas non-TPA dalam mengurangi timbulan sampah yang diangkut ke TPA masih sangat terbatas.

Tabel II. 26 Kelembagaan Masyarakat

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukannya	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TPST Gandasuli	UPTD Brebes, 2011	Pemda,	5	Pengolahan sampah organik dan anorganik	Kecamatan Brebes	Retribusi	Bangunan dan alat pengolahan – Dinas PUPR	Aktif/ Fasilitas kurang memadai

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	TPS 3R Grinting	Bumdes Grinting, 2013	Bumdes		Pengolahan sampah organik	Desa Grinting	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Tidak Aktif/SDM, alat rusak
3	TPS 3R Banjarharjo	KSM Panata Bumi, 2019	KSM	12	Pengolahan sampah organi	Desa Banjarharjo	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBD Prov.	Aktif/belum optimal
4	TPS 3R Sitanggal	KMP Sitanggal Berkah Cemerlang, 2023	KMP		Pengolahan sampah organik	Desa Sitanggal	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Tidak Aktif/SDM, operasional
5	TPS 3R Karangsambung	KMP Karang Kencana, 2023	KMP		Pengolahan sampah organik	Desa Karangsambung	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Tidak Aktif/SDM, operasional
6	TPS 3R Sindangjaya	KMP Maju Bersama, 2023	KMP		Pengolahan sampah organik	Desa Sindangjaya	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Tidak Aktif/SDM, operasional
7	TPS 3R Kemurang Wetan	KMP Resik Trengginas, 2023	KMP		Pengolahan sampah organik	Desa Kemurang Wetan	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Tidak Aktif/SDM, operasional

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	TPS 3R Pesantunan	KMP Santun Asri, 2023	KMP	3	Pengolahan sampah organik	Desa Pesantunan	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Aktif/oftaker
9	TPS 3R Linggapura	KMP Jaya Makmur, 2023	KMP		Pengolahan sampah organik	Desa Linggapura	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Tidak Aktif//SDM, operasional
10	TPS 3R Bulusari	KSM Maju Bersama, 2023	KSM		Pengolahan sampah organik	Desa Bulusari	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Tidak Aktif/SDM, operasional
11	TPS 3R Mlayang	KMP Mlayang Sehat, 2023	KMP	7	Pengolahan sampah organik	Desa Mlayang	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Aktif/belum optimal
12	TPS 3R Ketanggungan	KMP Sehat Sejahtera, 2023	KMP	5	Pengolahan sampah organik	Desa Ketanggungan	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Aktif/belum optimal
13	TPS 3R Buniwah	KMP Maju Mandiri, 2023	KMP		Pengolahan sampah organik	Desa Buniwah	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Tidak Aktif/SDM, operasional

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	TPS 3R Wlahar	KMP Rukun Sejahtera, 2023	KMP		Pengolahan sampah organik	Desa Wlahar	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Tidak Aktif/SDM, operasional
15	TPS 3R Bojong	KSM, 2024	KSM		Pengolahan sampah organik	Desa Bojong	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Tidak Aktif/SDM, operasional, kurang alat
16	TPS 3R Kalipucang	KSM, 2024	KSM		Pengolahan sampah organik	Desa Kalipucang	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Tidak Aktif/SDM, operasional, kurang alat
17	TPS 3R Karanglo	KSM, 2024	KSM		Pengolahan sampah organik	Desa Karanglo	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Tidak Aktif/SDM, operasional, kurang alat
18	TPS 3R Kebogadung	KSM, 2024	KSM		Pengolahan sampah organik	Desa Kebogadung	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Tidak Aktif/SDM, operasional, kurang alat
19	TPS 3R Pamengger	KSM, 2024	KSM		Pengolahan sampah organik	Desa Pamengger	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Tidak Aktif/SDM, operasional, kurang alat

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	TPS 3R Karangbandung	KSM, 2024	KSM	10	Pengolahan sampah organik	Desa Karangbandung	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Aktif/alat macet, kurang alat
21	TPS 3R Banjaran	KSM, 2024	KSM		Pengolahan sampah organik	Desa Banjaran	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Tidak Aktif/ SDM, operasional, kurang alat
22	TPS 3R Bentarsari	KSM, 2024	KSM		Pengolahan sampah organik	Desa Bentarsari	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Tidak Aktif/ SDM, operasional, kurang alat
23	TPS 3R Ciputih	KSM, 2024	KSM		Pengolahan sampah organik	Desa Ciputih	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Tidak Aktif/ SDM, operasional, kurang alat
24	TPS 3R Songgom Lor	KSM, 2024	KSM		Pengolahan sampah organik	Desa Songgom Lor	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Tidak Aktif/ SDM, operasional, kurang alat
25	TPS 3R Kubangputat	KSM, 2024	KSM	4	Pengolahan sampah organik	Desa Kubangputat	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Aktif/belum optimal

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	TPS 3R Galuh Timur	KSM, 2024	KSM		Pengolahan sampah organik	Desa Galuh Timur	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Tidak Aktif SDM, operasional, kurang alat
27	TPS 3R Kutamendala	KSM, 2024	KSM	10	Pengolahan sampah organik	Desa Kutamendala	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Aktif/belum optimal
28	TPS 3R Klampok	KSM, 2024	KSM	3	Pengolahan sampah organik	Desa Klampok	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Aktif/mesin macet
29	TPS 3R Bandungsari	KSM Citra Sentosa, 2024	KSM	3	Pengolahan sampah organik	Desa Bandungsari	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Aktif/kurang alat angkut besar
30	TPS 3R Pamulihan	KSM, 2024	KSM		Pengolahan sampah organik	Desa Pamulihan	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBN	Tidak Aktif SDM, operasional, kurang alat
31	TPS 3R Slatr	KSM, 2024	KSM		Pengolahan sampah organik	Desa Slatr	Iuran warga	Bangunan dan alat pengolahan, APBD	Tidak Aktif SDM, operasional, kurang alat

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

C. Pemetaan Pemangku Kepentingan Di Luar Pemerintah Daerah

Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah mengidentifikasi empat kelompok pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan sampah, beserta peran dan kekuatan mereka. Anggota Legislatif memiliki kepentingan utama dalam Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan; kekuatannya terletak pada Tim anggaran terkait Alokasi APBD dan dana aspirasi yang dapat diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan. Pengusaha/Swasta—yang diwakili oleh sejumlah perusahaan seperti PT. Tah Sung Hung, PT. Bintang Indokarya Gemilang, dan lainnya—memiliki kepentingan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan mendapatkan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup); kekuatannya adalah Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah dalam rangka menuntaskan permasalahan persampahan.

Selanjutnya, 292 BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) memegang kepentingan dalam mengelola sampah desa untuk menjadi sumber pendapatan, serta meningkatkan kebersihan dan kesehatan masyarakat; kekuatan mereka didukung oleh Keterlibatan langsung dengan masyarakat dan Potensi pendanaan Dana Desa untuk pengelolaan sampah. Terakhir, Organisasi Massa (Ormas) seperti Baznas memiliki kepentingan dalam pendayagunaan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) untuk program pengelolaan sampah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai Fatwa MUI, dengan kekuatan berupa pemanfaatan dana ZISWAF tersebut untuk program Pengelolaan Sampah.

Tabel II. 27 Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	- Legislasi - Penganggaran - Pengawasan	- Tim anggaran terkait Alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan Persampahan
Pengusaha / Swasta: - PT. Tah Sung Hung - PT. Shyang Tah Jyun - PT. Bintang Indokarya Gemilang - PT. Jia wei Indonesia	- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) - Mendapatkan PROPER	- Penyediaan fasilitas pengolahan Sampah dalam rangka penuntasan Permasalahan Persampahan.

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
- PT. Daehan Global - PT. Gold Emperor Indonesia - PT. Global Busana International - PT. Yeon Heung Mega Sari - PT. Kido Mulia Indonesia - PT. Jin Peng Indonesia - PT. Sumber Masanda Jaya - PT. Evertech International Group - PT. Edvan Mediasource Indonesia - PT. Yixin Maju Indonesia - PT. Shengnuo Sport Product - PT. Agung Pelita Industrindo		
292 BUMDes	- Mengelola sampah desa sebagai sumber pendapatan - Meningkatkan kebersihan dan kesehatan masyarakat	- Keterlibatan langsung dengan masyarakat - Potensi pendanaan Dana Desa untuk pengelolaan sampah Desa
Organisasi Massa (Ormas): - Baznas	- Pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan Fasilitas Persampahan untuk masyarakat terutama masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI	- Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program Pengelolaan Sampah.
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll): - Forum Komunikasi Da'i Sanitasi	- Mendukung program BAZNAS dalam pendayagunaan dana ZISWAF	- Advokasi dan komunikasi sanitasi menurut tinjauan quran dan hadist
Tokoh Masyarakat		

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Tabel II. 28 Analisa Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	- Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD - Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Analisis pemangku kepentingan ini secara spesifik menargetkan Anggota Legislatif, yang kontribusinya sangat penting, mencakup Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD dan Pemanfaatan dana aspirasi untuk diarahkan pada isu persampahan. Legitimasi mereka didukung oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR. Meskipun Ketersediaan Terlibat dari Anggota Legislatif berada di tingkat Sedang, Pengaruh mereka dinilai Tinggi karena peran kunci mereka dalam penganggaran dan regulasi. Oleh karena tingginya pengaruh dan kontribusi potensial mereka, Perlunya Keterlibatan Anggota Legislatif dalam isu pengelolaan sampah ditetapkan sebagai Ya.

D. Regulasi

Regulasi terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes sudah cukup lengkap mulai dari PERda hingga Perbup. Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2015: Tentang Pengelolaan Sampah menjadi landasan hukum utama terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 29 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Persampahan

No			
1	Perda Pengelolaan Sampah	Ada √	Tidak Ada
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, sebutkan.		
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2015: Tentang Pengelolaan Sampah	
4	Apakah Substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list daftar berikut :	Ada	Tidak Ada
a	Substansi pengaturan : tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.	√	
b	Substansi pengaturan : tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah	√	
c	Substansi pengaturan : Pengurangan sampah (<i>pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah</i>)	√	
d	Substansi pengaturan : Penanganan sampah (<i>pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah</i>)	√	
e	Substansi pengaturan : pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah	√	
f	Substansi pengaturan : Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negatif kegiatan TPA	√	
g	Substansi pengaturan : Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	√	

h	Substansi pengaturan : larangan, sanksi pidana kurungan/denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis pengelolaan sampah	√	
i	Substansi pengaturan : Pengawasan pengelolaan sampah	√	
j	Substansi pengaturan : Penerapan sanksi administratif	√	
5	Apakah turunan operasional Perda Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Sudah ada √	Belum ada
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada dan yang belum ada.	1. Perbup Desa Mandiri Sampah 2. Perbup Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah 3. Perbup Pedoman Pengurangan Sampah Plastik Berbasis Masyarakat	1. 2. 3. 4.

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

(3) Komunikasi dan Media

Selain aspek kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Brebes menyadari bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, DLH secara intensif melaksanakan Kegiatan Komunikasi dan Promosi Persampahan yang terintegrasi. Program unggulan seperti BESTIE PIPIH OPAH (Brebes Bebas Sampah Plastik Pilih Pilih Olah Sampah dari Rumah) menjadi sarana komunikasi utama untuk mengedukasi masyarakat agar melakukan pemilahan sampah dari sumbernya dan mengubah paradigma sampah dari masalah menjadi sumber daya bernilai ekonomi. Upaya promosi ini dilakukan secara berkala melalui peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), sosialisasi di sekolah, hingga pemberdayaan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk mencapai sasaran di tingkat desa dan kelurahan.

Tabel II. 30 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Persampahan

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Peringatan HPSN dan Peluncuran BESTIE PIPIH OPAH (Gerakan Desa Mandiri Sampah)	2023 (26 Mei)	DLH Kabupaten Brebes, Pemerintah Kabupaten	Mengubah perilaku masyarakat dari membuang/membakar sampah menjadi mengolah dari sumbernya dan mengurangi timbunan.	Masyarakat Umum, Pemerintah Desa/Kelurahan (termasuk Desa Bulakelor dan wilayah Ketanggungan)	* Pilah Pilih Olah Sampah dari Rumah (PIPIH OPAH). * Kurangi sampah, terutama plastik (ganti botol plastik dengan tumbler). * Dampak sampah plastik yang dibakar terhadap pemanasan global.	Keberhasilan program sangat bergantung pada pelaksanaan bersama dan perubahan tingkah laku masyarakat dimulai dari rumah tangga.
2	Puncak Peringatan HPSN & Deklarasi Gerakan Tumbler di Sekolah dan Instansi	2024 (1 Maret)	DLH Kabupaten Brebes, Pemerintah Kabupaten, Anggota DPRD	Mengatasi sampah plastik dengan cara produktif dan mendorong implementasi praktik pengurangan sampah plastik sekali pakai.	Siswa Sekolah, Instansi Pemerintahan, Pihak Terkait di Desa Slati, Kec. Larangan	"Atasi Sampah Plastik Dengan Cara Produktif."	Deklarasi dan kegiatan seremonial yang melibatkan pimpinan daerah penting untuk memberi endorsement dan dorongan formal.
3	Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Sekolah	2024 (4 Oktober) & Rencana Berkelanjutan	DLH Kabupaten Brebes	Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar.	Siswa Sekolah (contoh: SMA Santo Thomas 1)	Sampah di sekolah harus dikelola dengan benar.	Edukasi dini dan spesifik di lingkungan sekolah sangat efektif untuk pembentukan perilaku jangka panjang.
4	Rakor & Sosialisasi Program "BESTie" (Balai Edukasi	2025 (Oktober)	DLH Kabupaten Brebes	Memperkenalkan pendekatan baru pengelolaan	Pemerintah Kecamatan, Aparatur Desa/Kelurahan, Tenaga	Sampah sebagai Sumber Daya Bernilai Ekonomi.	Kolaborasi tingkat kecamatan dan pemberdayaan TFL sangat

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
	Sampah Terintegrasi)			sampah yang berkelanjutan dan memiliki nilai ekonomi.	Fasilitator Lapangan (TFL)		krusial untuk memastikan edukasi dan implementasi program mencapai tingkat tapak secara merata.

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Media Komunikasi utama berpusat pada program inovasi daerah, khususnya melalui slogan SARIPAH dan BESTIE PIPIH OPAH ("Pilah Pilih Olah Sampah dari Rumah"). Slogan ini dikomunikasikan secara intensif melalui Media Tatap Muka (sosialisasi, Rapat Koordinasi, dan penyuluhan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan/TFL) untuk mencapai perubahan perilaku rumah tangga. Untuk menjangkau masyarakat umum, DLH juga menggunakan Media Peringatan Fisik (banner/poster) di lokasi rawan sampah dan Media Digital (website dan media sosial) untuk transparansi informasi.

Di sisi Kerjasama, Pemerintah Kabupaten Brebes aktif menjalin Kerjasama Multihelix dengan pihak swasta dan investor (seperti PT. Mountrash atau PT. Cipta Serra). Kerjasama ini vital untuk mengatasi keterbatasan kapasitas TPA, dengan fokus pada pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi (pupuk, biji plastik, bahan bangunan). Melalui sinergi antara komunikasi edukatif berbasis slogan dengan investasi teknologi melalui kerjasama, Brebes berupaya mencapai target Desa Mandiri Sampah yang berkelanjutan.

Tabel II. 31 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Persampahan

No	Jenis Media a)	Khalayak b)	Pendanaan c)	Isu yang Diangkat d)	Pesan Kunci e)	Efektivitas f)
1.	Program/Slogan Inovasi (misalnya: SARIPAH - BESTIE PIPIH OPAH)	Masyarakat Umum, Rumah Tangga, Pemerintah Desa/BUMDes	APBD Desa, APBD Kabupaten, Swadaya Masyarakat	Rendahnya kesadaran pilah sampah, volume sampah rumah tangga yang tinggi.	"Pilah Pilih Olah Sampah dari Rumah" (PIPIH OPAH) untuk mencapai Desa Mandiri Sampah (SARIPAH).	Menciptakan perubahan perilaku mendasar (dari buang menjadi olah) dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa.

No	Jenis Media a)	Khalayak b)	Pendanaan c)	Isu yang Diangkat d)	Pesan Kunci e)	Efektivitas f)
2.	Media Tatap Muka (Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Penyuluhan TFL)	Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, BPD, PKK, RT/RW, Sekolah, TFL	APBD Kabupaten (DLH), Dana Desa	Kewajiban pengelolaan sampah, sanksi pelanggaran, dan implementasi program berbasis masyarakat.	Sampah adalah tanggung jawab individu, bukan hanya pemerintah. Wujudkan Desa Mandiri Sampah.	Meningkatkan literasi sampah dan memastikan program (seperti BESTIE) diadopsi dan diimplementasikan secara teknis di desa.
3.	Kerjasama Multihelix & Swasta (MoU dengan PT. Mountrash, PT. Cipta Serra, dll.)	Investor/Swasta, Sektor Industri, DLH, Pemerintah Kabupaten	Investasi Swasta, APBD (Pengadaan/Retribusi)	Keterbatasan APBD untuk penanganan di TPA (misalnya TPA Kaliwlingi yang overload), kebutuhan teknologi pengolahan.	Sampah Brebes dapat diolah menjadi produk bernilai (pupuk organik, biji plastik, bata hebel) melalui teknologi modern.	Mengurangi volume sampah di TPA secara signifikan dan mendapatkan solusi pengolahan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
4.	Media Peringatan Fisik (Banner, Papan Peringatan, Poster)	Pengguna Jalan Umum, Masyarakat di Lokasi Rawan Sampah	APBD Kabupaten (DLH)	Larangan membuang sampah sembarangan di bantaran sungai, jalan, dan saluran air.	"Dilarang Membuang Sampah Sembarangan. Ada Sanksi & Denda."	

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

2.2.3. Drainase Lingkungan

Data tabel menunjukkan sebaran luas dan karakteristik genangan (banjir/rob) yang terjadi di 84 titik lokasi (kemungkinan desa/kelurahan) di Kabupaten Brebes, yang diidentifikasi memiliki kerentanan yang signifikan.

(1) Pola Umum Penyebab Genangan

Secara umum, penyebab genangan di Kabupaten Brebes dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, menunjukkan kerentanan wilayah pesisir dan wilayah yang dilalui sungai: Genangan Pesisir (Rob dan Luapan Sungai): Terjadi di lokasi-lokasi yang lebih dekat ke pantai atau muara. Genangan jenis ini memiliki luas dan ketinggian yang cenderung lebih besar dan lama. Contoh lokasi dengan penyebab ini adalah Kaliwlingi (No. 3), Bojongsari (No. 51), dan Randusanga Kulon (No. 16).

- Genangan Sungai (Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal): Jenis genangan ini paling dominan dan menyebar di banyak lokasi, menunjukkan masalah kapasitas sungai dan sistem drainase. Contoh lokasinya tersebar luas, seperti Sawojajar (No. 80), Jagalempeni (No. 75), dan Cimohong (No. 22).
- Genangan Lokal (Drainase Kurang Optimal/Curah Hujan Tinggi): Umumnya terjadi di wilayah yang masalahnya lebih bersifat lokal, di mana curah hujan yang tinggi tidak dapat diakomodir oleh saluran drainase. Contohnya adalah Limbangan Kulon (No. 7), Tanjung (No. 70), dan daerah hulu seperti Bumiayu (No. 24).

(2) Karakteristik Genangan

Meskipun frekuensi genangan di hampir seluruh lokasi adalah 1 kali per tahun, indikasi bahwa data ini menggambarkan kondisi terparah atau paling sering terjadi, namun karakteristik lainnya bervariasi:

- Genangan terluas tercatat di Sawojajar dengan mencapai 555,55 Ha, diikuti oleh Kaliwlingi (301,24 Ha) dan Pengaradan (289,18 Ha). Luas yang sangat besar ini mengindikasikan dampak signifikan terhadap lahan produktif atau pemukiman. Sebaliknya, Kalialang (No. 31) memiliki genangan yang paling kecil, hanya 4,63 Ha.
- Ketinggian genangan tertinggi umumnya mencapai 0,7-0,8 meter (m), ditemukan di lokasi yang terdampak rob dan luapan sungai seperti Kaliwlingi, Kedunguter, Blubuk, hingga di wilayah Jagalempeni dan Sawojajar. Ketinggian terendah adalah 0,3 m, banyak terjadi di lokasi yang masalahnya didominasi oleh drainase kurang optimal, seperti di wilayah Cimohong dan Dukuhlo.

- Genangan yang disebabkan oleh Rob dan Luapan Sungai memiliki durasi yang paling lama, yaitu 5 jam/hari, terjadi di wilayah pesisir (Kaligangsa Wetan hingga Losari Lor).
- Genangan yang didominasi oleh drainase lokal cenderung memiliki durasi yang lebih singkat, yaitu 2-4 jam/hari.

Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa masalah genangan di Kabupaten Brebes bersifat multidimensi, mencakup ancaman dari laut (Rob), ancaman dari darat (Luapan Sungai), dan masalah infrastruktur internal (Drainase Kurang Optimal), yang memerlukan solusi penanganan terpadu untuk kawasan pesisir (penanggulangan rob) dan kawasan dalam (normalisasi sungai dan perbaikan drainase).

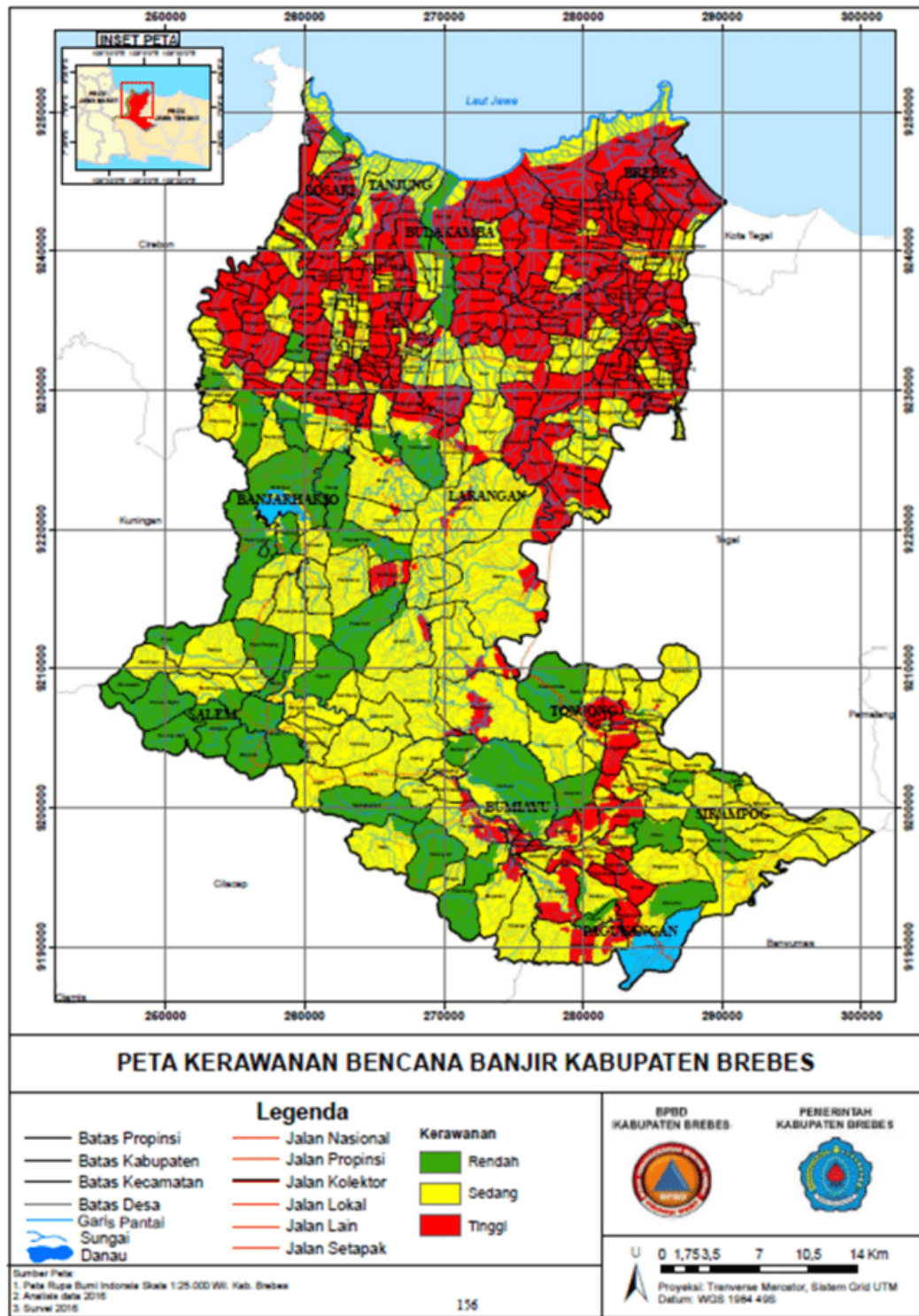
Tabel II. 32 Tabel Lokasi Genangan

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				Penyebab
		Luas (Ha)	Ketinggian (m)	Lama (jam/hari)	Frekuensi (kali/tahun)	
1	Kaligangsa Wetan	162,95	0,5	5	1	Rob dan Luapan Sungai
2	Kalimati	36,08	0,5	5	1	Rob dan Luapan Sungai
3	Kaliwlingi	301,24	0,7	5	1	Rob dan Luapan Sungai
4	Kedunguter	111,15	0,7	5	1	Rob dan Luapan Sungai
5	Brebes	114,15	0,4	2	1	Drainase Kurang Optimal dan Luapan Sungai
6	Gandasuli	30,2	0,4	2	1	Drainase Kurang Optimal dan Luapan Sungai
7	Limbangan Kulon	124,97	0,4	2	1	Drainase Kurang Optimal
8	Limbangan Wetan	129,29	0,4	2	1	Drainase Kurang Optimal
9	Pasar batang	137,23	0,6	2	1	Drainase Kurang Optimal
10	Krasak	62,46	0,7	4	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
11	Lembarawa	44,01	0,7	4	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
12	Padasugih	54,74	0,5	4	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
13	Pagejungan	105,94	0,5	4	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
14	Pemaron	90,78	0,7	4	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
15	Pulosari	105,19	0,6	4	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
16	Randusanga Kulon	220,64	0,5	3	1	Rob dan Luapan Sungai
17	Randusanga Wetan	82,23	0,5	3	1	Rob dan Luapan Sungai
18	Sigambir	24,19	0,5	3	1	Rob dan Luapan Sungai

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				Penyebab
		Luas	Ketinggian	Lama	Frekuensi	
		(Ha)	(m)	(jam/hari)	(kali/tahun)	
19	Tengki	58,08	0,5	3	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
20	Terlangu	72,94	0,5	3	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
21	Wangandalem	51,67	0,5	3	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
22	Cimohong	210,66	0,3	3	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
23	Dukuhlo	46,87	0,3	3	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
24	Bumiayu	187,25	0,5	3	1	Curah Hujan Tinggi dan Drainase Kurang Optimal
25	Dukuhturi	113,23	0,5	3	1	Curah Hujan Tinggi dan Drainase Kurang Optimal
26	Jatisawit	79,01	0,5	3	1	Curah Hujan Tinggi dan Drainase Kurang Optimal
27	Kalierang	100,89	0,5	3	1	Curah Hujan Tinggi dan Drainase Kurang Optimal
28	Bojong	26,39	0,5	3	1	Curah Hujan Tinggi dan Drainase Kurang Optimal
29	Jatibarang Kidul	55,94	0,5	3	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
30	Jatibarang Lor	68,51	0,5	3	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
31	Kalialang	4,63	0,5	3	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
32	Kalipucang	31,39	0,5	3	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
33	Kebogadung	46,01	0,5	3	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
34	Kebonagung	20,32	0,5	3	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
35	Kedungtukang	30,06	0,5	3	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
36	Cigedog	91,02	0,3	3	1	Drainase Kurang Optimal
37	Kemukten	70,61	0,3	3	1	Drainase Kurang Optimal
38	Kersana	119,72	0,3	3	1	Drainase Kurang Optimal
39	Kramatsampang	35,27	0,3	3	1	Drainase Kurang Optimal
40	Limbangan	121,42	0,3	3	1	Drainase Kurang Optimal
41	Sutamaja	20,32	0,3	3	1	Drainase Kurang Optimal
42	Ciduwet	81,97	0,3	3	1	Drainase Kurang Optimal
43	Cikeusal Kidul	135,93	0,5	3	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				Penyebab
		Luas	Ketinggian	Lama	Frekuensi	
		(Ha)	(m)	(jam/hari)	(kali/tahun)	
44	Cikeusal Lor	181	0,5	3	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
45	Dukuhturi	113,23	0,5	3	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
46	Karangmalang	57,78	0,5	3	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
47	Ketanggungan	98,42	0,5	3	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
48	Padakaton	88,02	0,5	3	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
49	Babakan	38,42	0,5	3	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
50	Blubuk	16,3	0,7	5	1	Rob dan Luapan Sungai
51	Bojongsari	111,19	0,7	5	1	Rob dan Luapan Sungai
52	Dukuhsalam	51,39	0,7	5	1	Rob dan Luapan Sungai
53	Kalibuntu	60,61	0,7	5	1	Rob dan Luapan Sungai
54	Karangsambung	52,93	0,7	5	1	Rob dan Luapan Sungai
55	Kecipir	85,2	0,7	5	1	Rob dan Luapan Sungai
56	Kedungneng	52,96	0,7	5	1	Rob dan Luapan Sungai
57	Losari Kidul	84,36	0,7	5	1	Rob dan Luapan Sungai
58	Losari Lor	111,68	0,7	5	1	Rob dan Luapan Sungai
59	Pekauman	54,87	0,7	5	1	Rob dan Luapan Sungai
60	Pengabean	63	0,7	5	1	Rob dan Luapan Sungai
61	Randusari	69,59	0,7	5	1	Rob dan Luapan Sungai
62	Kedawung	11,17	0,4	3	1	Drainase Kurang Optimal
63	Kemurang Kulon	8,8	0,4	3	1	Drainase Kurang Optimal
64	Kemurang Wetan	19,6	0,4	3	1	Drainase Kurang Optimal
65	Krakahan	148,39	0,4	3	1	Drainase Kurang Optimal
66	Luwungbata	0	0,4	3	1	Drainase Kurang Optimal
67	Pengaradan	289,18	0,4	3	1	Drainase Kurang Optimal
68	Sengon	130,3	0,4	3	1	Drainase Kurang Optimal
69	Sidakaton	32,83	0,4	3	1	Drainase Kurang Optimal
70	Tanjung	155,46	0,4	3	1	Drainase Kurang Optimal
71	Tegongan	80,88	0,4	3	1	Drainase Kurang Optimal
72	Tengguli	168,25	0,4	3	1	Drainase Kurang Optimal
73	Dumeling	56,76	0,4	3	1	Drainase Kurang Optimal
74	Glonggong	24,2	0,4	3	1	Drainase Kurang Optimal
75	Jagalempeni	80,15	0,8	4	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
76	Kertabesuki	177,05	0,8	4	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
77	Lengkong	29,54	0,8	4	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				Penyebab
		Luas	Ketinggian	Lama	Frekuensi	
		(Ha)	(m)	(jam/hari)	(kali/tahun)	
78	Pebatan	124,08	0,8	4	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
79	Pesantunan	95,06	0,8	4	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
80	Sawojajar	555,55	0,8	4	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
81	Siasem	196,69	0,7	4	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
82	Sidamulya	140,9	0,5	4	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
83	Sisalam	31,94	0,5	4	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal
84	Wanasari	77,92	0,5	4	1	Luapan Sungai dan Drainase Kurang Optimal



Sumber: BPBD Kabupaten Brebes, 2025

Peta 2. 7 Peta Kerawanan Bencana Banjir Kabupaten Brebes

Peta ini mengilustrasikan tingkat kerawanan wilayah-wilayah di Kabupaten Brebes terhadap bencana banjir, yang ditunjukkan dengan empat kategori warna: Merah (tinggi), Kuning (sedang), dan Hijau (rendah).

1. Tingkat Kerawanan Tinggi (Merah)

Wilayah-wilayah yang ditandai dengan warna Merah (Tinggi) merupakan fokus utama kerawanan genangan air di Brebes. Pesisir Utara dan Tengah (Merah): Sebagian besar wilayah utara, terutama yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan dialiri banyak sungai besar, memiliki kerawanan tinggi. Area ini mencakup Kecamatan Brebes (termasuk Kota Brebes), Wanasari, Jatibarang, Tanjung, Kersana, dan sebagian besar Losari dan Bulakamba. Kerawanan di area ini didominasi oleh ancaman rob (banjir pasang air laut) dan luapan sungai akibat topografi yang relatif datar dan rendah.

Wilayah Selatan (Pegunungan dan Perbukitan): Kerawanan tinggi juga muncul di beberapa bagian wilayah selatan, terutama di kawasan padat penduduk seperti pusat Kecamatan Bumiayu dan Paguyangan, serta Tonjong dan Sirampog. Meskipun jauh dari laut, kerawanan di sini kemungkinan besar disebabkan oleh curah hujan tinggi, luapan sungai, dan drainase yang kurang optimal di daerah perkotaan kecil.

2. Tingkat Kerawanan Sedang dan Rendah (Kuning dan Hijau)

Wilayah Tengah dan Transisi (Kuning): Zona kerawanan Sedang (Kuning) menjadi wilayah transisi antara dataran rendah utara dan pegunungan selatan. Ini mencakup sebagian besar Kecamatan Larangan, Ketanggungan, Banjarsari, dan beberapa bagian Jatibarang. Wilayah ini memiliki risiko, tetapi mungkin lebih bersifat genangan lokal atau luapan musiman.

Wilayah Selatan/Hulu Sungai (Hijau): Wilayah kerawanan Rendah (Hijau) mendominasi bagian paling selatan (hulu), seperti Kecamatan Salem dan sebagian besar Bantarkawung dan Sirampog. Meskipun rawan longsor (yang tidak digambarkan di peta ini), risiko banjir genangan di sini relatif rendah karena ketinggian topografi yang lebih tinggi, memungkinkan air mengalir cepat ke utara.

3. Kesimpulan Pola Kerawanan

Peta ini secara jelas menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes menghadapi tantangan banjir dari dua kutub geografis utama: Banjir Dataran Rendah/Pesisir: Masalah kronis akibat rob dan luapan sungai di wilayah utara. Banjir Lokal/Hulu: Masalah genangan di pusat-pusat keramaian selatan akibat curah hujan tinggi dan masalah drainase lokal. Peta ini berfungsi sebagai alat vital bagi BPBD Kabupaten Brebes (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk menentukan prioritas mitigasi, pembangunan infrastruktur (normalisasi sungai, peninggian tanggul), dan penempatan sumber daya penanggulangan bencana.

(3) Sistem dan Infrastruktur

Sistem dan Infrastruktur Drainase di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada database drainase yang berisi informasi terkait jenis dan jumlah infrastruktur drainase yang telah dibangun. Subsistem drainase drainase primer di Kabupaten Brebes terdiri dari 10 subsistem yaitu, Cisanggarung 1, Cisanggarung 2, Babakan, Pakijangan 1, Pakijangan 2, Pemali, Kabuyutan, Wadas 1, Wadas 2, dan Kamal.

Tabel II. 33 Tabel Database Drainase Kabupaten Brebes

No	Jenis Prasarana/ Sarana	Volume	Satuan	Bentuk Penampang Saluran*	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (Kali/ Tahun)
					Lebar Muka Drainase (B)	Tinggi (H)	Berfungsi	Tdk Berfungsi	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
A	SUB SISTEM DRAINASE CISANGGARUN G-1								
A.1	SALURAN								
1	Sal. Primer Kali Cisanggarung	33.764,65	M	Trapesium	40	5	Ya	-	2
2	Sal. Sekunder Kali Sinung	10.929,48	M	Trapesium	8	3	Ya	-	1
3	Sal. Sekunder Kali Tengguli	13.048,39	M	Persegi Empat	10	3	Ya	-	1
4	Sal. Sekunder Guling Tumpeng	9.644,67	M	Trapesium	4	1,5	Ya	-	1
A.2	BANGUNAN PELENGKAP								
1	Rumah Pompa	1,00	Unit	-	-	-	Ya	-	1
2	Pintu Air	1,00	Unit	-	-	-	Ya	-	1
3	Kolam retensi	-	Unit	-	-	-	-	-	1
4	Trash rack/ saringan sampah	1,00	Unit	-	-	-	Ya	-	1
B	SUB SISTEM DRAINASE CISANGGARUN G-2								
B.1	SALURAN								
1	Sal. Primer Kali Bancang	9.053,23	M	Trapesium	40	5	Ya	-	2
2	Sal. Sekunder Kali Sinung	10.929,48	M	Trapesium	8	3	Ya	-	1

No	Jenis Prasarana/ Sarana	Volume	Satu an	Bentuk Penampang Saluran*	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (Kali/ Tahun)
					Lebar Muka Draina- se (B)	Tinggi (H)	Berfung si	Tdk Berfungsi	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
3	Sal. Sekunder Kali Tengguli	13.048,39	M	Persegi Empat	10	3	Ya	-	1
4	Sal. Sekunder Guling Tumpeng	9.644,67	M	Trapesium	4	1,5	Ya	-	1
B.2	BANGUNAN PELENGKAP								
1	Rumah Pompa	1,00	Unit	-	-	-	Ya	-	1
2	Pintu Air	1,00	Unit	-	-	-	Ya	-	1
3	Kolam retensi	-	Unit	-	-	-	-	-	1
4	Trash rack/ saringan sampah	1,00	Unit	-	-	-	Ya	-	1
C	SUB SISTEM DRAINASE BABAKAN								
C.1	SALURAN								
1	Sal. Primer Kali Babakan	45.450,35	M	Trapesium	15	3	Ya	-	3
2	Sal. Sekunder Kali Cibuntris	20.127,89	M	-	5	1,5	Ya	-	2
C.2	BANGUNAN PELENGKAP								
1	Rumah Pompa	-	Unit	-	-	-	-	-	-
2	Pintu Air	-	Unit	-	-	-	-	-	-
3	Kolam retensi	-	Unit	-	-	-	-	-	-
4	Trash rack/ saringan sampah	-	Unit	-	-	-	-	-	-
D	SUB SISTEM DRAINASE PAKIJANGAN-1								
D.1	SALURAN								
1	Sal. Primer Kali Pakijangan	14.200,58	M	Trapesium	15	3	Ya	-	2
2	Sal. Sekunder Kali Siderpa	7.888,97	M	Trapesium	13	3	Ya	-	2
3	Sal. Sekunder Kali Bangsri	10.390,80	M	Trapesium	10	2	Ya	-	2
D.2	BANGUNAN PELENGKAP								
1	Rumah Pompa	-	Unit	-	-	-	-	-	-
2	Pintu Air	-	Unit	-	-	-	-	-	-

No	Jenis Prasarana/ Sarana	Volume	Satuan	Bentuk Penampang Saluran*	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (Kali/ Tahun)
					Lebar Muka Drainase (B)	Tinggi (H)	Berfungsi	Tdk Berfungsi	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
3	Kolam retensi	-	Unit	-	-	-	-	-	-
4	Trash rack/ saringan sampah	-	Unit	-	-	-	-	-	-
E	SUB SISTEM DRAINASE PAKIJANGAN-2								
E.1	SALURAN								
1	Sal. Primer Kali Kluwut	15.632,80	M	Persegi Empat	40	5	Ya	-	2
2	Sal. Sekunder Kali Siderpa	7.888,97	M	Trapesium	13	3	Ya	-	2
E.2	BANGUNAN PELENGKAP								
1	Rumah Pompa	-	Unit	-	-	-	-	-	-
2	Pintu Air	-	Unit	-	-	-	-	-	-
3	Kolam retensi	-	Unit	-	-	-	-	-	-
4	Trash rack/ saringan sampah	-	Unit	-	-	-	-	-	-
F	SUB SISTEM DRAINASE PEMALI								
F.1	SALURAN								
1	Sal. Primer Kali Pemali	118.036,8 9	M	Trapesium	45	5	Ya	-	1
2	Sal. Sekunder Kali Drepa	2.374,76	M	Trapesium	10	2	Ya	-	1
3	Sal. Sekunder Kali Nipon	6.641,96	M	Trapesium	10	2	Ya	-	1
4	Sal. Sekunder Kali Rambutan	26.301,33	M	Trapesium	25	3	Ya	-	1
F.2	BANGUNAN PELENGKAP								
1	Rumah Pompa	-	Unit	-	-	-	-	-	-
2	Pintu Air	-	Unit	-	-	-	-	-	-
3	Kolam retensi	-	Unit	-	-	-	-	-	-
4	Trash rack/ saringan sampah	-	Unit	-	-	-	-	-	-
G	SUB SISTEM DRAINASE KABUYUTAN								

No	Jenis Prasarana/ Sarana	Volume	Satuan	Bentuk Penampang Saluran*	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (Kali/ Tahun)
					Lebar Muka Drainase (B)	Tinggi (H)	Berfungsi	Tdk Berfungsi	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
G.1	SALURAN								
1	Sal. Primer Kali Kabuyutan	24.047,80	M	Trapesium			Ya	-	2
2	Sal. Sekunder Kali Sinung	10.929,48	M	Trapesium			Ya	-	2
3	Sal. Sekunder Kali Ciawi	8.395,36	M	Trapesium			Ya	-	2
4	Sal. Sekunder Kali Mati	3.943,37	M	Trapesium			Ya	-	2
G.2	BANGUNAN PELENGKAP								
1	Rumah Pompa	-	Unit	-	-	-	-	-	-
2	Pintu Air	-	Unit	-	-	-	-	-	-
3	Kolam retensi	-	Unit	-	-	-	-	-	-
4	Trash rack/ saringan sampah	-	Unit	-	-	-	-	-	-
H	SUB SISTEM DRAINASE WADAS-1 (DALAM KOTA)								
H.1	SALURAN								
1	Sal. Primer Kali Sigeleng	2.261,15	M	Persegi Empat	15,10	3,00	Ya	-	3
2	Sal. Sekunder KH. Hasyim Asyari		M	Persegi Empat	5,00	1,50	Ya	-	2
3	Sal. Sekunder Kali Sigenjik	4.720,00	M	Persegi Empat	2,5 - 3,0	1,50	Ya	-	2
4	Sal. Sekunder Kali Nipon	6.641,96	M	Trapesium	10	2	Ya	-	1
5	Sal. Sekunder Kali Rambutan	26.301,33	M	Trapesium	25	3	Ya	-	1
H.2	BANGUNAN PELENGKAP								
1	Rumah Pompa	-	Unit	-	-	-	-	-	-
2	Pintu Air	-	Unit	-	-	-	-	-	-
3	Kolam retensi	-	Unit	-	-	-	-	-	-
4	Trash rack/ saringan sampah	-	Unit	-	-	-	-	-	-

No	Jenis Prasarana/ Sarana	Volume	Satuan	Bentuk Penampang Saluran*	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (Kali/ Tahun)
					Lebar Muka Drainase (B)	Tinggi (H)	Berfungsi	Tdk Berfungsi	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I	SUB SISTEM DRAINASE WADAS-2								
I.1	SALURAN								
1	Sal. Primer Kali Gangsa	28.296,48	M	Trapesium	25	3	Ya	-	1
2	Sal. Sekunder Kali Nipon	6.641,96	M	Trapesium	10	2	Ya	-	1
3	Sal. Sekunder Kali Rambutan	26.301,33	M	Trapesium	23	2	Ya	-	1
I.2	BANGUNAN PELENGKAP								
1	Rumah Pompa	-	Unit	-	-	-	-	-	-
2	Pintu Air	-	Unit	-	-	-	-	-	-
3	Kolam retensi	-	Unit	-	-	-	-	-	-
4	Trash rack/ saringan sampah	-	Unit	-	-	-	-	-	-
J	SUB SISTEM DRAINASE KAMAL (DALAM KOTA)								
J.1	SALURAN								
1	Sal. Primer Kali Kamal	13.481,25	M	Persegi Empat	11	2	Ya	-	2
	Drainase Kamal	4.660,00	M	Persegi Empat	11	2	Ya	-	1
	Drainase Yos Sudarso Ki	925,00	M	Persegi Empat	4	1,5	Ya	-	1
	Drainase Ahmad Dahlan	610,00	M	Persegi Empat	5	1,5	Ya	-	1
	Drainase Sigempol (Sudetan)	575,00	M	Persegi Empat	4	1,5	Ya	-	1
J.2	BANGUNAN PELENGKAP								
1	Rumah Pompa	-	Unit	-	-	-	-	-	-
2	Pintu Air	-	Unit	-	-	-	-	-	-
3	Kolam retensi	-	Unit	-	-	-	-	-	-
4	Trash rack/ saringan sampah	-	Unit	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas PU Kabupaten Brebes, 2025

2.3. Area Beresiko Sanitasi dan Permasalahan Sanitasi

Area Beresiko Sanitasi Peta Status Sanitasi Kabupaten Brebes, yang memvisualisasikan tingkat risiko sanitasi domestik di seluruh wilayah kabupaten, berfungsi sebagai panduan perencanaan intervensi sanitasi untuk tahun 2025. Peta ini menggunakan sistem pewarnaan untuk mengklasifikasikan wilayah dari Risiko Sangat Rendah (Biru Muda) hingga Risiko Sangat Tinggi (Merah). Skala 1:75.000 digunakan untuk menggambarkan detail batas-batas administrasi (kecamatan dan desa), serta jaringan jalan dan perairan sebagai konteks geografis. Peta ini secara esensial menyoroti disparitas akses dan kualitas sanitasi antar wilayah, menjadikannya instrumen kunci bagi Pokja PKP dan Dinas Perumahan Rakyat setempat dalam merumuskan prioritas.

2.3.1. Area Berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik

Analisis sebaran risiko air limbah domestik menunjukkan pola geografis yang khas, di mana wilayah utara yang berbatasan dengan Laut Jawa, termasuk daerah Brebes dan Wanasari, cenderung didominasi oleh warna Biru Muda dan Hijau, mengindikasikan kondisi sanitasi yang sudah baik atau risiko yang rendah. Sebaliknya, wilayah tengah hingga selatan, khususnya daerah pedalaman seperti Larangan, Bumiayu, dan Tonjong, menunjukkan konsentrasi warna Kuning (Risiko Sedang) yang lebih luas. Hal ini menyiratkan bahwa tantangan sanitasi terbesar berada di wilayah yang lebih jauh dari pusat kota dan infrastruktur utama, yang mungkin berkaitan dengan kondisi geografis dan tingkat kepadatan penduduk yang berbeda.

Titik-titik yang diwarnai Merah (Risiko Sangat Tinggi) tersebar sebagai area prioritas utama penanganan, menandakan wilayah dengan akses sanitasi yang paling minim, kemungkinan besar masih melibatkan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang tinggi. Klaster merah yang menonjol terlihat di beberapa lokasi, seperti di daerah Bantarkawung di barat daya dan beberapa titik di wilayah Paguyangan dan Larangan. Penentuan zona merah ini menjadi fokus utama intervensi anggaran 2025, yang membutuhkan program percepatan seperti penyediaan jamban individu/komunal atau pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal.

Tabel II. 34 Tabel Status Area Berisiko ALD Kabupaten Brebes

No.	AREA BERESIKO ALD	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
1	4	SALEM	WANOJA
		BANTARKAWUNG	WARU
		PAGUYANGAN	KEDUNGOLENG
		PAGUYANGAN	WANATIRTA
		PAGUYANGAN	PAGUYANGAN
		LARANGAN	LARANGAN
		TANJUNG	KEMURANG WETAN
2	3	SALEM	BANJARAN
		SALEM	SALEM
		SALEM	PABUARAN
		SALEM	PASIRPANJANG
		BANTARKAWUNG	CINANAS
		BANTARKAWUNG	BANJARSARI
		BANTARKAWUNG	TALAGA
		BANTARKAWUNG	KARANGPARI
		BANTARKAWUNG	CIOMAS
		BANTARKAWUNG	TERLAYA
		BANTARKAWUNG	BANGBAYANG
		BANTARKAWUNG	SINDANGWANGI
		BUMIAYU	PAMIJEN
		BUMIAYU	KALILANGKAP
		BUMIAYU	KALINUSU
		PAGUYANGAN	WINDUAJI
		PAGUYANGAN	CILIBUR
		PAGUYANGAN	CIPETUNG
		PAGUYANGAN	PANDANSARI
		SIRAMPOG	WANAREJA
		SIRAMPOG	BATURSARI
		SIRAMPOG	KALIGIRI
		SIRAMPOG	SRIDADI
		SIRAMPOG	BENDA
		SIRAMPOG	MLAYANG
		SIRAMPOG	MENDALA
		TONJONG	PEPEDAN
		TONJONG	LINGGAPURA
		TONJONG	PURWODADI
		TONJONG	RAJA WETAN
		LARANGAN	KAMAL
		LARANGAN	WLAHAR
		LARANGAN	PAMULIHAN
		LARANGAN	KEDUNGBOKOR
		LARANGAN	SITANGGAL
		KETANGGUNGAN	PAMEDARAN

No.	AREA BERESIKO ALD	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
		BANJARHARJO	SINDANGHEULA
		BANJARHARJO	KERTASARI
		BANJARHARJO	BANDUNGSARI
		LOSARI	PEKAUMAN
		TANJUNG	TEGONGAN
		BULAKAMBA	DUKUHLA
		BULAKAMBA	BANGSRI
		BULAKAMBA	BULAKAMBA
3	2	SALEM	GANGGAWANG
		SALEM	CIPUTIH
		SALEM	BENTARSARI
		SALEM	BENTAR
		SALEM	WINDUSAKTI
		SALEM	WINDUASRI
		BANTARKAWUNG	CIBENTANG
		BANTARKAWUNG	TAMBAKSERANG
		BANTARKAWUNG	LEGOK
		BANTARKAWUNG	PENGARASAN
		BANTARKAWUNG	KEBANDUNGAN
		BUMIAYU	PRUWATAN
		BUMIAYU	LAREN
		BUMIAYU	LANGKAP
		BUMIAYU	DUKUHTURI
		PAGUYANGAN	TARABAN
		SIRAMPOG	IGIRKLANCENG
		SIRAMPOG	DAWUHAN
		SIRAMPOG	PLOMPONG
		SIRAMPOG	KALILOKA
		SIRAMPOG	MANGGIS
		TONJONG	KALI JURANG
		TONJONG	KARANGJONGKENG
		TONJONG	TONJONG
		LARANGAN	KARANGBALE
		LARANGAN	SLATRI
		KETANGGUNGAN	SINDANGJAYA
		KETANGGUNGAN	BAROS
		KETANGGUNGAN	KARANGMALANG
		KETANGGUNGAN	BULAKKELOR
		KETANGGUNGAN	CIDUWET
		BANJARHARJO	BLANDONGAN
		BANJARHARJO	CIPANJANG
		BANJARHARJO	PENANGGAPAN
		BANJARHARJO	CIHAUR
		BANJARHARJO	TEGALREJA

No.	AREA BERESIKO ALD	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
		LOSARI	JATISAWIT
		LOSARI	KARANGSAMBUNG
		LOSARI	NEGLA
		LOSARI	LOSARI KIDUL
		LOSARI	KECIPIR
		LOSARI	PENGABEAN
		TANJUNG	LUWUNGGEDE
		TANJUNG	MUNDU
		TANJUNG	SENGON
		TANJUNG	KRAKAHAN
		TANJUNG	TENGGULI
		KERSANA	JAGAPURA
		KERSANA	LIMBANGAN
		KERSANA	SUTAMAJA
		BULAKAMBA	JUBANG
		BULAKAMBA	CIPELEM
		BULAKAMBA	RANCAWULUH
		BULAKAMBA	BULUSARI
		BULAKAMBA	KARANGSARI
		BULAKAMBA	PAKIJANGAN
		WANASARI	JAGALEMPENI
		WANASARI	SIGENTONG
		WANASARI	KLAMPOK
		WANASARI	DUMELING
		WANASARI	SAWOJAJAR
		SONGGOM	DUKUHEMAJA
		JATIBARANG	KLIKIRAN
		JATIBARANG	BOJONG
		JATIBARANG	BUARAN
		JATIBARANG	RENGASBANDUNG
		JATIBARANG	TEMBELANG
		JATIBARANG	KALIPUCANG
		BREBES	KELURAHAN BREBES
		BREBES	KELURAHAN GANDASULI
		BREBES	KELURAHAN PASARBATANG
		BREBES	SIGAMBIR
		BREBES	PAGEJUGAN
4	1	SALEM	GUNUNGJAYA
		SALEM	INDRAJAYA
		SALEM	GUNUNGLARANG
		SALEM	GUNUNGSUGIH
		SALEM	CITIMBANG
		SALEM	KADUMANIS
		SALEM	GANDOANG

No.	AREA BERESIKO ALD	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
		SALEM	TEMBONGRAJA
		SALEM	GUNUNGTAJEM
		SALEM	CAPAR
		BANTARKAWUNG	PANGEBATAN
		BANTARKAWUNG	JIPANG
		BANTARKAWUNG	BANTARKAWUNG
		BANTARKAWUNG	BANTARWARU
		BUMIAYU	JATISAWIT
		BUMIAYU	NEGARADAH
		BUMIAYU	KALIERANG
		BUMIAYU	ADISANA
		BUMIAYU	PENGGARUTAN
		BUMIAYU	BUMIAYU
		BUMIAYU	KALIWADAS
		BUMIAYU	KALISUMUR
		PAGUYANGAN	PAKUJATI
		PAGUYANGAN	PAGOJENGAN
		PAGUYANGAN	KRETEK
		PAGUYANGAN	RAGATUNJUNG
		SIRAMPOG	BUNIWAH
		TONJONG	GALUHTIMUR
		TONJONG	KUTAMENDALA
		TONJONG	NEGARAYU
		TONJONG	TANGGERAN
		TONJONG	PURBAYASA
		TONJONG	WATUJAYA
		TONJONG	KUTAYU
		LARANGAN	LUWUNGGEDE
		LARANGAN	SIANDONG
		LARANGAN	RENGASPENDAWA
		KETANGGUNGAN	JEMASIH
		KETANGGUNGAN	CISEUREUH
		KETANGGUNGAN	CIKEUSAL KIDUL
		KETANGGUNGAN	CIKEUSAL LOR
		KETANGGUNGAN	BUARA
		KETANGGUNGAN	KARANGBANDUNG
		KETANGGUNGAN	KUBANGSARI
		KETANGGUNGAN	KUBANGWUNGU
		KETANGGUNGAN	TANGGUNSARI
		KETANGGUNGAN	DUKUHBADAG
		KETANGGUNGAN	KUBANGJATI
		KETANGGUNGAN	DUKUHTENGAH
		KETANGGUNGAN	KETANGGUNGAN
		KETANGGUNGAN	DUKUHTURI

No.	AREA BERESIKO ALD	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
		KETANGGUNGAN	PADAKATON
		BANJARHARJO	MALAHAYU
		BANJARHARJO	CIKUYA
		BANJARHARJO	BANJARHARJO
		BANJARHARJO	PAREREJA
		BANJARHARJO	CIGADUNG
		BANJARHARJO	TIWULANDU
		BANJARHARJO	CIKAKAK
		BANJARHARJO	CIBENDUNG
		BANJARHARJO	KARANGMAJA
		BANJARHARJO	DUKUHJERUK
		BANJARHARJO	PENDE
		BANJARHARJO	SUKAREJA
		BANJARHARJO	KUBANGJERO
		BANJARHARJO	CIBUNIWANGI
		BANJARHARJO	CIMUNDING
		BANJARHARJO	CIAWI
		BANJARHARJO	BANJAR LOR
		LOSARI	RANDEGAN
		LOSARI	BOJONGSARI
		LOSARI	KARANGJUNTI
		LOSARI	RUNGKANG
		LOSARI	DUKUHSALAM
		LOSARI	BABAKAN
		LOSARI	KALIBUNTU
		LOSARI	KEDUNGNENG
		LOSARI	RANDUSARI
		LOSARI	BLUBUK
		LOSARI	LOSARI LOR
		LOSARI	LIMBANGAN
		LOSARI	PRAPAG KIDUL
		LOSARI	KARANGDEMPEL
		LOSARI	PRAPAG LOR
		TANJUNG	SARIREJA
		TANJUNG	KUBANGPUTAT
		TANJUNG	LUWUNGBATA
		TANJUNG	KARANGREJA
		TANJUNG	SIDAKATON
		TANJUNG	KEDAWUNG
		TANJUNG	KEMURANG KULON
		TANJUNG	PEJAGAN
		TANJUNG	PENGARADAN
		TANJUNG	TANJUNG
		TANJUNG	LEMAHABANG

No.	AREA BERESIKO ALD	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
		KERSANA	KRADENAN
		KERSANA	SINDANGJAYA
		KERSANA	PENDE
		KERSANA	KUBANGPARI
		KERSANA	CIKANDANG
		KERSANA	CIGEDOG
		KERSANA	CIAMPEL
		KERSANA	KERSANA
		KERSANA	KEMUKTEN
		KERSANA	KRAMATSIMPANG
		BULAKAMBA	TEGALGLAGAH
		BULAKAMBA	PETUNJUNGAN
		BULAKAMBA	BANJARATMA
		BULAKAMBA	SIWULUH
		BULAKAMBA	LUWUNGRAGI
		BULAKAMBA	KLUWUT
		BULAKAMBA	BULAKPAREN
		BULAKAMBA	CIMOHONG
		BULAKAMBA	GRITING
		BULAKAMBA	PULOGADING
		WANASARI	TEGALGANDU
		WANASARI	GLONGGONG
		WANASARI	SISALAM
		WANASARI	LENGKONG
		WANASARI	TANJUNGSARI
		WANASARI	SIWUNGKUK
		WANASARI	DUKUHWRINGIN
		WANASARI	SIDAMULYA
		WANASARI	WANASARI
		WANASARI	SIASEM
		WANASARI	PEBATAN
		WANASARI	PESANTUNAN
		WANASARI	KEBOLEDAN
		WANASARI	KUPU
		WANASARI	KERTABESUKI
		SONGGOM	SONGGOM
		SONGGOM	SONGGOM LOR
		SONGGOM	GEGERKUNCI
		SONGGOM	JATIMAKMUR
		SONGGOM	JATIROKEH
		SONGGOM	CENANG
		SONGGOM	WANATAWANG
		SONGGOM	WANACALA
		SONGGOM	KARANGSEMBUNG

No.	AREA BERESIKO ALD	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
		JATIBARANG	KEBOGADUNG
		JATIBARANG	KEBONAGUNG
		JATIBARANG	KLAMPIS
		JATIBARANG	KEMIRIAMBA
		JATIBARANG	JATIBARANG KIDUL
		JATIBARANG	KARANGLO
		JATIBARANG	TEGALWULUNG
		JATIBARANG	JATIBARANG LOR
		JATIBARANG	PAMENGGER
		JATIBARANG	KERTASINDUYASA
		JATIBARANG	JANEGARA
		JATIBARANG	KENDAWA
		JATIBARANG	KEDUNGTUKANG
		JATIBARANG	PEDESLOHOR
		JATIBARANG	KRAMAT
		JATIBARANG	KALIALANG
		BREBES	PEMARON
		BREBES	KALIMATI
		BREBES	LEMBARAWA
		BREBES	KRASAK
		BREBES	PADASUGIH
		BREBES	WANGANDALEM
		BREBES	TERLANGU
		BREBES	PULOSARI
		BREBES	BANJARANYAR
		BREBES	KALIGANGSA KULON
		BREBES	KALIGANGSA WETAN
		BREBES	RANDUSANGA WETAN
		BREBES	RANDUSANGA KULON
		BREBES	KELURAHAN LIMBANGAN WETAN
		BREBES	KELURAHAN LIMBANGAN KULON
		BREBES	KEDUNGUTER
		BREBES	TENGKI
		BREBES	KALIWLINGI

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Tabel II. 35 Tabel Permasalahan Air Limbah Domestik

No	Permasalahan
1. Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan lumpur tinja/pengolahan terpusat, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis.	
1	BABS : 0 % (0.KK)
2	Akses terhadap jamban yang tidak layak: 1,6.% (11.436.KK)
3	Belum tersedia IPLT dan truk tinja milik pemerintah daerah; Praktek pengurusan tinja sangat rendah pertahun (1,1 % atau 7.620 KK); Kondisi SPALD-T tidak berfungsi optimal (melebihi kapasitas)
4	Pengukuran kualitas efluen belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh
5	Belum memiliki Masterplan Pengelolaan Air Limbah
2. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
1	Belum tersusunnya peraturan daerah khusus mengenai pengelolaan air limbah
2	Perhatian terhadap sarana dan prasarana air limbah yang masih kurang dibanding sektor lain
3	Terbatasnya pendanaan untuk pemeliharaan maupun pembangunan sarana air limbah
4	Bantuan pendanaan pemerintah (APBN/APBD Prov/Kab) terkendala regulasi yang mensyaratkan lembaga/kelompok, yayasan yang harus berbadan hukum dan tercatat dalam Kemenkum.

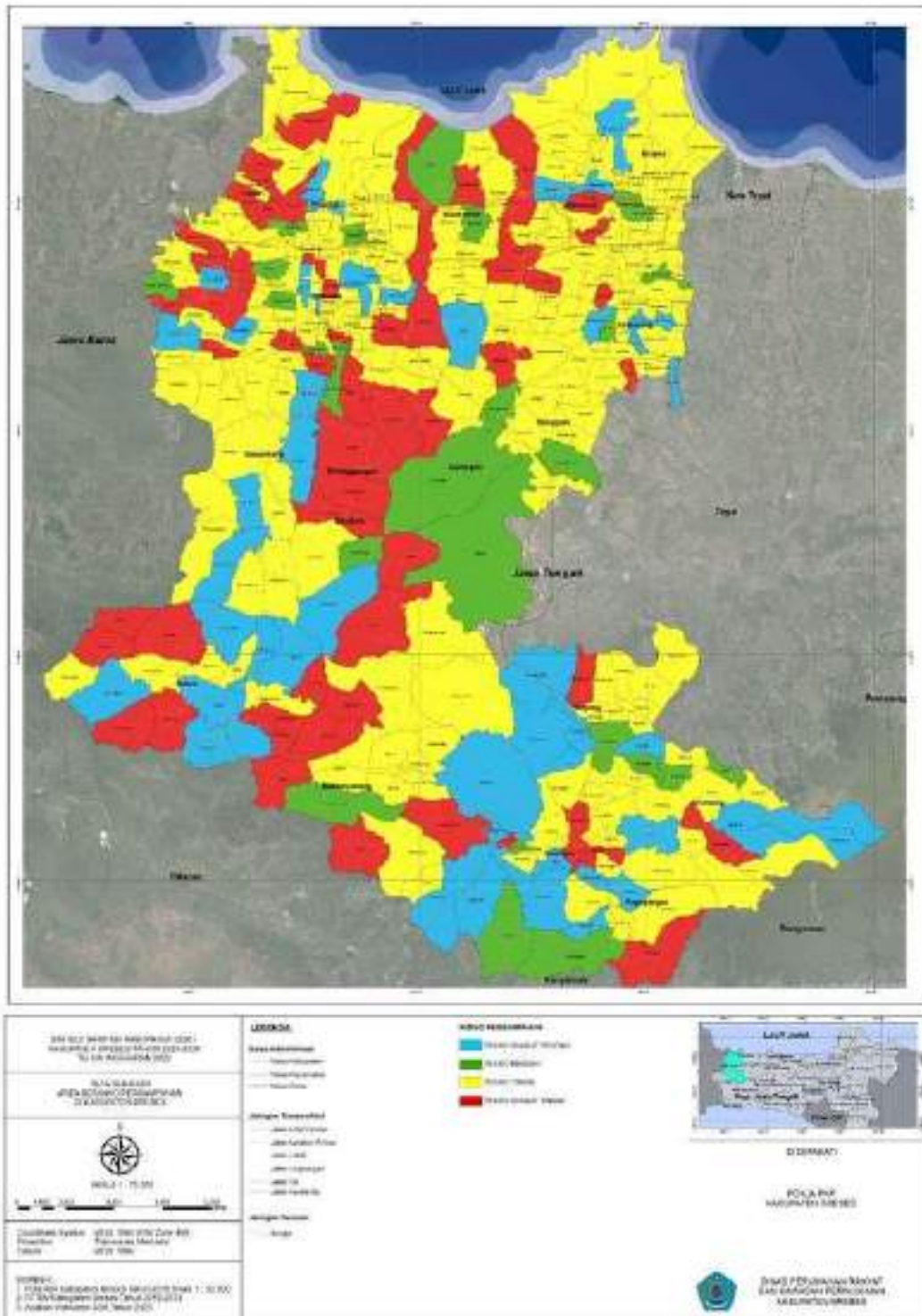
Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

2.3.2. Area Berisiko dan Permasalahan Persampahan

Area Berisiko Persampahan Kabupaten Brebes melengkapi data sanitasi dasar yang dibahas sebelumnya. Area berisiko Persampahan diidentifikasi dan divisualisasikan tingkat kerentanan wilayah terhadap masalah pengelolaan sampah, menggunakan gradasi warna dari Risiko Sangat Rendah (Biru Muda) hingga Risiko Sangat Tinggi (Merah). Tingginya kategori risiko persampahan pada peta ini mengindikasikan rendahnya tingkat layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, dan masih dominannya perilaku masyarakat membuang atau menimbun sampah secara ilegal (sampah liar). Peta ini sangat vital bagi pemerintah daerah untuk menargetkan investasi infrastruktur dan program edukasi secara efektif.

Area berisiko persampahan di Kabupaten Brebes memiliki sebaran risiko yang lebih merata dan cenderung lebih tinggi secara keseluruhan dibandingkan risiko sanitasi air limbah. Wilayah yang tergolong Risiko Sangat Tinggi (Merah) tersebar luas di hampir seluruh zona, mencakup daerah pesisir utara yang padat, perbatasan barat dengan Jawa Barat, hingga wilayah pedalaman di selatan. Penyebaran merah yang luas ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan masih menjadi tantangan sektoral yang paling mendesak di kabupaten tersebut. Sementara itu, wilayah Kuning (Risiko Sedang) mendominasi zona tengah, menyiratkan bahwa meskipun ada layanan, jangkauannya belum optimal atau sistem pengolahannya belum memadai untuk mengatasi volume sampah yang terus meningkat.

Pola sebaran risiko persampahan ini memiliki implikasi serius dalam perencanaan. Klaster risiko tinggi di wilayah utara (pesisir dan perkotaan) kemungkinan disebabkan oleh tingginya kepadatan penduduk dan volume sampah yang melebihi kapasitas layanan pengangkutan. Sebaliknya, klaster risiko tinggi di wilayah selatan dan perbatasan (pedalaman) seringkali disebabkan oleh keterbatasan akses geografis, membuat layanan pengangkutan sampah resmi sulit menjangkau daerah tersebut, sehingga masyarakat terpaksa membuang sampah ke sungai atau membakarnya. Pola ini menuntut solusi yang terdiferensiasi, bukan sekadar peningkatan armada.



Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Peta 2. 9 Peta Status Area Berisiko Persampahan Kabupaten Brebes

Tabel II. 36 Tabel Status Area Berisiko Persampahan Kabupaten Brebes

No.	AREA BERESIKO PERSAMPAHAN	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
1	4	SALEM	GUNUNGJAYA
		SALEM	INDRAJAYA
		SALEM	GUNUNGLARANG
		SALEM	GUNUNGSUGIH
		SALEM	CITIMBANG
		SALEM	KADUMANIS
		SALEM	GANDOANG
		SALEM	WINDUASRI
		SALEM	CAPAR
		SALEM	WANOJA
		BANTARKAWUNG	WARU
		BANTARKAWUNG	PANGEBATAN
		BANTARKAWUNG	LEGOK
		BUMIAYU	JATISAWIT
		BUMIAYU	KALIERANG
		BUMIAYU	DUKUHTURI
		BUMIAYU	KALISUMUR
		PAGUYANGAN	WINDUAJI
		SIRAMPOG	WANAREJA
		TONJONG	KARANGJONGKENG
		LARANGAN	KAMAL
		LARANGAN	KARANGBALE
		LARANGAN	SIANDONG
		KETANGGUNGAN	JEMASIH
		KETANGGUNGAN	CIKEUSAL KIDUL
		KETANGGUNGAN	CIKEUSAL LOR
		KETANGGUNGAN	BUARA
		KETANGGUNGAN	BAROS
		KETANGGUNGAN	KUBANGSARI
		KETANGGUNGAN	DUKUHTURI
		KETANGGUNGAN	BULAKKELOR
		BANJARHARJO	PENDE
		BANJARHARJO	CIAWI
		BANJARHARJO	BANJAR LOR
		LOSARI	NEGLA
		LOSARI	RUNGKANG
		LOSARI	DUKUHSALAM
		LOSARI	BABAKAN
		LOSARI	RANDUSARI
		LOSARI	BLUBUK
		LOSARI	LOSARI KIDUL
		LOSARI	LOSARI LOR
		LOSARI	PRAPAG KIDUL

No.	AREA BERESIKO PERSAMPAHAN	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
		TANJUNG	TENGGULI
		KERSANA	KRADENAN
		KERSANA	SINDANGJAYA
		KERSANA	KERSANA
		BULAKAMBA	PETUNJUNGAN
		BULAKAMBA	BANJARATMA
		BULAKAMBA	BANGSRI
		BULAKAMBA	KLUWUT
		BULAKAMBA	BULAKAMBA
		WANASARI	GLONGGONG
		WANASARI	DUKUHWRINGIN
		WANASARI	WANASARI
		WANASARI	PEBATAN
		SONGGOM	DUKUHMAJA
2	3	SALEM	GANGGAWANG
		SALEM	BENTAR
		SALEM	PABUARAN
		SALEM	TEMBONGRAJA
		SALEM	WINDUSAKTI
		BANTARKAWUNG	TALAGA
		BANTARKAWUNG	KARANGPARI
		BANTARKAWUNG	CIOMAS
		BANTARKAWUNG	TERLAYA
		BANTARKAWUNG	JIPANG
		BANTARKAWUNG	BANTARKAWUNG
		BANTARKAWUNG	BANGBAYANG
		BANTARKAWUNG	BANTARWARU
		BANTARKAWUNG	SINDANGWANGI
		BANTARKAWUNG	PENGARASAN
		BANTARKAWUNG	KEBANDUNGAN
		BUMIAYU	NEGARADAHA
		BUMIAYU	LANGKAP
		BUMIAYU	ADISANA
		BUMIAYU	PENGGARUTAN
		BUMIAYU	BUMIAYU
		BUMIAYU	KALIWADAS
		PAGUYANGAN	WANATIRTA
		PAGUYANGAN	PAGUYANGAN
		PAGUYANGAN	TARABAN
		PAGUYANGAN	RAGATUNJUNG
		PAGUYANGAN	CIPETUNG
		PAGUYANGAN	PANDANSARI
		SIRAMPOG	BATURSARI
		SIRAMPOG	SRIDADI

No.	AREA BERESIKO PERSAMPAHAN	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
		SIRAMPOG	PLOMPONG
		SIRAMPOG	BENDA
		SIRAMPOG	KALILOKA
		SIRAMPOG	MENDALA
		TONJONG	KALI JURANG
		TONJONG	PEPEDAN
		TONJONG	NEGARAYU
		TONJONG	TANGGERAN
		TONJONG	PURWODADI
		TONJONG	PURBAYASA
		TONJONG	WATUJAYA
		TONJONG	KUTAYU
		TONJONG	RAJA WETAN
		LARANGAN	LARANGAN
		LARANGAN	LUWUNGGEDE
		LARANGAN	SITANGGAL
		LARANGAN	RENGASPENDAWA
		KETANGGUNGAN	PAMEDARAN
		KETANGGUNGAN	KUBANGWUNGU
		KETANGGUNGAN	TANGGUNGSAI
		KETANGGUNGAN	DUKUHBADAG
		KETANGGUNGAN	KUBANGJATI
		KETANGGUNGAN	KARANGMALANG
		KETANGGUNGAN	KETANGGUNGAN
		KETANGGUNGAN	CIDUWET
		BANJARHARJO	SINDANGHEULA
		BANJARHARJO	BLANDONGAN
		BANJARHARJO	KERTASARI
		BANJARHARJO	PENANGGAPAN
		BANJARHARJO	MALAHAYU
		BANJARHARJO	PAREREJA
		BANJARHARJO	CIGADUNG
		BANJARHARJO	TIWULANDU
		BANJARHARJO	CIKAKAK
		BANJARHARJO	CIBENDUNG
		BANJARHARJO	KARANGMAJA
		BANJARHARJO	SUKAREJA
		BANJARHARJO	CIBUNI WANGI
		BANJARHARJO	CIMUNDING
		BANJARHARJO	CIHAUR
		BANJARHARJO	TEGALREJA
		LOSARI	RANDEGAN
		LOSARI	JATISAWIT
		LOSARI	BOJONGSARI

No.	AREA BERESIKO PERSAMPAHAN	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
		LOSARI	KALIBUNTU
		LOSARI	KEDUNGNENG
		LOSARI	PEKAUMAN
		LOSARI	KECIPIR
		LOSARI	PENGABEAN
		LOSARI	LIMBANGAN
		LOSARI	KARANGDEMPEL
		LOSARI	PRAPAG LOR
		TANJUNG	SARIREJA
		TANJUNG	LUWUNGGEDE
		TANJUNG	LUWUNGBATA
		TANJUNG	KARANGREJA
		TANJUNG	SENGON
		TANJUNG	KEMURANG WETAN
		TANJUNG	KEMURANG KULON
		TANJUNG	KRAKAHAN
		TANJUNG	PEJAGAN
		TANJUNG	PENGARADAN
		TANJUNG	LEMAHABANG
		KERSANA	PENDE
		KERSANA	KUBANGPARI
		KERSANA	CIKANDANG
		KERSANA	CIAMPEL
		KERSANA	JAGAPURA
		KERSANA	KEMUKTEN
		KERSANA	KRAMATSIMPANG
		KERSANA	LIMBANGAN
		KERSANA	SUTAMAJA
		BULAKAMBA	TEGALGLAGAH
		BULAKAMBA	JUBANG
		BULAKAMBA	DUKUHLO
		BULAKAMBA	CIPELEM
		BULAKAMBA	SIWULUH
		BULAKAMBA	LUWUNGRAGI
		BULAKAMBA	RANCAWULUH
		BULAKAMBA	KARANGSARI
		BULAKAMBA	BULAKPAREN
		BULAKAMBA	CIMOHONG
		BULAKAMBA	PAKIJANGAN
		BULAKAMBA	PULOGADING
		WANASARI	TEGALGANDU
		WANASARI	JAGALEMPENI
		WANASARI	SISALAM
		WANASARI	LENGKONG

No.	AREA BERESIKO PERSAMPAHAN	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
		WANASARI	TANJUNGSARI
		WANASARI	SIWUNGKUK
		WANASARI	SIGENTONG
		WANASARI	SIDAMULYA
		WANASARI	SIASEM
		WANASARI	KEBOLEDAN
		WANASARI	KUPU
		WANASARI	DUMELING
		WANASARI	KERTABESUKI
		WANASARI	SAWOJAJAR
		SONGGOM	SONGGOM
		SONGGOM	GEGERKUNCI
		SONGGOM	JATIMAKMUR
		SONGGOM	JATIROKEH
		SONGGOM	CENANG
		SONGGOM	WANATAWANG
		SONGGOM	WANACALA
		SONGGOM	KARANGSEMBUNG
		JATIBARANG	KEBONAGUNG
		JATIBARANG	KLAMPIS
		JATIBARANG	KEMIRIAMBA
		JATIBARANG	JATIBARANG KIDUL
		JATIBARANG	TEGALWULUNG
		JATIBARANG	JATIBARANG LOR
		JATIBARANG	KERTASINDUYASA
		JATIBARANG	KLIKIRAN
		JATIBARANG	BUARAN
		JATIBARANG	KEDUNGTUKANG
		JATIBARANG	RENGASBANDUNG
		JATIBARANG	TEMBELANG
		JATIBARANG	PEDESLOHOR
		JATIBARANG	KRAMAT
		JATIBARANG	KALIALANG
		BREBES	PEMARON
		BREBES	KALIMATI
		BREBES	LEMBARAWA
		BREBES	KRASAK
		BREBES	PADASUGIH
		BREBES	WANGANDALEM
		BREBES	TERLANGU
		BREBES	PULOSARI
		BREBES	BANJARANYAR
		BREBES	KALIGANGSA KULON
		BREBES	KALIGANGSA WETAN

No.	AREA BERESIKO PERSAMPAHAN	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
		BREBES	RANDUSANGA WETAN
		BREBES	RANDUSANGA KULON
		BREBES	KELURAHAN LIMBANGAN WETAN
		BREBES	KELURAHAN LIMBANGAN KULON
		BREBES	KELURAHAN PASARBATANG
		BREBES	SIGAMBIR
		BREBES	PAGEJUGAN
		BREBES	TENGKI
		BREBES	KALIWLINGI
3	2	BANTARKAWUNG	CINANAS
		BANTARKAWUNG	TAMBAKSERANG
		BUMIAYU	PAMIJEN
		PAGUYANGAN	KEDUNGOLENG
		SIRAMPOG	KALIGIRI
		SIRAMPOG	MANGGIS
		SIRAMPOG	MLAYANG
		TONJONG	LINGGAPURA
		LARANGAN	WLAHAR
		LARANGAN	PAMULIHAN
		LARANGAN	KEDUNGBOKOR
		KETANGGUNGAN	SINDANGJAYA
		KETANGGUNGAN	KARANGBANDUNG
		LOSARI	KARANGSAMBUNG
		TANJUNG	KUBANGPUTAT
		TANJUNG	MUNDU
		TANJUNG	SIDAKATON
		TANJUNG	TEGONGAN
		BULAKAMBA	BULUSARI
		BULAKAMBA	GRITING
		SONGGOM	SONGGOM LOR
		JATIBARANG	BOJONG
		JATIBARANG	KALIPUCANG
		BREBES	KELURAHAN BREBES
		BREBES	KELURAHAN GANDASULI
4	1	SALEM	BANJARAN
		SALEM	SALEM
		SALEM	CIPUTIH
		SALEM	BENTARSARI
		SALEM	GUNUNGTAJEM
		SALEM	PASIRPANJANG
		BANTARKAWUNG	BANJARSARI

No.	AREA BERESIKO PERSAMPAHAN	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
		BANTARKAWUNG	CIBENTANG
		BUMIAYU	PRUWATAN
		BUMIAYU	LAREN
		BUMIAYU	KALILANGKAP
		BUMIAYU	KALINUSU
		PAGUYANGAN	PAKUJATI
		PAGUYANGAN	PAGOJENGAN
		PAGUYANGAN	KRETEK
		PAGUYANGAN	CILIBUR
		SIRAMPOG	IGIRKLANCENG
		SIRAMPOG	DAWUHAN
		SIRAMPOG	BUNIWAH
		TONJONG	GALUHTIMUR
		TONJONG	KUTAMENDALA
		TONJONG	TONJONG
		LARANGAN	SLATRI
		KETANGGUNGAN	CISEUREUH
		KETANGGUNGAN	DUKUHTENGAH
		KETANGGUNGAN	PADAKATON
		BANJARHARJO	BANDUNGSARI
		BANJARHARJO	CIPANJANG
		BANJARHARJO	CIKUYA
		BANJARHARJO	BANJARHARJO
		BANJARHARJO	DUKUHJERUK
		BANJARHARJO	KUBANGJERO
		LOSARI	KARANGJUNTI
		TANJUNG	KEDAWUNG
		TANJUNG	TANJUNG
		KERSANA	CIGEDOG
		WANASARI	KLAMPOK
		WANASARI	PESANTUNAN
		JATIBARANG	KEBOGADUNG
		JATIBARANG	KARANGLO
		JATIBARANG	PAMENGER
		JATIBARANG	JANEGARA
		JATIBARANG	KENDAWA
		BREBES	KEDUNGUTER

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Tabel II. 37 Tabel Permasalahan Persampahan

No	Permasalahan
1. Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan persampahan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis.	
1	Terdapat 21 TPS3R tidak optimal atau bahkan tidak beroperasi
2	Cakupan pelayanan pengumpulan sampah masih rendah yaitu 34%
3	Frekuensi dan ketepatan waktu pengangkutan sampah belum optimal
4	Pengelolaan sampah setempat masih rendah dan belum ada pemilahan sampah di sumber
5	Operasional TPA masih belum sesuai standar dan menggunakan open dumping
2. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
1	Perhatian terhadap sarana dan prasarana persampahan yang masih kurang dibanding sektor lain
2	Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman warga mengenai pengelolaan sampah yang baik
3	Masih rendahnya pendanaan sektor Persampahan, baik dari APBD maupun dukungan pendanaan di luar APBD

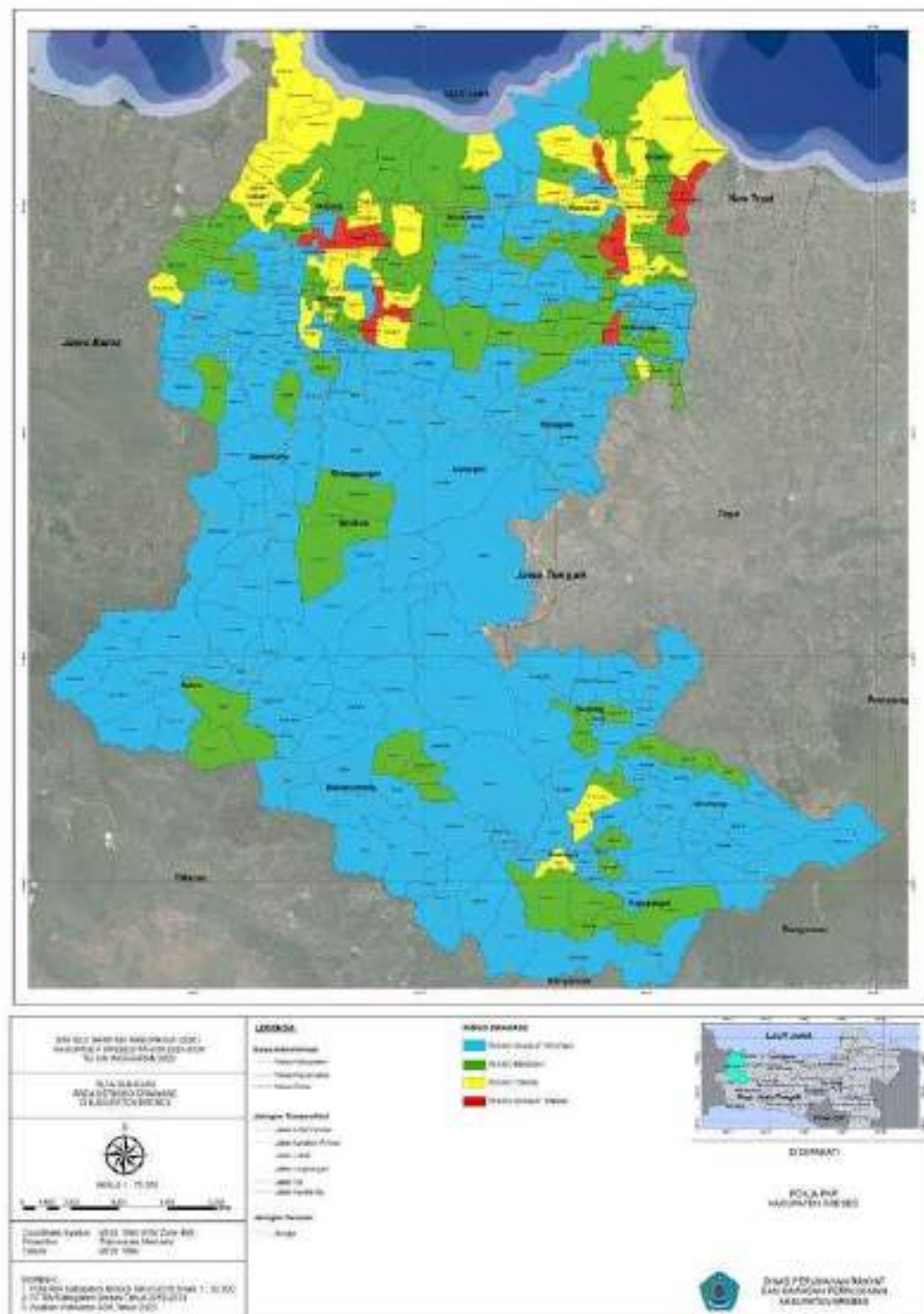
Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

2.3.3. Area Berisiko dan Permasalahan Drainase Lingkungan

Area berisiko dan permasalahan drainase lingkungan menjelaskan tingkat risiko yang berkaitan dengan sistem pembuangan air hujan dan limpasan permukaan di permukiman, yang umumnya berkaitan dengan risiko genangan air atau banjir. Analisis visual menunjukkan bahwa secara umum, risiko drainase di Kabupaten Brebes lebih terkonsentrasi di wilayah utara dan sebagian kecil wilayah timur, sementara mayoritas wilayah tengah dan selatan didominasi oleh warna Biru Muda (Risiko Sangat Rendah) dan Hijau (Risiko Rendah). Konsentrasi risiko tinggi dan sangat tinggi (Kuning dan Merah) terlihat jelas di sepanjang koridor utara, khususnya di daerah pesisir, perbatasan dengan Kota Tegal (Bulakamba, Brebes, Wanasari, Losari), dan beberapa titik di wilayah tengah-utara. Risiko ini disebabkan oleh topografi datar, tingginya curah hujan, dan kondisi saluran drainase yang mampet atau rusak.

Peta Risiko Drainase Domestik ini sangat penting untuk penentuan prioritas pembangunan infrastruktur pencegahan banjir dan genangan. Wilayah yang diwarnai Merah dan Kuning adalah area yang membutuhkan intervensi mendesak, seperti rehabilitasi atau pembangunan saluran drainase, pengerukan sedimen, dan pemisahan sistem drainase dari

saluran pembuangan air limbah. Dibandingkan dua peta sebelumnya, masalah drainase lebih terlokalisasi di daerah yang rawan genangan, menjadikan fokus penanganan lebih spesifik pada peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jaringan drainase perkotaan dan pesisir.



Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Peta 2. 10 Peta Status Area Berisiko Drainase Kabupaten Brebes

Tabel II. 38 Tabel Status Area Berisiko Drainase Kabupaten Brebes

No.	AREA BERESIKO DRAINASE	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
1	4	KETANGGUNGAN	KARANGMALANG
		KETANGGUNGAN	KETANGGUNGAN
		TANJUNG	SENGON
		TANJUNG	TEGONGAN
		TANJUNG	KEMURANG WETAN
		JATIBARANG	BOJONG
		BREBES	TERLANGU
		BREBES	PULOSARI
		BREBES	KALIGANGSA KULON
		BREBES	KALIGANGSA WETAN
		BREBES	TENGI
2	3	BUMIAYU	LAREN
		BUMIAYU	PENGGARUTAN
		BUMIAYU	DUKUHTURI
		KETANGGUNGAN	PADAKATON
		LOSARI	KARANGSAMBUNG
		LOSARI	RANDUSARI
		LOSARI	PEKAUMAN
		LOSARI	LOSARI KIDUL
		LOSARI	LOSARI LOR
		LOSARI	PENGABEAN
		LOSARI	LIMBANGAN
		LOSARI	PRAPAG KIDUL
		LOSARI	KARANGDEMPEL
		LOSARI	PRAPAG LOR
		TANJUNG	KEDAWUNG
		TANJUNG	KEMURANG KULON
		TANJUNG	PEJAGAN
		TANJUNG	TENGULI
		KERSANA	CIKANDANG
		KERSANA	JAGAPURA
		KERSANA	KERSANA
		KERSANA	KEMUKTEN
		BULAKAMBA	BULAKPAREN
		BULAKAMBA	PULOGADING
		WANASARI	KLAMPOK
		WANASARI	PEBATAN
		WANASARI	DUMELING
		WANASARI	KERTABESUKI
		JATIBARANG	KEMIRIAMBA
		BREBES	PEMARON
		BREBES	KALIMATI
		BREBES	WANGANDALEM

No.	AREA BERESIKO DRAINASE	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
		BREBES	KELURAHAN BREBES
		BREBES	KELURAHAN GANDASULI
		BREBES	RANDUSANGA WETAN
		BREBES	RANDUSANGA KULON
		BREBES	KELURAHAN PASARBATANG
		BREBES	SIGAMBIR
		BREBES	PAGEJUGAN
3	2	SALEM	BANJARAN
		SALEM	SALEM
		BANTARKAWUNG	JIPANG
		BANTARKAWUNG	BANTARKAWUNG
		BANTARKAWUNG	BANGBAYANG
		BUMIAYU	PRUWATAN
		BUMIAYU	NEGARADAH
		BUMIAYU	LANGKAP
		PAGUYANGAN	WANATIRTA
		PAGUYANGAN	PAGUYANGAN
		PAGUYANGAN	PAKUJATI
		PAGUYANGAN	TARABAN
		SIRAMPOG	KALIGIRI
		SIRAMPOG	BENDA
		SIRAMPOG	MENDALA
		SIRAMPOG	BUNIWAH
		TONJONG	TONJONG
		TONJONG	PURWODADI
		LARANGAN	SLATRI
		LARANGAN	SITANGGAL
		LARANGAN	RENGASPENDAWA
		KETANGGUNGAN	PAMEDARAN
		KETANGGUNGAN	CIKEUSAL KIDUL
		KETANGGUNGAN	CIKEUSAL LOR
		KETANGGUNGAN	DUKUHBADAG
		KETANGGUNGAN	KUBANGJATI
		KETANGGUNGAN	DUKUHTURI
		KETANGGUNGAN	BULAKKELOR
		KETANGGUNGAN	CIDUWET
		BANJARHARJO	PAREREJA
		BANJARHARJO	CIKAKAK
		BANJARHARJO	BANJAR LOR
		LOSARI	BOJONGSARI
		LOSARI	RUNGKANG
		LOSARI	DUKUHSALAM
		LOSARI	BABAKAN
		LOSARI	KALIBUNTU

No.	AREA BERESIKO DRAINASE	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
		LOSARI	KEDUNGNENG
		LOSARI	BLUBUK
		LOSARI	KECIPIR
		TANJUNG	SIDAKATON
		TANJUNG	KRAKAHAN
		TANJUNG	PENGARADAN
		TANJUNG	TANJUNG
		KERSANA	CIGEDOG
		KERSANA	CIAMPEL
		KERSANA	LIMBANGAN
		KERSANA	SUTAMAJA
		BULAKAMBA	DUKUHLO
		BULAKAMBA	BANJARATMA
		BULAKAMBA	KARANGSARI
		BULAKAMBA	KLUWUT
		BULAKAMBA	CIMOHONG
		BULAKAMBA	GRITING
		BULAKAMBA	BULAKAMBA
		WANASARI	TEGALGANDU
		WANASARI	JAGALEMPENI
		WANASARI	GLONGGONG
		WANASARI	LENGKONG
		WANASARI	SIGENTONG
		WANASARI	SIDAMULYA
		WANASARI	WANASARI
		WANASARI	KEBOLEDAN
		SONGGOM	DUKUHMAJA
		JATIBARANG	KEBOGADUNG
		JATIBARANG	JATIBARANG KIDUL
		JATIBARANG	KARANGLO
		JATIBARANG	KERTASINDUYASA
		JATIBARANG	JANEGARA
		JATIBARANG	KLIKIRAN
		JATIBARANG	KALIPUCANG
		JATIBARANG	KALIALANG
		BREBES	LEMBARAWA
		BREBES	KRASAK
		BREBES	PADASUGIH
		BREBES	BANJARANYAR
		BREBES	KELURAHAN LIMBANGAN WETAN
		BREBES	KELURAHAN LIMBANGAN KULON
		BREBES	KEDUNGUTER
		BREBES	KALIWLINGI

No.	AREA BERESIKO DRAINASE	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
4	1	SALEM	GUNUNGJAYA
		SALEM	INDRAJAYA
		SALEM	GUNUNGLARANG
		SALEM	GUNUNGSUGIH
		SALEM	GANGGAWANG
		SALEM	CITIMBANG
		SALEM	KADUMANIS
		SALEM	GANDOANG
		SALEM	CIPUTIH
		SALEM	BENTARSARI
		SALEM	BENTAR
		SALEM	PABUARAN
		SALEM	TEMBONGRAJA
		SALEM	GUNUNGTAJEM
		SALEM	WINDUSAKTI
		SALEM	WINDUASRI
		SALEM	CAPAR
		SALEM	WANOJA
		SALEM	PASIRPANJANG
		BANTARKAWUNG	CINANAS
		BANTARKAWUNG	BANJARSARI
		BANTARKAWUNG	CIBENTANG
		BANTARKAWUNG	TALAGA
		BANTARKAWUNG	KARANGPARI
		BANTARKAWUNG	WARU
		BANTARKAWUNG	PANGEBATAN
		BANTARKAWUNG	CIOMAS
		BANTARKAWUNG	TAMBAKSERANG
		BANTARKAWUNG	LEGOK
		BANTARKAWUNG	TERLAYA
		BANTARKAWUNG	BANTARWARU
		BANTARKAWUNG	SINDANGWANGI
		BANTARKAWUNG	PENGARASAN
		BANTARKAWUNG	KEBANDUNGAN
		BUMIAYU	JATISAWIT
		BUMIAYU	KALIERANG
		BUMIAYU	ADISANA
		BUMIAYU	BUMIAYU
		BUMIAYU	KALIWADAS
		BUMIAYU	PAMIJEN
		BUMIAYU	KALISUMUR
		BUMIAYU	KALILANGKAP
		BUMIAYU	KALINUSU
		PAGUYANGAN	KEDUNGOLENG

No.	AREA BERESIKO DRAINASE	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
		PAGUYANGAN	WINDUAJI
		PAGUYANGAN	PAGOJENGAN
		PAGUYANGAN	KRETEK
		PAGUYANGAN	RAGATUNJUNG
		PAGUYANGAN	CILIBUR
		PAGUYANGAN	CIPETUNG
		PAGUYANGAN	PANDANSARI
		SIRAMPOG	WANAREJA
		SIRAMPOG	IGIRKLANCENG
		SIRAMPOG	DAWUHAN
		SIRAMPOG	BATURSARI
		SIRAMPOG	SRIDADI
		SIRAMPOG	PLOMPONG
		SIRAMPOG	KALILOKA
		SIRAMPOG	MANGGIS
		SIRAMPOG	MLAYANG
		TONJONG	KALIJURANG
		TONJONG	GALUHTIMUR
		TONJONG	KUTAMENDALA
		TONJONG	KARANGJONGKENG
		TONJONG	PEPEDAN
		TONJONG	LINGGAPURA
		TONJONG	NEGARAYU
		TONJONG	TANGGERAN
		TONJONG	PURBAYASA
		TONJONG	WATUJAYA
		TONJONG	KUTAYU
		TONJONG	RAJA WETAN
		LARANGAN	KAMAL
		LARANGAN	WLAHAR
		LARANGAN	PAMULIHAN
		LARANGAN	KEDUNGBOKOR
		LARANGAN	LARANGAN
		LARANGAN	KARANGBALE
		LARANGAN	LUWUNGGEDE
		LARANGAN	SIANDONG
		KETANGGUNGAN	JEMASIH
		KETANGGUNGAN	CISEUREUH
		KETANGGUNGAN	SINDANGJAYA
		KETANGGUNGAN	BUARA
		KETANGGUNGAN	KARANGBANDUNG
		KETANGGUNGAN	BAROS
		KETANGGUNGAN	KUBANGSARI
		KETANGGUNGAN	KUBANGWUNGU

No.	AREA BERESIKO DRAINASE	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
		KETANGGUNGAN	TANGGUNGSARI
		KETANGGUNGAN	DUKUHTENGAH
		BANJARHARJO	SINDANGHEULA
		BANJARHARJO	BLANDONGAN
		BANJARHARJO	KERTASARI
		BANJARHARJO	BANDUNGSARI
		BANJARHARJO	CIPANJANG
		BANJARHARJO	PENANGGAPAN
		BANJARHARJO	MALAHAYU
		BANJARHARJO	CIKUYA
		BANJARHARJO	BANJARHARJO
		BANJARHARJO	CIGADUNG
		BANJARHARJO	TIWULANDU
		BANJARHARJO	CIBENDUNG
		BANJARHARJO	KARANGMAJA
		BANJARHARJO	DUKUHJERUK
		BANJARHARJO	PENDE
		BANJARHARJO	SUKAREJA
		BANJARHARJO	KUBANGJERO
		BANJARHARJO	CIBUNIWANGI
		BANJARHARJO	CIMUNDING
		BANJARHARJO	CIAWI
		BANJARHARJO	CIHAUR
		BANJARHARJO	TEGALREJA
		LOSARI	RANDEGAN
		LOSARI	JATISAWIT
		LOSARI	NEGLA
		LOSARI	KARANGJUNTI
		TANJUNG	SARIREJA
		TANJUNG	KUBANGPUTAT
		TANJUNG	LUWUNGGEDE
		TANJUNG	MUNDU
		TANJUNG	LUWUNGBATA
		TANJUNG	KARANGREJA
		TANJUNG	LEMAHABANG
		KERSANA	KRADENAN
		KERSANA	SINDANGJAYA
		KERSANA	PENDE
		KERSANA	KUBANGPARI
		KERSANA	KRAMATSIMPANG
		BULAKAMBA	TEGALGLAGAH
		BULAKAMBA	PETUNJUNGAN
		BULAKAMBA	JUBANG
		BULAKAMBA	CIPELEM

No.	AREA BERESIKO DRAINASE	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	DESA
		BULAKAMBA	SIWULUH
		BULAKAMBA	LUWUNGRAGI
		BULAKAMBA	BANGSRI
		BULAKAMBA	RANCAWULUH
		BULAKAMBA	BULUSARI
		BULAKAMBA	PAKIJANGAN
		WANASARI	SISALAM
		WANASARI	TANJUNGSARI
		WANASARI	SIWUNGKUK
		WANASARI	DUKUHWRINGIN
		WANASARI	SIASEM
		WANASARI	PESANTUNAN
		WANASARI	KUPU
		WANASARI	SAWOJAJAR
		SONGGOM	SONGGOM
		SONGGOM	SONGGOM LOR
		SONGGOM	GEGERKUNCI
		SONGGOM	JATIMAKMUR
		SONGGOM	JATIROKEH
		SONGGOM	CENANG
		SONGGOM	WANATAWANG
		SONGGOM	WANACALA
		SONGGOM	KARANGSEMBUNG
		JATIBARANG	KEBONAGUNG
		JATIBARANG	KLAMPIS
		JATIBARANG	TEGALWULUNG
		JATIBARANG	JATIBARANG LOR
		JATIBARANG	PAMENGER
		JATIBARANG	KENDAWA
		JATIBARANG	BUARAN
		JATIBARANG	KEDUNGTUKANG
		JATIBARANG	RENGASBANDUNG
		JATIBARANG	TEMBELANG
		JATIBARANG	PEDESLOHOR
		JATIBARANG	KRAMAT

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Tabel II. 39 Tabel Permasalahan Drainase

No	Permasalahan
1. Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana Drainase serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis.	
1	Sebagian besar drainase sudah rusak dan belum berfungsi secara optimal (sedimentasi lumpur dan sampah)
2	Karakteristik wilayah pesisir yang sangat rendah dan datar bahkan sejajar dengan Sungai termasuk daerah rawan rob
3	Dimensi saluran/drainase yang kurang sesuai dengan kondisi lapangan, sebagian terlalu sempit
4	Keberadaan bangunan di sempadan drainase primer menyebabkan kesulitan dalam melakukan normalisasi
5	Masterplan Drainase perlu ditinjau kembali (review)
2. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
1	Perhatian terhadap sarana dan prasarana drainase yang masih kurang dibanding sektor lain
2	Terbatasnya pendanaan untuk pemeliharaan maupun pembangunan drainase
3	Perilaku masyarakat yang masih apatis terhadap kondisi drainase lingkungan

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1. Visi Dan Misi Sanitasi

Arah pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2025-2045. RPJMN 2025-2029 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terbaru dengan visi “Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Asta Cita. Arahan Presiden terkait pembangunan infrastruktur dasar, termasuk sanitasi, tertuang dalam salah satu misi yang berfokus pada transformasi sosial dan ekonomi, dengan sasaran spesifik untuk mewujudkan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman bagi 100% rumah tangga pada akhir periode perencanaan.

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”. Misi Terkait Sanitasi terdapat terdapat misi yang berfokus pada "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemenuhan Layanan Dasar" serta "Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman Layak Huni yang Berkelanjutan.", salah satu strategi yang dijalankan adalah melalui percepatan pemenuhan universal access (akses universal), yang mencakup peningkatan akses rumah layak huni serta ketersediaan infrastruktur dasar permukiman, termasuk air bersih dan sanitasi yang layak dan aman.

Demikian pula, arah pembangunan sanitasi Kabupaten Brebes diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2025-2030. Visi Pembangunan jangka menengah daerah adalah "Terwujudnya Brebes sebagai Kabupaten yang 'BREBES BERES' (Berkeadaban, Ekonomi Tangguh, Responsif, Edukatif, Sehat, dan Sejahtera)". Misi Terkait Sanitasi berada pada Misi pilar "Sehat": Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Brebes yang sehat, tangguh, dan berdaya guna. Misi pilar "Berkelanjutan" (implisit dalam 'BERES'): Mewujudkan pembangunan yang bersih, berkeadilan, berkemajuan dan berkelanjutan. Misi pilar "Edukatif": Menjamin pendidikan yang merata (termasuk edukasi PHBS). Misi pilar "Responsif": Tata kelola pemerintahan yang cepat tanggap (termasuk pada isu sanitasi dan lingkungan).

Dari pernyataan dan makna visi dan misi pembangunan nasional, pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan daerah Kabupaten Brebes, nampak adanya keterkaitan dan kesesuaian dalam kebijakan pembangunan sanitasi. Artinya pelaksanaan pembangunan sanitasi di setiap tingkatan pemerintah dapat dilaksanakan secara sinergis, saling mengisi dan saling mendukung. Apalagi dengan target akses sanitasi layak tercapai 100% dan sanitasi aman 15 % pada tahun 2030, bagi Pemerintah Kabupaten Brebes memerlukan upaya yang sangat keras sangat serta memerlukan dukungan pendanaan dari berbagai pihak baik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat dan pihak-pihak lain yang terkait untuk percepatan pembangunan sanitasi, mengingat capaian akses sanitasi layak baru 98,4 % dan sanitasi aman baru 1,1 % pada tahun 2025, sehingga masih ada 1,6 % akses sanitasi belum layak dan selisih target akses aman sebesar 13,9 % yang harus dicapai.

Berdasarkan kondisi eksisting, target capaian sanitasi yang harus dicapai, dan karakteristik lokal maka dirumuskan Visi dan Misi pembangunan sanitasi Kabupaten Brebes dalam rangka percepatan menuju layanan akses sanitasi layak dan aman dengan dasar pemikiran bahwa untuk mewujudkan masyarakat Brebes yang unggul diperlukan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang tinggi, didukung dengan pendidikan yang memadai dan perekonomian daerah yang berdaya saing, sehingga masyarakat akan menjadi produktif dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara material maupun non material, hidup di lingkungan perumahan dan permukiman yang aman, nyaman, terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan. Sehingga Visi Sanitasi Kabupaten Brebes 2021 – 2025 adalah *"Terwujudnya Sanitasi Inklusif, Aman, Bersih, dan Berkelanjutan (SABER) berbasis Masyarakat dan Teknologi untuk mendukung 'BREBES BERES' yang Sehat dan Sejahtera."*

Sanitasi Inklusif Aman, Bersih, dan Berkelanjutan": Inklusif Adalah menjangkau seluruh lapisan Masyarakat tanpa terkecuali, Aman sejalan dengan target RPJMN/RPJMD (bukan hanya layak). Bersih dan Berkelanjutan diambil langsung dari Misi Brebes dan Visi Jawa Tengah yang mendukung kelestarian lingkungan. Berbasis Masyarakat & Teknologi: Ini mengakomodasi pentingnya strategi komunikasi dan perubahan perilaku masyarakat. Teknologi: Mengintegrasikan konsep *"Smart Environment"* dalam bentuk yang praktis dan dapat diterapkan (bisa berupa digitalisasi data, sistem monitoring, atau teknologi pengolahan limbah yang efisien). Mendukung 'BREBES BERES': Ini adalah kalimat kunci penyelarasan. Visi sanitasi ini secara lugas memposisikan diri sebagai pendukung utama untuk mencapai pilar "Sehat" dan "Sejahtera" dari Visi Bupati Brebes terpilih.

Misi Sanitasi Kabupaten Brebes 2026-2030 dapat dijabarkan dan dirinci berdasarkan masing-masing sektor yaitu sektor air limbah, sektor persampahan, dan sektor drainase. Visi sanitasi yang diturunkan menjadi beberapa misi persektor, akan dianalisis berdasarkan pada potensi dan masalah yang tersusun dalam pembahasan selanjutnya. Penjabaran Misi pada tiap sektor tersebut Adalah:

(1) *Misi Sektor Air Limbah Domestik (ALD)*

1. Meningkatkan akses layanan dan kualitas infrastruktur air limbah domestik yang aman dan inklusif;
2. Memperkuat Tata Kelola dan Kelembagaan Air Limbah yang Responsif, Profesional, dan Partisipatif;
3. Mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Inovatif dan Cerdas Berbasis Manajemen Risiko;
4. Mengakselerasi Pembangunan Air Limbah untuk Mendukung Ketahanan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan.
5. Mewujudkan Perubahan Perilaku Higienis dan Sanitasi (PHBS) melalui Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat yang Sensitif Lokal.

(2) *Misi Sektor Persampahan*

1. Mewujudkan sistem pengelolaan persampahan yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan menekankan pada pengurangan sampah berbasis masyarakat dan digitalisasi sistem monitoring.
2. Memperkuat Tata Kelola dan Kelembagaan Persampahan yang Responsif, Profesional, dan Partisipatif;
3. Mengembangkan Sistem Pengelolaan Persampahan yang Inovatif dan Cerdas Berbasis Manajemen Risiko;
4. Mengakselerasi Pembangunan Persampahan untuk Mendukung Ketahanan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan.

(3) *Misi Sektor Drainase*

1. Menyelenggarakan sistem drainase yang terintegrasi, andal, dan berkelanjutan guna menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat serta bebas genangan.
2. Memperkuat Tata Kelola dan Kelembagaan Drainase yang Responsif, Profesional, dan Partisipatif;
3. Mengakselerasi Pembangunan Drainase untuk Mendukung Ketahanan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan.

Dalam rangka mencapai Visi-Misi tersebut maka kerangka kebijakan pembangunan sanitasi yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Brebes utamanya mengacu kepada RPJMD 2025-2029, dan disinkronkan dengan kebijakan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas dalam RPJMN 2025-2029, serta kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Penyediaan basic life access Masyarakat. Tabel berikut menyandingkan antara visi misi Kabupaten Brebes dengan visi misi sanitasi:

Tabel III. 1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Brebes

VISI KABUPATEN BREBES	MISI KABUPATEN BREBES	VISI SANITASI KABUPATEN BREBES	MISI SANITASI KABUPATEN BREBES
"Terwujudnya Brebes sebagai Kabupaten yang 'BREBES BERES' (Berkeadaban, Ekonomi Tangguh, Responsif, Edukatif, Sehat, dan Sejahtera)".	Misi pilar "Sehat": Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Brebes yang sehat, tangguh, dan berdaya guna.	"Terwujudnya Sanitasi Inklusif Aman, Bersih, dan Berkelanjutan (SABER) berbasis Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna untuk mendukung 'BREBES BERES' yang Sehat dan Sejahtera."	Misi Sektor Air Limbah Domestik: 1. Meningkatkan akses layanan dan kualitas infrastruktur air limbah domestik yang aman dan inklusif; 2. Memperkuat Tata Kelola dan Kelembagaan Air Limbah yang Responsif, Profesional, dan Partisipatif; 3. Mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Inovatif dan Cerdas Berbasis Manajemen Risiko; 4. Mengakselerasi Pembangunan Air Limbah untuk Mendukung Ketahanan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. 5. Mewujudkan Perubahan Perilaku Higienis dan Sanitasi (PHBS) melalui Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat yang Sensitif Lokal.
	Misi pilar "Berkelanjutan" (implisit dalam 'BERES'): Mewujudkan pembangunan yang bersih, berkeadilan, berkemajuan dan berkelanjutan, dan pro-investasi, dengan pembangunan yang berpihak kepada rakyat kecil.		Misi Sektor Persampahan 1. Mewujudkan sistem pengelolaan persampahan yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan menekankan pada pengurangan sampah berbasis masyarakat dan digitalisasi sistem monitoring. 2. Memperkuat Tata Kelola dan Kelembagaan Persampahan yang Responsif, Profesional, dan Partisipatif; 3. Mengembangkan Sistem Pengelolaan Persampahan yang

VISI KABUPATEN BREBES	MISI KABUPATEN BREBES	VISI SANITASI KABUPATEN BREBES	MISI SANITASI KABUPATEN BREBES
			Inovatif dan Cerdas Berbasis Manajemen Risiko; 4. Mengakselerasi Pembangunan Persampahan untuk Mendukung Ketahanan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan.
	Misi pilar "Edukatif": Menjamin pendidikan yang merata terjangkau, dan berkeadilan untuk anak-anak kita. (termasuk edukasi PHBS).		Sektor Drainase Lingkungan 1. Menyelenggarakan sistem drainase yang terintegrasi, andal, dan berkelanjutan guna menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat serta bebas genangan.
	Misi pilar "Responsif": Pelayanan publik yang responsif dan ramah bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. (termasuk pada isu sanitasi dan lingkungan).		2. Memperkuat Tata Kelola dan Kelembagaan Drainase yang Responsif, Profesional, dan Partisipatif; 3. Mengakselerasi Pembangunan Drainase untuk Mendukung Ketahanan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan.
Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025			

3.2. Rencana Pengembangan Sanitasi

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Sesuai dengan visi dan misi Sanitasi Kabupaten Brebes maka pengembangan sanitasi Kabupaten Brebes difokuskan pada tiga sub sektor yaitu sub sektor air limbah, sub sektor persampahan dan sub sektor drainase. Tahap pengembangan untuk jangka pendek diarahkan untuk periode sampai dengan 2 tahun, sedangkan pengembangan jangka menengah diarahkan untuk periode sampai dengan 5 tahun, dan pengembangan jangka panjang diarahkan untuk periode sampai dengan 15 tahun, tapi tidak dibahas dalam dokumen SSK. Rencana ini secara langsung bertujuan untuk mengejawantahkan Visi: "Terwujudnya Sanitasi Aman, Bersih, dan Berkelanjutan (SABER) berbasis Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna untuk mendukung 'BREBES BERES' yang Sehat dan Sejahtera."

(4) Sektor Air Limbah Domestik (ALD)

Tujuan Sektor ALD: T.1. Mewujudkan Akses Sanitasi Layak bagi Seluruh Masyarakat dan Peningkatan Signifikan Akses Sanitasi Aman; dan T.2. Memperkuat Kelembagaan dan Penerapan Inovasi Pengelolaan Air Limbah yang Berkelanjutan.

Sasaran Sektor ALD (Tahun 2026-2030):

1. S.1.1 Meningkatkan persentase akses rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi layak dari 98,4% menjadi 100% pada akhir tahun 2027.
2. S.1.2 Meningkatkan persentase rumah tangga yang terlayani sanitasi aman dari 1,1% menjadi minimal 7% pada akhir tahun 2027 dan mencapai 15% pada akhir tahun 2029.
3. S.1.3 Membangun dan merehabilitasi 3.000 unit sambungan rumah (SR) baru ke SPALD-T di kawasan padat penduduk dan rawan kumuh hingga akhir tahun 2029.
4. S.2.1 Mendorong penyusunan kebijakan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik dalam bentuk Perda dan Produk Hukum lainnya
5. S.2.2 Mengintegrasikan sistem digitalisasi data monitoring kualitas air limbah dan pemetaan sanitasi Kabupaten Brebes yang dapat diakses oleh minimal 3 OPD terkait pada akhir tahun 2026.
6. S.2.3 Membentuk dan mengaktifkan minimal 5 KSM baru untuk mengelola SPALD-T komunal atau 1 UPT yang khusus menangani layanan lumpur tinja terjadwal di akhir tahun 2028.

Tabel III. 2 Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik

TUJUAN	SASARAN	DATA DASAR
(1)	(2)	(3)
T.1. Mewujudkan Akses Sanitasi Layak bagi Seluruh Masyarakat dan Peningkatan Signifikan Akses Sanitasi Aman.	S.1.1 Meningkatkan persentase akses rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi layak dari 98,4% menjadi 100% pada akhir tahun 2027.	1,6 % penduduk melakukan masih dalam kategori akses belum layak.
	S.1.2 Meningkatkan persentase rumah tangga yang terlayani sanitasi aman dari 1,1% menjadi minimal 7% pada akhir tahun 2027 dan mencapai 15% pada akhir tahun 2029.	Akses sanitasi aman pada tahun 2025 sebesar 1,1%.
	S.1.3 Membangun dan merehabilitasi 3.000 unit sambungan rumah (SR) baru ke SPALD-T di kawasan padat penduduk dan rawan kumuh hingga akhir tahun 2029.	Belum tersedia IPLT pada tahun 2025.
T.2. Memperkuat Kelembagaan dan Penerapan Inovasi Pengelolaan Air Limbah yang Berkelanjutan.	S.2.1 Mendorong penyusunan kebijakan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik dalam bentuk Perda dan Produk Hukum lainnya	Belum tersedia Perda tentang Air Limbah Domestik
	S.2.2 Mengintegrasikan sistem digitalisasi data monitoring kualitas air limbah dan pemetaan sanitasi Kabupaten Brebes yang dapat diakses oleh minimal 3 OPD terkait pada akhir tahun 2026.	Belum tersedia sistem digitalisasi data monitoring kualitas air limbah dan pemetaan sanitasi
	S.2.3 Membentuk dan mengaktifkan minimal 5 KSM baru untuk mengelola SPALD-T komunal atau 1 UPT yang khusus menangani layanan lumpur tinja terjadwal di akhir tahun 2028.	Belum tersedia kelembagaan yang menangani layanan lumpur tinja terjadwal

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

(5) *Sektor Pengelolaan Persampahan*

Tujuan Sektor Persampahan: T.1. Meningkatkan Layanan Pengurangan dan Penanganan Sampah yang Bersih, Efisien, dan Berbasis Lingkungan; dan T.2. Mendorong Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dan Lingkungan.

Sasaran Sektor Persampahan (Tahun 2026-2030):

- a. Pengelolaan Sampah Terpadu: Tercapainya 85% layanan pengumpulan sampah dan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada tahun 2029.
- b. Pencapaian Target: Tercapainya target pengolahan sampah sebesar 36,9% yang terdiri dari sampah terolah dan sampah terdaur ulang pada tahun 2029.
- c. Peningkatan Pengurangan Sampah: Meningkatnya partisipasi pemilahan sampah dan praktik 3R di tingkat rumah tangga, didukung oleh TPS3R dan Bank Sampah Induk/Unit yang aktif dan terintegrasi.
- d. Optimalisasi Penanganan Sampah: Meningkatnya kualitas pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah menuju standar controlled landfill atau sanitary landfill sesuai standar teknis Kementerian LHK.
- e. Perluasan Cakupan Layanan: Meningkatnya cakupan layanan pengumpulan sampah terkelola (diangkut ke TPS3R/TPA) di wilayah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Tabel III. 3 Tujuan dan Sasaran Persampahan

TUJUAN	SASARAN	DATA DASAR
(1)	(2)	(3)
T.1.Meningkatkan Layanan Pengurangan dan Penanganan Sampah yang Bersih, Efisien, dan Berbasis Lingkungan.	S.1.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah menuju standar controlled landfill atau sanitary landfill sesuai standar teknis Kementerian LHK.	TPA masih menggunakan <i>open dumping</i> dan pengelolaan belum optimal
	S.1.2 Meningkatkan persentase penanganan sampah menjadi 85% pada akhir tahun 2027 termasuk layanan pengumpulan sampah	Capaian pengumpulan limbah sampah yang terlayani pada tahun 2025 sebesar 34,4%.
	S.1.3 Meningkatkan capaian pengolahan sampah sebesar 36,9% yang terdiri dari sampah terolah dan sampah terdaur ulang pada tahun 2029.	Pemilahan sampah dan praktik 3R di tingkat rumah tangga belum dilakukan secara massal, terdapat TPS3R dan bank sampah

		yang tidak aktif pada tahun 2025.
	S.1.4 Mendirikan dan mengoperasikan bank sampah baru serta mengaktifkan kembali bank sampah yang tidak aktif di wilayah urban dan semi-urban, dengan melibatkan minimal 200 kepala keluarga hingga akhir tahun 2028.	Pengolahan sampah terdiri dari 2 % sampah terolah dan 1 % sampah terdaur ulang pada tahun 2025.
T.2. Meningkatkan Sistem Kelembagaan Persampahan dan Mendorong Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dan Lingkungan.	S.2.1 Meningkatnya penerapan perda pengolahan sampah	Penerapan Perda belum optimal
	S.2.2 Membuat skema insentif daerah bagi wilayah yang berhasil mencapai 100% bebas dari kegiatan buang sampah liar (zero open dumping) dan inovasi pemilahan dan pengolahan sampah di lingkungan.	Penerapan Perda belum optimal
	S.2.3 Meningkatnya partisipasi pemilahan sampah dan praktik 3R di tingkat rumah tangga, didukung oleh TPS3R dan Bank Sampah Induk/Unit yang aktif dan terintegrasi.	Partisipasi masyarakat belum optimal

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

3.2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi

Tahapan pengembangan sanitasi merupakan rencana pentahapan pembangunan sanitasi di Kabupaten Brebes mulai dari pelaksanaan sistem skala rumah sampai ke skala komunal dan kota, yang dituangkan dalam bentuk tabel serta digambarkan dalam bentuk peta zonasi sistem sanitasi. Tahapan pengembangan sanitasi dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:

- a. Tahapan jangka pendek: dihitung 2 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+2).
- b. Tahapan jangka menengah: dihitung 5 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+5).

Tahapan jangka menengah dirumuskan berdasarkan kebijakan sanitasi di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten dan hasil analisis zonasi pada Instrumen SSK.

(1) Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Brebes

Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Brebes memiliki 2 tahapan dengan fokus utama pada peningkatan kualitas akses sanitasi dengan target akses aman. Tahapan ini meliputi jangka pendek (2 tahun) dan jangka Panjang (5 tahun). Kondisi eksisting

menunjukkan capaian yang sangat baik dalam eliminasi BABS (0%) dan cakupan Akses Layak yang tinggi (98,4%), namun, tantangan utamanya ada dua: pertama, masih adanya 1,6% Akses Belum Layak, dan kedua, rendahnya Akses Aman yang baru mencapai 1,1%. Oleh karena itu, target Jangka Pendek sangat terfokus untuk menuntaskan masalah dasar, yaitu mencapai 100% Akses Layak dengan cara menghilangkan 1,6% Akses Belum Layak tersebut, sambil mulai meningkatkan Akses Aman menjadi 5,0%.

Setelah target 100% Akses Layak tercapai di Jangka Pendek, strategi di Jangka Menengah bergeser secara signifikan dari kuantitas cakupan menjadi peningkatan kualitas layanan. Hal ini terlihat jelas dari target Akses Aman yang dinaikkan secara drastis menjadi 15,0%. Ini menunjukkan bahwa setelah semua orang memiliki akses yang layak, prioritas program beralih untuk mengubah fasilitas Layak tersebut menjadi fasilitas Aman yang berstandar lebih tinggi (misalnya, tangki septik kedap dan rutin disedot), sambil tetap mempertahankan status 0% BABS.

Tabel III. 4 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)	Target Cakupan Layanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Akses Aman	1,1%	5,0%	15,0%
2	Akses Layak (Termasuk Aman)	98,4%	100,0%	100,0%
3	Akses Belum Layak	1,6%	0,0%	0,0%
4	BABS Tertutup	0,0%	0,0%	0,0%
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%
Total		100%	100%	100%

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Sistem pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat dan SPALD Terpusat. Dalam perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pentahapan pembangunan air limbah, pokja dapat menggunakan bantuan Instrumen SSK, dimana dalam instrumen tersebut terdapat tiga kemungkinan kondisi yang dapat diterapkan yaitu:

1. Kondisi 1 : Pengelolaan dengan Akses Dasar (tidak dilakukan karena target 100% layak)
2. Kondisi 2 : Pengelolaan dengan SPALD Setempat
3. Kondisi 3 : Pengelolaan dengan SPALD Terpusat

Pengelolaan dengan akses dasar adalah pengelolaan dengan praktik dasar sederhana yang layak untuk kawasan kepadatan rendah dan daerah dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah. Penerapan akses dasar tidak lagi dilakukan di Kabupaten Brebes lagi dilakukan karena masuk dalam kategori tidak layak. Target jangka pendek adalah 100% akses sanitasi layak.

SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Berdasarkan kapasitas pengolahannya SPALD-S terdiri atas Skala individual dan Skala komunal (2-10 rumah tinggal/bangunan).

SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Berdasarkan cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas: Skala perkotaan, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa; Skala permukiman, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa; Skala kawasan tertentu, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Dalam rangka penanganan pengelolaan air limbah domestik, perlu di susun sebuah rencana. Penentuan sistem sanitasi air limbah domestik dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut: kepadatan penduduk, fungsi perkotaan/pedesaan, dan faktor permasalahan air tanah. Area (kelurahan/desa) yang memiliki karakteristik/sistem yang sama dikelompokkan dalam 1 (satu) zona. Adapun faktor yang juga perlu diperhatikan dalam menentukan zona adalah: topografi, geografi dan area beresiko. Penentuan zona air limbah di Kabupaten Brebes didasarkan pada faktor kepadatan penduduk, klasifikasi dan indeks resiko sanitasi air limbah sesuai hasil dari instrument SSK. Adapun jumlah desa/kelurahan berdasarkan zona sistem air limbah domestik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 5 Zona Sistem Air Limbah Domestik

No.	KECAMATAN	DESA	ZONAALD
1	Salem	Gunungjaya	SPALDS
2	Salem	Indrajaya	SPALDS
3	Salem	Banjaran	SPALDS
4	Salem	Salem	SPALDS
5	Salem	Gununglarang	SPALDS
6	Salem	Gunungsugih	SPALDS
7	Salem	Ganggawang	SPALDS
8	Salem	Citimbang	SPALDS
9	Salem	Kadumanis	SPALDS
10	Salem	Gandoang	SPALDS
11	Salem	Ciputih	SPALDS
12	Salem	Bentarsari	SPALDS
13	Salem	Bentar	SPALDS
14	Salem	Pabuaran	SPALDS
15	Salem	Tembongraja	SPALDS
16	Salem	Gunungtajem	SPALDS
17	Salem	Windusakti	SPALDS
18	Salem	Winduasri	SPALDS
19	Salem	Capar	SPALDS
20	Salem	Wanoja	SPALDS
21	Salem	Pasirpanjang	SPALDS
22	Bantarkawung	Cinanas	SPALDS
23	Bantarkawung	Banjarsari	SPALDS
24	Bantarkawung	Cibentang	SPALDS
25	Bantarkawung	Talaga	SPALDS
26	Bantarkawung	Karangpari	SPALDS
27	Bantarkawung	Waru	SPALDS
28	Bantarkawung	Pangebatan	SPALDS
29	Bantarkawung	Ciomas	SPALDS
30	Bantarkawung	Tambakserang	SPALDS
31	Bantarkawung	Legok	SPALDS
32	Bantarkawung	Terlaya	SPALDS
33	Bantarkawung	Jipang	SPALDS
34	Bantarkawung	Bantarkawung	SPALDS
35	Bantarkawung	Bangbayang	SPALDT
36	Bantarkawung	Bantarwaru	SPALDS
37	Bantarkawung	Sindangwangi	SPALDS
38	Bantarkawung	Pengarasan	SPALDS
39	Bantarkawung	Kebandungan	SPALDS
40	Bumiayu	Pruwatan	SPALDS
41	Bumiayu	Laren	SPALDS
42	Bumiayu	Jatisawit	SPALDS

No.	KECAMATAN	DESA	ZONAALD
43	Losari	Jatisawit	SPALDS
44	Bumiayu	Negaradaha	SPALDS
45	Bumiayu	Kalierang	SPALDS
46	Bumiayu	Langkap	SPALDS
47	Bumiayu	Adisana	SPALDS
48	Bumiayu	Penggarutan	SPALDS
49	Bumiayu	Dukuhturi	SPALDS
50	Ketanggungan	Dukuhturi	SPALDS
51	Bumiayu	Bumiayu	SPALDS
52	Bumiayu	Kaliwadas	SPALDS
53	Bumiayu	Pamijen	SPALDS
54	Bumiayu	Kalisumur	SPALDS
55	Bumiayu	Kalilangkap	SPALDS
56	Bumiayu	Kalinusu	SPALDS
57	Paguyangan	Kedungoleng	SPALDS
58	Paguyangan	Winduaji	SPALDS
59	Paguyangan	Wanatirta	SPALDS
60	Paguyangan	Paguyangan	SPALDS
61	Paguyangan	Pakujati	SPALDS
62	Paguyangan	Taraban	SPALDS
63	Paguyangan	Pagojengan	SPALDS
64	Paguyangan	Kretek	SPALDS
65	Paguyangan	Ragatunjung	SPALDS
66	Paguyangan	Cilibur	SPALDS
67	Paguyangan	Cipetung	SPALDS
68	Paguyangan	Pandansari	SPALDS
69	Sirampog	Wanareja	SPALDS
70	Sirampog	Igirk lanceng	SPALDS
71	Sirampog	Dawuhan	SPALDS
72	Sirampog	Batursari	SPALDS
73	Sirampog	Kaligiri	SPALDS
74	Sirampog	Sridadi	SPALDS
75	Sirampog	Plompong	SPALDS
76	Sirampog	Benda	SPALDS
77	Sirampog	Kaliloka	SPALDS
78	Sirampog	Manggis	SPALDS
79	Sirampog	Mlayang	SPALDS
80	Sirampog	Mendala	SPALDS
81	Sirampog	Buniwah	SPALDS
82	Tonjong	Kalijurang	SPALDS
83	Tonjong	Galuh timur	SPALDS
84	Tonjong	Kutamendala	SPALDS
85	Tonjong	Karangjengkeng	SPALDT
86	Tonjong	Tonjong	SPALDS
87	Tonjong	Pepedan	SPALDS

No.	KECAMATAN	DESA	ZONAALD
88	Tonjong	Linggapura	SPALDS
89	Tonjong	Negarayu	SPALDS
90	Tonjong	Tanggeran	SPALDS
91	Tonjong	Purwodadi	SPALDS
92	Tonjong	Purbayasa	SPALDS
93	Tonjong	Watujaya	SPALDS
94	Tonjong	Kutayu	SPALDS
95	Tonjong	Raja Wetan	SPALDS
96	Larangan	Kamal	SPALDS
97	Larangan	Wlahar	SPALDS
98	Larangan	Pamulihan	SPALDS
99	Larangan	Kedungbikor	SPALDS
100	Larangan	Larangan	SPALDS
101	Larangan	Karangbale	SPALDS
102	Larangan	Luwunggede	SPALDS
103	Tanjung	Luwunggede	SPALDS
104	Larangan	Slati	SPALDS
105	Larangan	Sitanggal	SPALDS
106	Larangan	Siandong	SPALDS
107	Larangan	Rengaspendawa	SPALDS
108	Ketanggungan	Jemasih	SPALDS
109	Ketanggungan	Ciseureuh	SPALDS
110	Kersana	Sindangjaya	SPALDS
111	Ketanggungan	Sindangjaya	SPALDS
112	Ketanggungan	Pamedaran	SPALDS
113	Ketanggungan	Cikeusal Kidul	SPALDS
114	Ketanggungan	Cikeusal Lor	SPALDS
115	Ketanggungan	Buara	SPALDS
116	Ketanggungan	Karangbandung	SPALDS
117	Ketanggungan	Baros	SPALDS
118	Ketanggungan	Kubangsari	SPALDS
119	Ketanggungan	Kubangwungu	SPALDT
120	Ketanggungan	Tanggungsari	SPALDS
121	Ketanggungan	Dukuhbadag	SPALDS
122	Ketanggungan	Kubangjati	SPALDS
123	Ketanggungan	Karangmalang	SPALDS
124	Ketanggungan	Dukuhtengah	SPALDS
125	Ketanggungan	Ketanggungan	SPALDS
126	Ketanggungan	Bulakkelor	SPALDS
127	Ketanggungan	Padakaton	SPALDS
128	Ketanggungan	Ciduwet	SPALDS
129	Banjarharjo	Sindangheula	SPALDS
130	Banjarharjo	Blandongan	SPALDS
131	Banjarharjo	Kertasari	SPALDS
132	Banjarharjo	Bandungsari	SPALDS

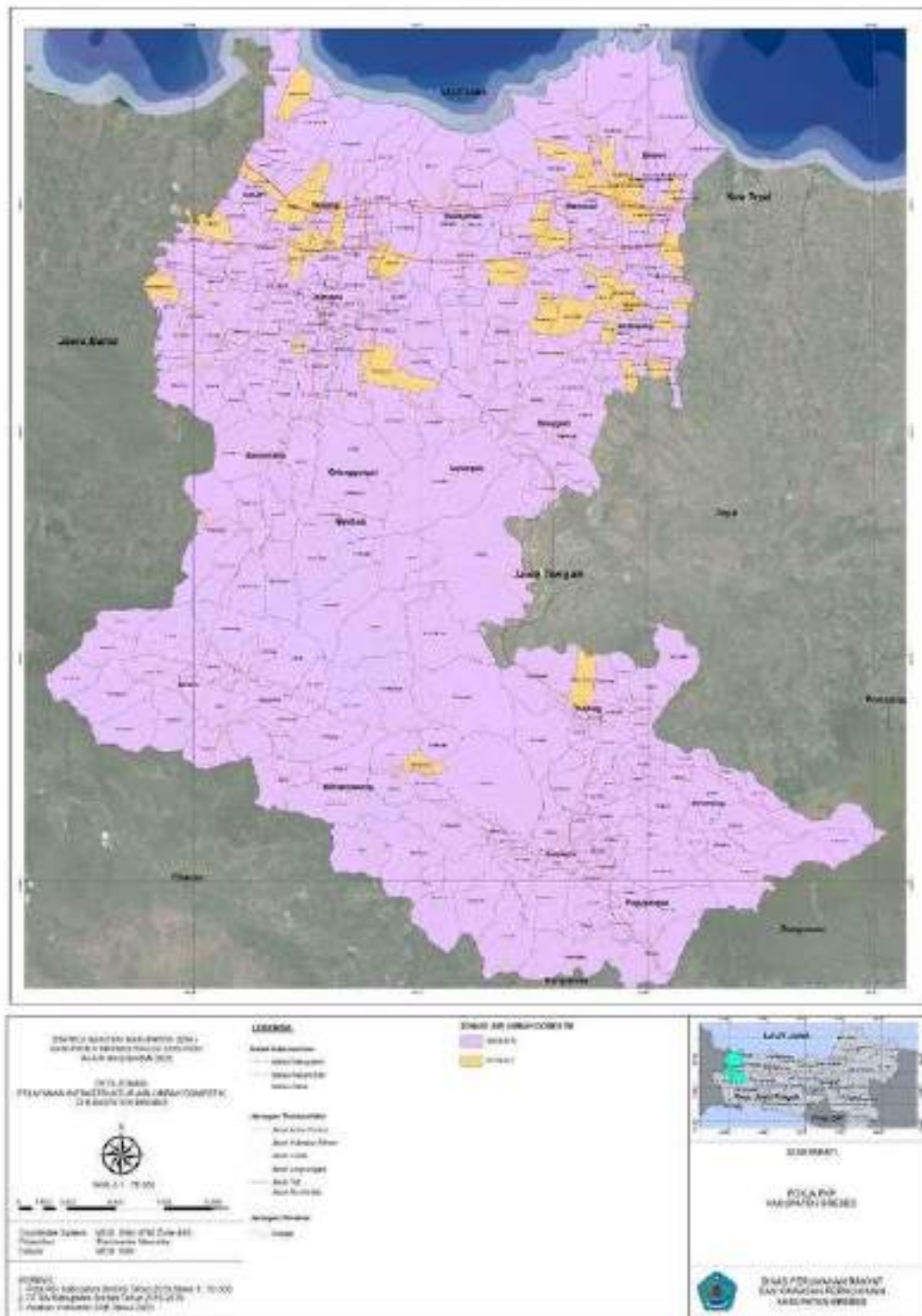
No.	KECAMATAN	DESA	ZONAALD
133	Banjarharjo	Cipanjang	SPALDS
134	Banjarharjo	Penanggapan	SPALDS
135	Banjarharjo	Malahayu	SPALDS
136	Banjarharjo	Cikuya	SPALDS
137	Banjarharjo	Banjarharjo	SPALDS
138	Banjarharjo	Parereja	SPALDS
139	Banjarharjo	Cigadung	SPALDS
140	Banjarharjo	Tiwulandu	SPALDS
141	Banjarharjo	Cikakak	SPALDS
142	Banjarharjo	Cibendung	SPALDS
143	Banjarharjo	Karangmaja	SPALDS
144	Banjarharjo	Dukuhjeruk	SPALDS
145	Banjarharjo	Pende	SPALDS
146	Kersana	Pende	SPALDS
147	Banjarharjo	Sukareja	SPALDS
148	Banjarharjo	Kubangjero	SPALDS
149	Banjarharjo	Cibuniwangi	SPALDS
150	Banjarharjo	Cimunding	SPALDS
151	Banjarharjo	Ciawi	SPALDS
152	Banjarharjo	Cihaur	SPALDS
153	Banjarharjo	Tegalreja	SPALDS
154	Banjarharjo	Banjar Lor	SPALDS
155	Losari	Randegan	SPALDS
156	Losari	Karangsambung	SPALDT
157	Losari	Negla	SPALDS
158	Losari	Bojongsari	SPALDS
159	Losari	Karangjunti	SPALDS
160	Losari	Rungkang	SPALDS
161	Losari	Dukuhsalam	SPALDS
162	Losari	Babakan	SPALDS
163	Losari	Kalibuntu	SPALDT
164	Losari	Kedungneng	SPALDS
165	Losari	Randusari	SPALDS
166	Losari	Blubuk	SPALDS
167	Losari	Pekauman	SPALDS
168	Losari	Losari Kidul	SPALDT
169	Losari	Losari Lor	SPALDS
170	Losari	Kecipir	SPALDS
171	Losari	Pengabean	SPALDS
172	Kersana	Limbangan	SPALDS
173	Losari	Limbangan	SPALDS
174	Losari	Prapag Kidul	SPALDS
175	Losari	Karangdempel	SPALDT
176	Losari	Prapag Lor	SPALDS
177	Tanjung	Sarireja	SPALDS

No.	KECAMATAN	DESA	ZONAALD
178	Tanjung	Kubangputat	SPALDS
179	Tanjung	Mundu	SPALDS
180	Tanjung	Luwungbata	SPALDS
181	Tanjung	Karangreja	SPALDT
182	Tanjung	Sidakaton	SPALDS
183	Tanjung	Sengon	SPALDT
184	Tanjung	Kedawung	SPALDS
185	Tanjung	Tegongan	SPALDS
186	Tanjung	Kemurang Wetan	SPALDS
187	Tanjung	Kemurang Kulon	SPALDS
188	Tanjung	Krakahan	SPALDS
189	Tanjung	Pejagan	SPALDS
190	Tanjung	Pengaradan	SPALDS
191	Tanjung	Tanjung	SPALDT
192	Tanjung	Lemahabang	SPALDS
193	Tanjung	Tengguli	SPALDT
194	Kersana	Kradenan	SPALDT
195	Kersana	Kubangpari	SPALDS
196	Kersana	Cikandang	SPALDS
197	Kersana	Cigedog	SPALDS
198	Kersana	Ciampel	SPALDS
199	Kersana	Jagapura	SPALDS
200	Kersana	Kersana	SPALDS
201	Kersana	Kemukten	SPALDS
202	Kersana	Kramatsimpang	SPALDT
203	Kersana	Sutamaja	SPALDT
204	Bulakamba	Tegalglagah	SPALDS
205	Bulakamba	Petunjungan	SPALDT
206	Bulakamba	Jubang	SPALDS
207	Bulakamba	Dukuhlo	SPALDT
208	Bulakamba	Cipelem	SPALDS
209	Bulakamba	Banjaratma	SPALDS
210	Bulakamba	Siwuluh	SPALDS
211	Bulakamba	Luwungragi	SPALDT
212	Bulakamba	Bangsri	SPALDS
213	Bulakamba	Rancawuluh	SPALDS
214	Bulakamba	Bulusari	SPALDS
215	Bulakamba	Karangsari	SPALDS
216	Bulakamba	Kluwut	SPALDS
217	Bulakamba	Bulakparen	SPALDS
218	Bulakamba	Cimohong	SPALDS
219	Bulakamba	Griting	SPALDS
220	Bulakamba	Bulakamba	SPALDS
221	Bulakamba	Pakijangan	SPALDS
222	Bulakamba	Pulogading	SPALDS

No.	KECAMATAN	DESA	ZONAALD
223	Wanasari	Tegalgandu	SPALDT
224	Wanasari	Jagalempeni	SPALDT
225	Wanasari	Glonggong	SPALDT
226	Wanasari	Sisalam	SPALDS
227	Wanasari	Lengkong	SPALDT
228	Wanasari	Tanjungsari	SPALDS
229	Wanasari	Siwungkuk	SPALDT
230	Wanasari	Dukuhwringin	SPALDS
231	Wanasari	Sigentong	SPALDT
232	Wanasari	Sidamulya	SPALDS
233	Wanasari	Wanasari	SPALDS
234	Wanasari	Siasem	SPALDS
235	Wanasari	Klampok	SPALDS
236	Wanasari	Pebatan	SPALDS
237	Wanasari	Pesantunan	SPALDT
238	Wanasari	Keboledan	SPALDS
239	Wanasari	Kupu	SPALDT
240	Wanasari	Dumeling	SPALDT
241	Wanasari	Kertabesuki	SPALDS
242	Wanasari	Sawojajar	SPALDS
243	Songgom	Songgom	SPALDS
244	Songgom	Songgom Lor	SPALDS
245	Songgom	Gegerkunci	SPALDS
246	Songgom	Jatimakmur	SPALDS
247	Songgom	Jatirokeh	SPALDS
248	Songgom	Cenang	SPALDS
249	Songgom	Wanatawang	SPALDS
250	Songgom	Wanacala	SPALDS
251	Songgom	Karangsembung	SPALDS
252	Songgom	Dukuhmaja	SPALDT
253	Jatibarang	Kebogadung	SPALDS
254	Jatibarang	Kebonagung	SPALDS
255	Jatibarang	Klampis	SPALDS
256	Jatibarang	Kemiriamba	SPALDS
257	Jatibarang	Jatibarang Kidul	SPALDT
258	Jatibarang	Karanglo	SPALDS
259	Jatibarang	Tegalwulung	SPALDS
260	Jatibarang	Jatibarang Lor	SPALDS
261	Jatibarang	Pamengger	SPALDT
262	Jatibarang	Kertasinduyasa	SPALDS
263	Jatibarang	Janegara	SPALDS
264	Jatibarang	Kendawa	SPALDS
265	Jatibarang	Klikiran	SPALDS
266	Jatibarang	Bojong	SPALDT
267	Jatibarang	Buaran	SPALDT

No.	KECAMATAN	DESA	ZONAALD
268	Jatibarang	Kedungtukang	SPALDT
269	Jatibarang	Rengasbandung	SPALDT
270	Jatibarang	Tembelang	SPALDS
271	Jatibarang	Pedeslohor	SPALDT
272	Jatibarang	Kramat	SPALDS
273	Jatibarang	Kalipucang	SPALDS
274	Jatibarang	Kalialang	SPALDT
275	Brebes	Pemaron	SPALDS
276	Brebes	Kalimati	SPALDS
277	Brebes	Lembarawa	SPALDT
278	Brebes	Krasak	SPALDS
279	Brebes	Padasugih	SPALDS
280	Brebes	Wangandalem	SPALDS
281	Brebes	Terlangu	SPALDS
282	Brebes	Pulosari	SPALDS
283	Brebes	Kelurahan Brebes	SPALDT
284	Brebes	Kelurahan Gandasuli	SPALDT
285	Brebes	Banjaranyar	SPALDS
286	Brebes	Kaligangsa Kulon	SPALDT
287	Brebes	Kaligangsa Wetan	SPALDS
288	Brebes	Randusanga Wetan	SPALDS
289	Brebes	Randusanga Kulon	SPALDS
290	Brebes	Kelurahan Limbangan Wetan	SPALDS
291	Brebes	Kelurahan Limbangan Kulon	SPALDS
292	Brebes	Kelurahan Pasarbatang	SPALDT
293	Brebes	Sigambir	SPALDT
294	Brebes	Pagejukan	SPALDS
295	Brebes	Kedunguter	SPALDS
296	Brebes	Tengki	SPALDS
297	Brebes	Kaliwlingi	SPALDS

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025



Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Peta 3. 1 Peta Zona Sistem Air Limbah Domestik

(2) *Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten*

Pengembangan Persampahan Kabupaten Brebes memiliki 2 tahapan dengan fokus utama pada peningkatan kualitas akses sanitasi dengan target akses aman. Tahapan ini meliputi jangka pendek (2 tahun) dan jangka Panjang (5 tahun). Kondisi eksisting menunjukkan tantangan besar, di mana Layanan Pengumpulan Sampah baru mencapai 34,4%, yang berarti mayoritas (65,6%) sampah di wilayah tersebut belum terkelola oleh sistem formal. Dari sampah yang terkumpul, tingkat pengolahan (Sampah Terolah) sangat minim, hanya 3,0%. Oleh karena itu, target Jangka Pendek sangat agresif, yakni melipatgandakan Layanan Pengumpulan menjadi 68,4%. Peningkatan drastis ini akan dicapai dengan membangun kapasitas pengolahan sampah secara masif (Sampah Terolah naik menjadi 28,9%) dan sisanya akan dialokasikan sebagai Residu di LUR (39,5%).

Pada Jangka Menengah, strategi ini terus dilanjutkan dengan target Layanan Pengumpulan Sampah yang hampir universal, yaitu mencapai 85,0%. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan kapasitas Sampah Terolah yang berkelanjutan hingga 36,9%, sementara sisa sampah yang terkumpul akan dikelola sebagai Residu di LUR (48,1%). Secara keseluruhan, tabel ini menggarisbawahi dua prioritas utama: pertama, memperluas jangkauan layanan untuk mengangkut sampah yang sebelumnya tidak terkelola, dan kedua, secara bersamaan membangun sistem pengolahan di hulu (seperti TPST/3R) agar tidak semua sampah yang diangkut hanya berakhir di TPA..

Tabel III. 6 Tahapan Pengembangan Persampahan

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)	Target Cakupan Layanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Layanan Pengumpulan Sampah	34,4%	68,4%	85,0%
2	Sampah Terolah	3,0%	28,9%	36,9%
3	Residu di LUR	15,4%	39,5%	48,1%
Total		100%	100%	100%

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor. 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, sistem pengelolaan persampahan terbagi atas upaya pengurangan dan penanganan. Dalam perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pentahapan pengembangan persampahan, pokja dapat menggunakan bantuan Instrumen SSK, dimana dalam instrumen tersebut terdapat tiga kemungkinan kondisi yang dapat diterapkan yaitu:

1. Kondisi 1 : Penanganan sampah mandiri
2. Kondisi 2 : Penanganan sampah terangkut ke TPA dengan atau tanpa upaya pengurangan

Penanganan mandiri adalah sistem penanganan sampah yang dikelola mandiri oleh masyarakat di wilayah perdesaan. Penangan ini hanya dapat diaplikasikan pada wilayah dengan kriteria: Klasifikasi wilayah perdesaan; Kepadatan penduduk kurang dari 20 jiwa/hektar; Lokasi tidak berdekatan atau tidak terjangkau dengan wilayah pelayanan persampahan.

Kelurahan atau desa dengan kriteria selain yang disebutkan di atas, sesuai dengan kondisi eksisting juga, akan dilakukan penanganan persampahan dengan pengangkutan ke TPA dengan atau tanpa dilaksanakan upaya pengurangan dengan pendekatan infrastruktur TPS3R. Adapun jumlah desa/kelurahan berdasarkan zona persampahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 7 Zona Sistem Persampahan

No.	KECAMATAN	DESA	ZONASI PERSAMPAHAN
1	Salem	Banjaran	TERLAYANI
2	Salem	Salem	TERLAYANI
3	Salem	Ganggawang	TERLAYANI
4	Salem	Ciputih	TERLAYANI
5	Salem	Bentarsari	TERLAYANI
6	Salem	Bentar	TERLAYANI
7	Salem	Pabuaran	TERLAYANI
8	Salem	Tembongraja	TERLAYANI
9	Salem	Gunungtajem	TERLAYANI
10	Salem	Windusakti	TERLAYANI
11	Salem	Winduasri	TERLAYANI
12	Salem	Pasirpanjang	TERLAYANI
13	Bantarkawung	Cinanas	TERLAYANI
14	Bantarkawung	Banjarsari	TERLAYANI
15	Bantarkawung	Cibentang	TERLAYANI
16	Bantarkawung	Talaga	TERLAYANI
17	Bantarkawung	Karangpari	TERLAYANI
18	Bantarkawung	Waru	TERLAYANI
19	Bantarkawung	Pangebatan	TERLAYANI
20	Bantarkawung	Tambakserang	TERLAYANI
21	Bantarkawung	Terlaya	TERLAYANI
22	Bantarkawung	Jipang	TERLAYANI
23	Bantarkawung	Bantarkawung	TERLAYANI
24	Bantarkawung	Bangbayang	TERLAYANI

No.	KECAMATAN	DESA	ZONASI PERSAMPAHAN
25	Bantarkawung	Bantarwaru	TERLAYANI
26	Bantarkawung	Sindangwangi	TERLAYANI
27	Bantarkawung	Pengarasan	TERLAYANI
28	Bantarkawung	Kebandungan	TERLAYANI
29	Bumiayu	Pruwatan	TERLAYANI
30	Bumiayu	Laren	TERLAYANI
31	Bumiayu	Jatisawit	TERLAYANI
32	Losari	Jatisawit	TERLAYANI
33	Bumiayu	Negaradaha	TERLAYANI
34	Bumiayu	Kalierang	TERLAYANI
35	Bumiayu	Langkap	TERLAYANI
36	Bumiayu	Adisana	TERLAYANI
37	Bumiayu	Penggarutan	TERLAYANI
38	Bumiayu	Dukuhturi	TERLAYANI
39	Ketanggungan	Dukuhturi	TERLAYANI
40	Bumiayu	Bumiayu	TERLAYANI
41	Bumiayu	Kaliwadas	TERLAYANI
42	Bumiayu	Pamijen	TERLAYANI
43	Bumiayu	Kalisumur	TERLAYANI
44	Bumiayu	Kalilangkap	TERLAYANI
45	Bumiayu	Kalinusu	TERLAYANI
46	Paguyangan	Kedungoleng	TERLAYANI
47	Paguyangan	Winduaji	TERLAYANI
48	Paguyangan	Wanatirta	TERLAYANI
49	Paguyangan	Paguyangan	TERLAYANI
50	Paguyangan	Pakujati	TERLAYANI
51	Paguyangan	Taraban	TERLAYANI
52	Paguyangan	Pagojengan	TERLAYANI
53	Paguyangan	Kretek	TERLAYANI
54	Paguyangan	Ragatunjung	TERLAYANI
55	Paguyangan	Cilibur	TERLAYANI
56	Paguyangan	Pandansari	TERLAYANI
57	Sirampog	Wanareja	TERLAYANI
58	Sirampog	Igirklandeng	TERLAYANI
59	Sirampog	Dawuhan	TERLAYANI
60	Sirampog	Batursari	TERLAYANI
61	Sirampog	Kaligiri	TERLAYANI
62	Sirampog	Sridadi	TERLAYANI
63	Sirampog	Plompong	TERLAYANI
64	Sirampog	Benda	TERLAYANI
65	Sirampog	Kaliloka	TERLAYANI
66	Sirampog	Manggis	TERLAYANI
67	Sirampog	Mlayang	TERLAYANI
68	Sirampog	Mendala	TERLAYANI
69	Sirampog	Buniwah	TERLAYANI
70	Tonjong	Kalijurang	TERLAYANI
71	Tonjong	Kutamendala	TERLAYANI
72	Tonjong	Karangjengkeng	TERLAYANI
73	Tonjong	Tonjong	TERLAYANI
74	Tonjong	Pepedan	TERLAYANI
75	Tonjong	Linggapura	TERLAYANI

No.	KECAMATAN	DESA	ZONASI PERSAMPAHAN
76	Tonjong	Negarayu	TERLAYANI
77	Tonjong	Tanggeran	TERLAYANI
78	Tonjong	Purwodadi	TERLAYANI
79	Tonjong	Purbayasa	TERLAYANI
80	Tonjong	Watujaya	TERLAYANI
81	Larangan	Kamal	TERLAYANI
82	Larangan	Wlahar	TERLAYANI
83	Larangan	Pamulihan	TERLAYANI
84	Larangan	Larangan	TERLAYANI
85	Larangan	Karangbale	TERLAYANI
86	Larangan	Luwunggede	TERLAYANI
87	Tanjung	Luwunggede	TERLAYANI
88	Larangan	Slati	TERLAYANI
89	Larangan	Siandong	TERLAYANI
90	Larangan	Rengaspendawa	TERLAYANI
91	Ketanggungan	Ciseureuh	TERLAYANI
92	Ketanggungan	Pamedaran	TERLAYANI
93	Ketanggungan	Cikeusal Lor	TERLAYANI
94	Ketanggungan	Karangbandung	TERLAYANI
95	Ketanggungan	Baros	TERLAYANI
96	Ketanggungan	Kubangwungu	TERLAYANI
97	Ketanggungan	Tanggungsari	TERLAYANI
98	Ketanggungan	Dukuhbadag	TERLAYANI
99	Ketanggungan	Karangmalang	TERLAYANI
100	Ketanggungan	Dukuhtengah	TERLAYANI
101	Ketanggungan	Ketanggungan	TERLAYANI
102	Ketanggungan	Ciduwet	TERLAYANI
103	Banjarharjo	Sindangheula	TERLAYANI
104	Banjarharjo	Blandongan	TERLAYANI
105	Banjarharjo	Bandungsari	TERLAYANI
106	Banjarharjo	Penanggapan	TERLAYANI
107	Banjarharjo	Parereja	TERLAYANI
108	Banjarharjo	Cigadung	TERLAYANI
109	Banjarharjo	Cikakak	TERLAYANI
110	Banjarharjo	Karangmaja	TERLAYANI
111	Banjarharjo	Dukuhjeruk	TERLAYANI
112	Banjarharjo	Pende	TERLAYANI
113	Kersana	Pende	TERLAYANI
114	Banjarharjo	Kubangjero	TERLAYANI
115	Banjarharjo	Cibuniwangi	TERLAYANI
116	Banjarharjo	Ciawi	TERLAYANI
117	Banjarharjo	Cihaur	TERLAYANI
118	Banjarharjo	Tegalreja	TERLAYANI
119	Losari	Karangsambung	TERLAYANI
120	Losari	Negla	TERLAYANI
121	Losari	Rungkang	TERLAYANI
122	Losari	Dukuhsalam	TERLAYANI
123	Losari	Kedungneng	TERLAYANI
124	Losari	Randusari	TERLAYANI
125	Losari	Blubuk	TERLAYANI
126	Losari	Losari Lor	TERLAYANI

No.	KECAMATAN	DESA	ZONASI PERSAMPAHAN
127	Losari	Pengabean	TERLAYANI
128	Kersana	Limbangan	TERLAYANI
129	Losari	Limbangan	TERLAYANI
130	Losari	Prapag Kidul	TERLAYANI
131	Losari	Karangdempel	TERLAYANI
132	Losari	Prapag Lor	TERLAYANI
133	Tanjung	Sarireja	TERLAYANI
134	Tanjung	Kubangputat	TERLAYANI
135	Tanjung	Mundu	TERLAYANI
136	Tanjung	Luwungbata	TERLAYANI
137	Tanjung	Karangreja	TERLAYANI
138	Tanjung	Sidakaton	TERLAYANI
139	Tanjung	Sengon	TERLAYANI
140	Tanjung	Kedawung	TERLAYANI
141	Tanjung	Tegongan	TERLAYANI
142	Tanjung	Kemurang Wetan	TERLAYANI
143	Tanjung	Kemurang Kulon	TERLAYANI
144	Tanjung	Krakahan	TERLAYANI
145	Tanjung	Pejagan	TERLAYANI
146	Tanjung	Pengaradan	TERLAYANI
147	Tanjung	Tanjung	TERLAYANI
148	Tanjung	Tengguli	TERLAYANI
149	Kersana	Kradenan	TERLAYANI
150	Kersana	Kubangpari	TERLAYANI
151	Kersana	Cikandang	TERLAYANI
152	Kersana	Cigedog	TERLAYANI
153	Kersana	Ciampel	TERLAYANI
154	Kersana	Jagapura	TERLAYANI
155	Kersana	Kersana	TERLAYANI
156	Kersana	Kemukten	TERLAYANI
157	Kersana	Kramatsimpang	TERLAYANI
158	Kersana	Sutamaja	TERLAYANI
159	Bulakamba	Tegalglagah	TERLAYANI
160	Bulakamba	Petunjungan	TERLAYANI
161	Bulakamba	Jubang	TERLAYANI
162	Bulakamba	Dukuhlo	TERLAYANI
163	Bulakamba	Cipelem	TERLAYANI
164	Bulakamba	Banjaratma	TERLAYANI
165	Bulakamba	Siwuluh	TERLAYANI
166	Bulakamba	Luwungragi	TERLAYANI
167	Bulakamba	Bangsri	TERLAYANI
168	Bulakamba	Rancawuluh	TERLAYANI
169	Bulakamba	Bulusari	TERLAYANI
170	Bulakamba	Karangsari	TERLAYANI
171	Bulakamba	Kluwut	TERLAYANI
172	Bulakamba	Bulakparen	TERLAYANI
173	Bulakamba	Cimohong	TERLAYANI
174	Bulakamba	Griting	TERLAYANI
175	Bulakamba	Bulakamba	TERLAYANI
176	Bulakamba	Pakijangan	TERLAYANI
177	Bulakamba	Pulogading	TERLAYANI

No.	KECAMATAN	DESA	ZONASI PERSAMPAHAN
178	Wanasari	Tegalgandu	TERLAYANI
179	Wanasari	Jagalempeni	TERLAYANI
180	Wanasari	Sisalam	TERLAYANI
181	Wanasari	Lengkong	TERLAYANI
182	Wanasari	Tanjungsari	TERLAYANI
183	Wanasari	Siwungkuk	TERLAYANI
184	Wanasari	Dukuhwringin	TERLAYANI
185	Wanasari	Sigentong	TERLAYANI
186	Wanasari	Sidamulya	TERLAYANI
187	Wanasari	Wanasari	TERLAYANI
188	Wanasari	Siasem	TERLAYANI
189	Wanasari	Klampok	TERLAYANI
190	Wanasari	Pebatan	TERLAYANI
191	Wanasari	Pesantunan	TERLAYANI
192	Wanasari	Keboledan	TERLAYANI
193	Wanasari	Kupu	TERLAYANI
194	Wanasari	Dumeling	TERLAYANI
195	Wanasari	Kertabesuki	TERLAYANI
196	Wanasari	Sawojajar	TERLAYANI
197	Songgom	Songgom	TERLAYANI
198	Songgom	Songgom Lor	TERLAYANI
199	Songgom	Gegerkunci	TERLAYANI
200	Songgom	Jatimakmur	TERLAYANI
201	Songgom	Jatirokeh	TERLAYANI
202	Songgom	Cenang	TERLAYANI
203	Songgom	Wanatawang	TERLAYANI
204	Songgom	Wanacala	TERLAYANI
205	Songgom	Karangsembung	TERLAYANI
206	Songgom	Dukuhmaja	TERLAYANI
207	Jatibarang	Kebogadung	TERLAYANI
208	Jatibarang	Kebonagung	TERLAYANI
209	Jatibarang	Klampis	TERLAYANI
210	Jatibarang	Kemiriamba	TERLAYANI
211	Jatibarang	Jatibarang Kidul	TERLAYANI
212	Jatibarang	Karanglo	TERLAYANI
213	Jatibarang	Tegalwulung	TERLAYANI
214	Jatibarang	Jatibarang Lor	TERLAYANI
215	Jatibarang	Pamengger	TERLAYANI
216	Jatibarang	Kertasinduyasa	TERLAYANI
217	Jatibarang	Janegara	TERLAYANI
218	Jatibarang	Kendawa	TERLAYANI
219	Jatibarang	Klikiran	TERLAYANI
220	Jatibarang	Bojong	TERLAYANI
221	Jatibarang	Buaran	TERLAYANI
222	Jatibarang	Kedungtukang	TERLAYANI
223	Jatibarang	Rengasbandung	TERLAYANI
224	Jatibarang	Tembelang	TERLAYANI
225	Jatibarang	Pedeslohor	TERLAYANI
226	Jatibarang	Kramat	TERLAYANI
227	Jatibarang	Kalipucang	TERLAYANI
228	Jatibarang	Kalialang	TERLAYANI

No.	KECAMATAN	DESA	ZONASI PERSAMPAHAN
229	Brebes	Pemaron	TERLAYANI
230	Brebes	Kalimati	TERLAYANI
231	Brebes	Lembarawa	TERLAYANI
232	Brebes	Krasak	TERLAYANI
233	Brebes	Padasugih	TERLAYANI
234	Brebes	Wangandalem	TERLAYANI
235	Brebes	Terlangu	TERLAYANI
236	Brebes	Pulosari	TERLAYANI
237	Brebes	Kelurahan Brebes	TERLAYANI
238	Brebes	Kelurahan Gandasuli	TERLAYANI
239	Brebes	Banjaranyar	TERLAYANI
240	Brebes	Kaligangsa Kulon	TERLAYANI
241	Brebes	Kaligangsa Wetan	TERLAYANI
242	Brebes	Randusanga Wetan	TERLAYANI
243	Brebes	Randusanga Kulon	TERLAYANI
244	Brebes	Kelurahan Limbangan Wetan	TERLAYANI
245	Brebes	Kelurahan Limbangan Kulon	TERLAYANI
246	Brebes	Kelurahan Pasarbatang	TERLAYANI
247	Brebes	Sigambir	TERLAYANI
248	Brebes	Pagejungan	TERLAYANI
249	Brebes	Kedunguter	TERLAYANI
250	Brebes	Tengki	TERLAYANI
251	Brebes	Kaliwlingi	TERLAYANI
252	Salem	Gunungjaya	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
253	Salem	Indrajaya	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
254	Salem	Gununglarang	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
255	Salem	Gunungsugih	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
256	Salem	Citimbang	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
257	Salem	Kadumanis	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
258	Salem	Gandoang	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
259	Salem	Capar	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
260	Salem	Wanoja	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
261	Bantarkawung	Ciomas	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
262	Bantarkawung	Legok	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
263	Paguyangan	Cipetung	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
264	Tonjong	Galuhtimur	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
265	Tonjong	Kutayu	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
266	Tonjong	Raja Wetan	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
267	Larangan	Kedungbokor	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
268	Larangan	Sitanggal	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
269	Ketanggungan	Jemasih	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
270	Kersana	Sindangjaya	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
271	Ketanggungan	Sindangjaya	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
272	Ketanggungan	Cikeusal Kidul	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
273	Ketanggungan	Buara	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
274	Ketanggungan	Kubangsari	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
275	Ketanggungan	Kubangjati	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
276	Ketanggungan	Bulakkelor	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
277	Ketanggungan	Padakaton	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
278	Banjarharjo	Kertasari	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)

No.	KECAMATAN	DESA	ZONASI PERSAMPAHAN
279	Banjarharjo	Cipanjang	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
280	Banjarharjo	Malahayu	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
281	Banjarharjo	Cikuya	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
282	Banjarharjo	Banjarharjo	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
283	Banjarharjo	Tiwulandu	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
284	Banjarharjo	Cibendung	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
285	Banjarharjo	Sukareja	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
286	Banjarharjo	Cimunding	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
287	Banjarharjo	Banjar Lor	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
288	Losari	Randegan	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
289	Losari	Bojongsari	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
290	Losari	Karangjunti	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
291	Losari	Babakan	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
292	Losari	Kalibuntu	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
293	Losari	Pekauman	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
294	Losari	Losari Kidul	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
295	Losari	Kecipir	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
296	Tanjung	Lemahabang	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)
297	Wanasari	Glonggong	MANDIRI (BELUM TERLAYANI)

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

3.2.3. Skenario pencapaian sasaran

Dalam rangka pencapaian target sasaran yang ditentukan di akhir tahun 2030, maka disusun skenario pencapaian sasaran jangka pendek hingga menengah dalam rencana peningkatan akses untuk setiap tahun selama 5 tahun, khususnya untuk mencapai target akses air limbah domestik dan persampahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 8 Target Cakupan Layanan Sanitasi

No	Sistem	Target Cakupan Layanan (%)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Air Limbah Domestik							
1	Akses Aman	1,1%	5,0%	7,5%	10,0%	15,0%	15,0%
2	Akses Layak (Termasuk Aman)	98,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3	Akses Belum Layak	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4	BABS Tertutup	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5	BABS di Tempat Terbuka	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Persampahan							
1	Layanan Pengumpulan Sampah	34,4%	45,0%	75,0%	80,0%	85,0%	85,0%
2	Sampah Terolah	3,0%	15,0%	30,0%	33,0%	36,9%	36,9%
3	Residu di LUR	15,4%	20,0%	43,0%	45,0%	48,1%	48,1%

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Target cakupan layanan Air Limbah Domestik, fokus utamanya adalah mencapai 100% Akses Layak pada tahun 2027 dan mempertahankannya hingga akhir periode perencanaan. Hal ini didukung dengan target eliminasi Akses Belum Layak menjadi 0% mulai tahun 2027. Selain itu, ada penekanan kuat pada peningkatan kualitas, di mana Akses Aman ditargetkan naik secara signifikan dari 1,1% pada tahun 2025 menjadi 15,0% pada tahun 2030. Target untuk BABS (Buang Air Besar Sembarangan), baik tertutup maupun di tempat terbuka, ditetapkan 0% secara konsisten, menunjukkan komitmen untuk mencapai status Bebas BABS.

Di sektor Persampahan, tabel ini menunjukkan target peningkatan yang sangat ambisius. Layanan Pengumpulan Sampah direncanakan meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 34,4% pada tahun 2025 menjadi 85,0% pada tahun 2030. Peningkatan paling dramatis terlihat pada Sampah Terolah, yang ditargetkan melonjak lebih dari dua belas kali lipat, dari hanya 3,0% menjadi 36,9%. Peningkatan layanan pengumpulan dan pengolahan ini juga diiringi dengan kenaikan target pengelolaan Residu di LUR dari 15,4% menjadi 48,1% selama periode yang sama.

3.3. Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

Analisis pendanaan sanitasi Kabupaten Brebes selama 5 tahun kedepan diperlukan untuk melakukan proyeksi mengenai kemampuan daerah dalam pendanaan sanitasi sebagaimana diidentifikasi didalam dokumen SSK ini. Untuk mendapatkan gambaran ini, analisis difokuskan pada aspek Belanja Langsung APBD Kabupaten Brebes, dimana berdasarkan hasil tinjauan realisasi selama 5 tahun terakhir pendanaan sanitasi mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penanganan sanitasi cukup tinggi, namun demikian jika dibandingkan antara porsi belanja sanitasi terhadap belanja langsung APBD, porsi sanitasi masih sangat kecil yaitu kurang lebih 1%, hal ini menunjukkan bahwa permasalahan sanitasi di Kabupaten Brebes dianggap belum merupakan permasalahan yang mendesak dibandingkan dengan permasalahan lainnya, sehingga kurang mendapatkan perhatian yang lebih.

Tabel III. 9 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Brebes untuk Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata-rata pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3)	6.618.427.253	10.592.760.600	2.209.861.980	6.314.135.640	9.792.301.075	8,15%
1.1	Air Limbah Domestik	1.590.775.000	3.493.500.000	1.387.200.000	4.036.000.000	2.631.600.000	
1.2	Sampah rumah tangga	4.799.093.313	6.902.224.600	434.810.000	1.703.357.740	6.835.894.975	
1.3	PHBS	228.558.940	197.036.000	387.851.980	574.777.900	324.806.100	
2	Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2 + 2.3)	2.291.862.420	8.000.645.000	11.199.980.000	14.043.806.690	8.099.969.007	28,72%
2.1	DAK Sanitasi	2.291.862.420	8.000.645.000	5.424.797.600	7.519.011.000	4.519.609.007	
2.2	DAK Lingkungan Hidup	-	-	5.775.182.400	6.524.795.690	3.580.360.000	
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	
4	Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)		8.910.289.673	18.593.405.600	13.409.841.980	20.357.942.330	17.892.270.082	14,96%
Total Belanja Langsung		2.955.050.373.005	3.126.226.470.519	3.091.285.559.556	2.989.014.635.072	2.899.781.680.575	
% APBD murni terhadap Belanja Langsung		0,30%	0,59%	0,43%	0,68%	0,62%	

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Tabel III. 10 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan

No	Uraian	Pendanaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	Perkiraan Belanja Langsung	23.429.000.000	28.392.000.000	30.981.500.000	34.931.500.000	39.161.500.000	Rp156.895.500.000,00
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	20.568.953.686	23.646.069.158	27.183.521.104	31.250.175.861	35.925.202.170	Rp138.573.921.978,21
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	23.000.000.000	26.450.000.000	30.417.500.000	34.980.125.000	40.227.143.750	Rp155.074.768.750,00

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Tabel tersebut memaparkan proyeksi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Brebes untuk sektor sanitasi selama periode lima tahun (2026–2030), dengan membandingkan tiga indikator utama: Belanja Langsung, APBD Murni, dan Komitmen Pendanaan. Secara umum, data menunjukkan tren kenaikan anggaran yang konsisten setiap tahunnya pada ketiga indikator tersebut. Total "Perkiraan Belanja Langsung" tercatat sebagai pos terbesar dengan akumulasi mencapai Rp156,9 miliar selama lima tahun, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan total "Komitmen Pendanaan Sanitasi" yang berada di angka Rp155 miliar.

Analisis perbandingan antara "Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi" dan "Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi" menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam memprioritaskan sektor ini. Meskipun proyeksi kemampuan murni dari APBD hanya sebesar Rp138,6 miliar (total 5 tahun), pemerintah daerah menetapkan komitmen pendanaan yang lebih tinggi yakni Rp155 miliar. Selisih positif sekitar Rp16,4 miliar ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes berencana melakukan upaya fiskal lebih atau realokasi anggaran untuk memastikan target pembangunan sanitasi terpenuhi di atas kapasitas standar APBD murninya.

Tabel III. 11 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Brebes untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata-rata pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3)	6.618.427.253	10.592.760.600	2.209.861.980	6.314.135.640	9.792.301.075	8,15%
1.1	Air Limbah Domestik	1.590.775.000	3.493.500.000	1.387.200.000	4.036.000.000	2.631.600.000	
1.2	Sampah rumah tangga	4.799.093.313	6.902.224.600	434.810.000	1.703.357.740	6.835.894.975	
1.3	PHBS	228.558.940	197.036.000	387.851.980	574.777.900	324.806.100	
2	Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2 + 2.3)	2.291.862.420	8.000.645.000	11.199.980.000	14.043.806.690	8.099.969.007	28,72%
2.1	DAK Sanitasi	2.291.862.420	8.000.645.000	5.424.797.600	7.519.011.000	4.519.609.007	
2.2	DAK Lingkungan Hidup	-	-	5.775.182.400	6.524.795.690	3.580.360.000	
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	
4	Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)		8.910.289.673	18.593.405.600	13.409.841.980	20.357.942.330	17.892.270.082	14,96%
Total Belanja Langsung		2.955.050.373.005	3.126.226.470.519	3.091.285.559.556	2.989.014.635.072	2.899.781.680.575	
% APBD murni terhadap Belanja Langsung		0,30%	0,59%	0,43%	0,68%	0,62%	

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Pemerintah Kabupaten Brebes memiliki tren positif dalam pengalokasian anggaran sanitasi dengan rata-rata pertumbuhan belanja sebesar 16,15% per tahun selama periode 2020 hingga 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh kontribusi dari tiga OPD utama, di mana Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) mencatatkan rata-rata pertumbuhan tertinggi sebesar 40,86%, diikuti oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebesar 16,76%, dan DINPERWASKIM sebesar 12,99%. Peningkatan signifikan pada DINKESDA di tahun 2024 khususnya disebabkan oleh munculnya anggaran investasi sebesar Rp942,5 juta yang tidak ada pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun, struktur pendanaan memperlihatkan ketimpangan yang tajam antara pembangunan fisik dan pemeliharaan, di mana porsi anggaran sangat didominasi oleh Belanja Investasi yang mencapai 93% hingga 96% dari total belanja sanitasi setiap tahunnya. Sebaliknya, alokasi untuk Operasional dan Pemeliharaan (OM) sangat minim, hanya berkisar antara 4% hingga 7%, yang berisiko mengganggu keberlanjutan fungsi infrastruktur yang telah terbangun. Selain itu, secara makro, prioritas anggaran sanitasi terhadap Total Belanja Langsung APBD masih tergolong kecil, yakni hanya berkisar 0,30% hingga 0,68% selama lima tahun terakhir.

Tabel III. 12 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Brebes untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2030

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan (Rp)
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3)	11.453.489.062	12.386.948.421	13.396.484.717	14.488.298.221	15.669.094.526	67.394.314.947
1.1	Air Limbah Domestik	3.078.030.545	3.328.890.035	3.600.194.572	3.893.610.430	4.210.939.680	18.111.665.262
1.2	Sampah rumah tangga	7.995.551.579	8.647.189.033	9.351.934.939	10.114.117.637	10.938.418.224	47.047.211.413
1.3	PHBS	379.906.938	410.869.353	444.355.205	480.570.155	519.736.622	2.235.438.273
2	Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2 + 2.3)	15.408.968.360	19.834.424.073	25.530.870.667	32.863.336.723	42.301.687.029	135.939.286.853
2.1	DAK Sanitasi	7.488.467.127	9.639.154.886	12.407.520.169	15.970.959.961	20.557.819.662	66.063.921.805
2.2	DAK Lingkungan Hidup	5.932.240.625	7.635.980.133	9.829.033.627	12.651.932.085	16.285.566.980	52.334.753.450
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	1.988.260.608	2.559.289.055	3.294.316.871	4.240.444.676	5.458.300.388	17.540.611.598
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	
4	Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)		26.862.457.422	32.221.372.494	38.927.355.384	47.351.634.944	57.970.781.556	16,63%
Total Belanja Langsung		2.955.050.373.005	3.126.226.470.519	3.091.285.559.556	2.989.014.635.072	2.899.781.680.575	
% APBD murni terhadap Belanja Langsung		0,91%	1,03%	1,26%	1,58%	2,00%	

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Berdasarkan proyeksi hingga tahun 2030, strategi pendanaan sanitasi Kabupaten Brebes menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat untuk membiayai investasi infrastruktur. Hal ini terlihat dari lonjakan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diproyeksikan tumbuh pesat dari Rp15,4 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp42,3 miliar pada tahun 2030. Dengan total akumulasi mencapai Rp135,9 miliar selama periode lima tahun, DAK (mencakup sanitasi, lingkungan hidup, dan perumahan) menjadi pendorong utama kenaikan anggaran, yang mengindikasikan fokus besar pemerintah daerah pada pembangunan fisik baru atau perluasan layanan.

Sementara itu, kemampuan Belanja Sanitasi dari sumber daya daerah (yang umumnya mencakup biaya operasional seperti pengelolaan sampah dan air limbah) menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih moderat, bergerak dari Rp11,4 miliar (2026) menjadi Rp15,6 miliar (2030). Dalam komponen ini, sektor Sampah Rumah Tangga mendominasi alokasi anggaran meningkat dari Rp7,9 miliar ke Rp10,9 miliar yang mencerminkan beban operasional rutin terbesar daerah. Kesenjangan pertumbuhan antara DAK (investasi) yang sangat tinggi dibandingkan Belanja Sanitasi (operasional) ini menuntut perhatian khusus untuk memastikan ketersediaan dana pemeliharaan (OM) yang memadai bagi infrastruktur yang akan dibangun.

Tabel III. 13 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Brebes dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No	Uraian	Pendanaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan	853.054.366	906.370.263	963.018.405	1.023.207.055	1.087.157.496	Rp4.832.807.585,15
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	20.568.953.686	23.646.069.158	27.183.521.104	31.250.175.861	35.925.202.170	Rp138.573.921.978,21
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	23.000.000.000	26.450.000.000	30.417.500.000	34.980.125.000	40.227.143.750	Rp155.074.768.750,00
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)	19.715.899.321	22.739.698.894	26.220.502.699	30.226.968.806	34.838.044.674	Rp133.741.114.393,06
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)	22.146.945.634	25.543.629.737	29.454.481.595	33.956.917.945	39.139.986.254	Rp150.241.961.164,85

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Tabel ini menyajikan proyeksi kapasitas fiskal Kabupaten Brebes untuk mendanai program sanitasi selama periode lima tahun (2026–2030) dengan membandingkan dua skenario pendanaan. Skenario pertama, "Perkiraan APBD Murni", memproyeksikan ketersediaan dana sebesar Rp20,5 miliar pada tahun 2026 yang terus meningkat hingga mencapai total Rp138,5 miliar selama lima tahun. Skenario kedua, "Komitmen Pendanaan Sanitasi", menetapkan target yang lebih ambisius dengan total pendanaan mencapai Rp155 miliar, yang mencerminkan adanya upaya prioritas atau intervensi kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya lebih besar dari sekadar kapasitas fiskal standarnya.

Faktor penting dalam perhitungan kemampuan ini adalah estimasi "Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan" yang harus dikurangkan dari total anggaran tersedia agar mendapatkan angka kapasitas pembangunan yang riil. Tabel menunjukkan bahwa beban biaya operasional relatif kecil, hanya bergerak dari Rp853 juta pada 2026 menjadi Rp1,08 miliar pada 2030, dengan total akumulasi Rp4,8 miliar selama lima tahun. Rendahnya beban operasional ini menguntungkan karena meminimalisir pengurangan anggaran, sehingga porsi terbesar dana dapat dimanfaatkan untuk implementasi fisik Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK).

Hasil akhir dari perhitungan tersebut terlihat pada baris "Kemampuan Mendanai SSK", yang merupakan dana bersih yang siap digunakan untuk proyek sanitasi. Jika mengandalkan APBD Murni saja, kemampuan bersih daerah tercatat sebesar Rp133,7 miliar. Namun, dengan adanya skenario "Komitmen Pendanaan", ruang fiskal bersih yang tersedia meningkat signifikan menjadi Rp150,2 miliar. Selisih positif sekitar Rp16,5 miliar antara kedua skenario ini menunjukkan potensi percepatan pembangunan sanitasi yang bisa diraih jika komitmen pendanaan tersebut benar-benar direalisasikan oleh pemerintah daerah.

BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

4.1. Pengelolaan Air Limbah Domestik

Dalam rangka mencapai target capaian sub sektor air limbah domestik, maka perlu disusun strategi pencapaian berdasarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Penentuan strategi dilakukan melalui analisis SWOT, yaitu dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian target. Adapun beberapa faktor internal dan eksternal yang diperkirakan dapat mempengaruhi pencapaian target sub sektor air limbah domestik antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Internal yang dalam analisis SWOT terdiri dari Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness), yaitu:
 - a. Kekuatan, antara lain:
 - Memiliki lembaga koordinasi baik internal Pemerintah Kabupaten berupa Pokja,(PKP) maupun Forum sebagai wadah bertemunya Pokja dengan stake holder terkait.
 - Memiliki Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan air limbah domestik.
 - Memiliki Media Komunikasi Resmi.
 - b. Kelemahan
 - Belum memiliki Perda tentang pengelolaan air limbah
 - Regulasi yang membatasi ruang lingkup sasaran anggaran APBD
 - Belum memiliki IPLT
2. Faktor Eksternal yang dalam analisis SWOT terdiri dari Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threath), yaitu:
 - a. Peluang
 - Adanya sumber pendanaan lain di luar APBD
 - Adanya regulasi yang memungkinkan menyentuh sasaran di luar jangkauan APBD
 - Beberapa kabupaten/kota tetangga telah meiliki IPLT
 - Beberapa industri rumah tangga sudah memiliki IPAL
 - Usaha sedot tinja sudah mulai berkembang
 - Adanya wirausaha sanitasi
 - Adanya kader kesehatan/posyandu/AMPL

b. Tantangan

- Tingginya prevalensi penyakit akibat buruknya sanitasi khususnya air limbah domestik
- Pencemaran akibat air limbah domestik

Tabel IV. 1 Analisis SWOT Air Limbah Domestik

STRATEGI	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	STRATEGI S - O	STRATEGI W - O
PELUANG (OPPORTUNITY)	Mendorong Pokja PKP untuk melakukan eksternalisasi dokumen SSK ke pihak-pihak yang berpotensi menjadi sumber pendanaan non APBD untuk peningkatan kualitas sarana prasarana sanitasi (misal dana APBN, APBD Provinsi, CSR, KPBU, Swasta Murni)	Memanfaatkan peluang pendanaan APBN/APBD Provinsi untuk membangun IPLT beserta sarana prasarananya, yang didukung dengan pembentukan kelembagaannya
	Melakukan kerjasama dengan pengusaha sedot tinja untuk mensosialisasikan pentingnya sanitasi aman	Memanfaatkan IPAL industri yang ada untuk digunakan secara bersama dengan warga masyarakat dengan memperhatikan kapasitasnya
	Memanfaatkan regulasi yang ada untuk mendorong pengambil kebijakan baik di tingkat Kabupaten maupun Desa mengalokasikan anggaran lebih besar lagi untuk keperluan pemberian bantuan Jamban Sehat Permanen	Melakukan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain yang telah memiliki IPLT untuk keperluan pengolahan lumpur tinja
	Memanfaatkan teknologi pengolahan limbah untuk mendorong masyarakat dengan akses sanitasi belum layak ke sanitasi layak	
	Mengintegrasikan program/kegiatan sub sektor sanitasi air limbah domestik ke dalam dokumen perencanaan daerah dan desa	
	STRATEGI S - T	STRATEGI W - T
ANCAMAN (THREAT)	Mengintegrasikan program/kegiatan penanganan kumuh pada sub sektor sanitasi air limbah domestik	Mendorong penyusunan kebijakan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik dalam bentuk Perda
	Memanfaatkan sanitarian dan kader kesehatan untuk mengadvokasi masyarakat akan pentingnya sanitasi layak	
	Mengoptimalkan peran dan fungsi Wirausaha Sanitasi	

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Hasil analisis sebagaimana tabel di atas kemudian digunakan sebagai alat bantu Analisa dalam matriks kerangka kerja logis sektor air limbah domestik sebagai berikut:

Tabel IV. 2 Matriks Kerangka Kerja Logis Air Limbah Domestik

PERMASALAHAN MENDESAK	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN
Aspek Teknis: 1. BABS : 0 % (0.KK) 2. Akses terhadap jamban yang tidak layak: 1,6.% (11.436.KK) 3. Belum tersedia IPLT dan truk tinja milik pemerintah daerah; 4. Praktek pengurusan tinja sangat rendah pertahun (1,1 % atau 7.620 KK); 5. Kondisi SPALD-T tidak berfungsi optimal (melebihi kapasitas) 6. Pengukuran kualitas efluen belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh 7. Belum memiliki Masterplan Pengelolaan Air Limbah	1. Terdapat kelembagaan Pokja PKP yang aktif dan mendukung di tingkat Kabupaten dan Provinsi	T.1. Mewujudkan Akses Sanitasi Layak bagi Seluruh Masyarakat dan Peningkatan Signifikan Akses Sanitasi Aman.	S.1.1 Meningkatkan persentase akses rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi layak dari 98,4% menjadi 100% pada akhir tahun 2027.	S1.1.1 Memperkuat program pemicuan total sanitasi berbasis masyarakat (STBM 5 Pilar) di sisa desa yang masih terdapat akses sanitasi belum layak melalui alokasi dana desa, insentif daerah, maupun pendanaan lain.	1. Mengintegrasikan program/kegiatan sub sektor sanitasi air limbah domestik ke dalam dokumen perencanaan daerah dan desa 2. Pengoptimalan penganggaran sanitasi sub sektor Air Limbah Domestik 3. Lomba Sanitasi Lingkungan ditingkat Kabupaten 4. Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Sungai dan Air Sumur) 5. Pembangunan jamban keluarga dan fasilitasi sanitasi sekolah 6. Penyediaan SPALD –S melalui kegiatan STBM
	2. Potensi pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten melalui berbagai macam kegiatan sanitasi Air Limbah			S1.1.2 Menyediakan bantuan teknis dan stimulan untuk pembangunan tangki septik individual standar SNI dan SPALDS untuk mencapai akses sanitasi layak	
	3. Potensi kelembagaan ditingkat masyarakat berupa BKM dan KSM		S.1.2 Meningkatkan persentase rumah tangga yang terlayani sanitasi aman dari 1,1% menjadi minimal 7% pada akhir tahun 2027 dan	S1.2.1 Mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) baru di pusat-pusat kawasan padat	1. Peningkatan jumlah Sambungan Rumah (SR) ke SPALD Komunal 2. Pelaksanaan promosi kesehatan berkelanjutan 3. Workshop Akses Sumber Pendanaan
	4. Tersedianya Sanitarian di setiap Kecamatan dan Kader di setiap Desa yang memiliki				

PERMASALAHAN MENDESAK	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN
	kompetensi cukup baik 5. Tersedianya teknologi penanganan air limbah domestik 6. Berkembangnya teknologi digital, media sosial, cetak dan elektronik 7. Kerja bakti dan gotong royong sebagai kearifan lokal		mencapai 15% pada akhir tahun 2029.	penduduk/perkotaan dan zona pengembangan SPALDT melalui skema pendanaan APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten. S1.2.2 Melakukan pendataan dan sertifikasi layanan Sedot Lumpur Tinja untuk penyedia jasa sedot tinja dan masyarakat pengguna jasa sedot tinja. S1.2.3 Mendorong Pokja PKP untuk melakukan eksternalisasi dokumen SSK ke pihak-pihak yang berpotensi menjadi sumber pendanaan non APBD untuk peningkatan kualitas sarana prasarana sanitasi (misal dana APBN, APBD Provinsi, CSR, KPBU, Swasta Murni) S1.2.4 Melakukan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain yang telah memiliki IPLT untuk keperluan pengolahan lumpur tinja S1.2.4 Memanfaatkan peluang pendanaan	Sanitasi dari sumber Non-APBD Kabupaten 4. Koordinasi dan Kerjasama antar Pemerintah Kabupaen/Kota untuk penanganan Sanitasi di Wilayah Perbatasan 5. Pembangunan IPLT

PERMASALAHAN MENDESAK	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN
Aspek Non-Teknis: 1. Belum tersusunnya peraturan daerah khusus mengenai pengelolaan air limbah 2. Perhatian terhadap sarana dan prasarana air limbah yang masih				APBN/APBD Provinsi untuk membangun IPLT beserta sarana prasarannya, yang didukung dengan pembentukan kelembagaannya	
			S.1.3 Membangun dan merehabilitasi 3.000 unit sambungan rumah (SR) baru ke SPALD-T di kawasan padat penduduk dan rawan kumuh hingga akhir tahun 2029.	S1.3.1 Mengidentifikasi dan memprioritaskan lokasi pembangunan SPALD-T skala komunal (terutama di kawasan rawan banjir/rob) melalui kajian teknis yang mengedepankan aspek berketahanan iklim. S1.3.2 Menerapkan mekanisme iuran/retribusi sanitasi yang terjangkau untuk operasional dan pemeliharaan infrastruktur SPALD-T yang dibangun.	
		T.2. Memperkuat Kelembagaan dan Penerapan Inovasi Pengelolaan Air Limbah yang Berkelanjutan.	S.2.1 Mendorong penyusunan kebijakan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik dalam bentuk Perda dan Produk Hukum lainnya	S2.1.1 Menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembentukan dan mandat UPT/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelola Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).	1. Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 2. Penyusunan Master Plan Pengelolaan Air Limbah Domestik 3. Penyusunan Perbup tentang pembentukan UPT/Pengelola IPLT

PERMASALAHAN MENDESAK	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN
kurang dibanding sektor lain 3. Terbatasnya pendanaan untuk pemeliharaan maupun pembangunan sarana air limbah 4. Bantuan pendanaan pemerintah (APBN/APBD Prov/Kab) terkendala regulasi yang mensyaratkan lembaga/kelompok, yayasan yang harus berbadan hukum dan tercatat dalam Kemenkum.			S.2.2 Mengintegrasikan sistem digitalisasi data monitoring kualitas air limbah dan pemetaan sanitasi Kabupaten Brebes yang dapat diakses oleh minimal 3 OPD terkait pada akhir tahun 2026.	S2.2.1 Mengembangkan platform digital Smart Sanitation (dashboard data terintegrasi) yang menghubungkan data online dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan data cakupan layanan. S2.2.2 Melakukan pelatihan teknis kepada SDM OPD terkait (PUPR, Dinas Kesehatan, BAPPEDA) mengenai pengumpulan, validasi, dan analisis data sanitasi digital untuk pengambilan keputusan berbasis bukti.	1. Pemicuan Perubahan Perilaku Masyarakat dan Anak Sekolah 2. Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan 3. Pemberian Penghargaan Bagi masyarakat yang berhasil mengelola air limbah di Lingkungannya Dengan Baik
			S.2.3 Membentuk dan mengaktifkan minimal 5 KSM baru untuk mengelola SPALD-T komunal atau 1 UPT yang khusus menangani layanan lumpur tinja terjadwal di akhir tahun 2028.	S2.3.1 Memberikan pendampingan intensif dan pelatihan kewirausahaan kepada KSM/KPP untuk pengelolaan aset sanitasi yang dibangun agar mampu mandiri secara finansial.	1. Penyelenggaraan pelatihan teknis (fisik) dan pengelolaan air limbah (non Fisik) 2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Sanitasi Desa



Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan terkait rangkaian kerangka kerja logis dalam pengelolaan air limbah. Diharapkan dengan strategi dan indikasi program/kegiatan tersebut diatas mampu mencapai tujuan sanitasi aman dan mampu meningkatkan cakupan layanan air limbah domestik di Kabupaten Brebes. Indikasi kegiatan diatas dapat disinergikan dengan program terkait khususnya sektor air limbah. Adapun ukuran terlaksananya kegiatan tersebut diantaranya adalah:

1. Terbangunnya IPLT dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap operasionalnya, termasuk pengadaan sarana pengangkut tinjanya.
2. Masyarakat paham akan pemanfaatan IPLT dan retribusinya.
3. Terbangunnya sarana dan prasarana SPALD-T / SPALD-S.
4. Hilangnya kebiasaan BABS
5. Bertambahnya cakupan sanitasi layak individual
6. Turunnya angka cakupan sanitasi layak bersama
7. Beralihnya sanitasi belum layak setidaknya ke layak perdesaan secara terbatas
8. Beralihnya SPALD-S ke SPALD-T
9. Meningkatnya alokasi anggaran dalam pengembangan air limbah,
10. Tersedianya dokumen dan peraturan daerah terkait air limbah
11. Masyarakat paham dan sadar pengelolaan air limbah yang sehat dan aman.
12. Masyarakat paham dan sadar mengenai dampak positif pengelolaan air limbah.

4.2. Pengelolaan Persampahan

Dalam rangka mencapai target capaian sub sektor persampahan, maka perlu disusun strategi pencapaian berdasarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Penentuan strategi dilakukan melalui analisis SWOT, yaitu dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian target. Adapun beberapa faktor internal dan eksternal yang diperkirakan dapat mempengaruhi pencapaian target sub sektor air limbah domestik antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Internal yang dalam analisis SWOT terdiri dari Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness), yaitu:
 - a. Kekuatan, antara lain:
 - Memiliki lembaga koordinasi baik internal Pemerintah Kabupaten berupa Pokja, maupun Forum sebagai wadah bertemunya Pokja dengan stake holder terkait
 - Memiliki Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan persampahan dari Tingkat Kabupaten sampai UPT

- Memiliki Media Komunikasi Resmi
 - Memiliki Perda dan Perbup tentang Pengelolaan Sampah
 - Memiliki TPA dan TPST
 - Adanya Kerjasama pengelolaan sampah infeksius dengan Pihak Ketiga
 - Memiliki tenaga PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)
- b. Kelemahan, antara lain:
- Terbatasnya anggaran pengelolaan sampah dibanding dengan luas layanannya
2. Faktor Eksternal yang dalam analisis SWOT terdiri dari Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threath), yaitu:
- a. Peluang, antara lain:
- Adanya sumber pendanaan lain di luar APBD
 - Kemajuan teknologi pengelolaan sampah
 - Partisipasi masyarakat dalam pengangkutan sampah secara mandiri
- b. Tantangan, antara lain:
- Pencemaran air, tanah dan udara akibat pengelolaan sampah oleh masyarakat yang tidak tepat
 - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya

Tabel IV. 3 Analisis SWOT Persampahan

STRATEGI	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	STRATEGI S - O	STRATEGI W - O
PELUANG (OPPORTUNITY)	Mendorong Pokja PKP untuk melakukan eksternalisasi dokumen SSK ke pihak-pihak yang berpotensi menjadi sumber pendanaan non APBD untuk peningkatan kualitas sarana prasarana sanitasi (misal dana APBN, APBD Provinsi, CSR, KPBU, Swasta Murni)	Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk membantu meningkatkan layanan penanganan dan pengurangan sampah
	Memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan sampah secara modern	Melakukan pemasaran kepada pihak-pihak yang berpotensi menjadi sumber pendanaan non APBD untuk peningkatan layanan penanganan sampah (misal dana APBN, APBD Provinsi, CSR, KPBU, Swasta Murni)

	Meningkatkan kapasitas pengetahuan petugas angkut sampah mandiri untuk mereduksi sampah	
	Mengintegrasikan program/kegiatan sub sektor sanitasi persampahan ke dalam dokumen perencanaan daerah dan desa	
	STRATEGI S - T	STRATEGI W - T
ANCAMAN (THREAT)	Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang tepat	Mendorong penyusunan kebijakan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik dalam bentuk Perda
	Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengurangan sampah dari sumbernya	Menerapkan ketentuan yang diatur dalam Perda Pengelolaan Sampah khususnya terkait retribusi pengelolaan sampah
	Menerapkan ketentuan yang diatur dalam Perda Pengelolaan Sampah khususnya terkait pelanggaran yang menyebabkan pencemaran	

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Hasil analisis sebagaimana tabel di atas kemudian digunakan untuk bahan analisa alat bantu Analisa dalam matriks kerangka kerja logis sanitasi sub sektor air limbah domestik sebagai berikut:

Tabel IV. 4 Matriks Kerangka Kerja Logis Persampahan

PERMASALAHAN MENDESAK	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN
Aspek Teknis: 1. Terdapat 21 TPS3R tidak optimal atau bahkan tidak beroperasi 2. Cakupan pelayanan pengumpulan sampah masih rendah yaitu 34% 3. Frekuensi dan ketepatan waktu pengangkutan sampah belum optimal 4. Pengelolaan sampah setempat masih rendah dan belum ada pemilahan sampah di sumber 5. Operasional TPA masih belum sesuai standar dan menggunakan open dumping	1. Terdapat kelembagaan Pokja PKP yang aktif dan mendukung di tingkat Kabupaten dan Provinsi 2. Potensi pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten melalui berbagai macam kegiatan sanitasi Air Limbah 3. Potensi kelembagaan ditingkat masyarakat berupa BKM dan KSM 4. Tersedianya Sanitarian di setiap Kecamatan dan Kader di setiap Desa yang memiliki kompetensi cukup baik	T.1. Meningkatkan Layanan Pengurangan dan Penanganan Sampah yang Bersih, Efisien, dan Berbasis Lingkungan.	S.1.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah menuju standar controlled landfill atau sanitary landfill sesuai standar teknis Kementerian LHK. S.1.2 Meningkatkan persentase penanganan sampah menjadi 85% pada akhir tahun 2027 termasuk layanan pengumpulan sampah S.1.3 Meningkatnya capaian pengolahan sampah sebesar 36,9% yang terdiri dari sampah terolah dan sampah terdaur ulang pada tahun 2029.	S1.1.1 Memanfaatkan kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala kabupaten dengan penerapan teknologi pengolahan yang meminimalisir residu (misalnya Refuse Derived Fuel/RDF). S1..1 Meningkatkan armada dan jangkauan pengangkutan sampah, terutama di wilayah non-urban, melalui kerjasama dengan KSM atau pihak swasta yang profesional. S1.3.1 Optimalisasi TPS3R yang tidak aktif dan penguatan Bank Sampah Induk. S1.3.2 Memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan sampah secara modern, berkelanjutan, serta meminimalisir residu	1. Misi 1 (Kualitas Infrastruktur), Misi 3 (Inovatif dan Cerdas). 2. Misi 1 (Akses Merata), Misi 2 (Tata Kelola Profesional). 3. Workshop Akses Sumber Pendanaan Sanitasi dari sumber Non-APBD Kabupaten 4. Pemasangan Sistem RDF 5. Peningkatan teknologi pengolahan dan pengelolaan sampah 6. Pembangunan TPA Baru di Desa Kubangsari Kecamatan Ketanggungan 7. Revitalisasi TPA di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes 8. Pengadaan kendaraan pengangkut sampah dari sumbernya

PERMASALAHAN MENDESAK	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN
	5. Tersedianya teknologi penanganan air limbah domestik 6. Berkembangnya teknologi digital, media sosial, cetak dan elektronik 7. Kerja bakti dan gotong royong sebagai kearifan lokal			(misalnya Refuse Derived Fuel/RDF).	(Gerobak Sampah, gerobak motor sampah, dan Kontainer) 9. Penyusunan Surat Edaran penerapan sanksi 10. Penyusunan Surat Edaran pengenaan retribusi bagi pihak yang mengangkut sampah ke TPS/TPA
			S.1.4 Mendirikan dan mengoperasikan bank sampah baru serta mengaktifkan kembali bank sampah yang tidak aktif di wilayah urban dan semi-urban, dengan melibatkan minimal 200 kepala keluarga hingga akhir tahun 2028.	S1.4.1 Memberikan bantuan modal awal, sarana dan prasarana (timbangan, karung, press) serta pendampingan manajerial kepada inisiator bank sampah baru/reaktivasi. S1.4.2 Membangun kemitraan dengan sektor industri atau pengepul besar untuk menjamin off-taker (pembeli) sampah terpilah dari bank sampah dengan harga yang kompetitif.	1. Misi 4 (Pemberdayaan Masyarakat), 2. Misi 5 (Ketahanan Ekonomi).

PERMASALAHAN MENDESAK	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN
Aspek Non-Teknis: 1. Perhatian terhadap sarana dan prasarana persampahan yang masih kurang dibanding sektor lain 2. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman warga mengenai pengelolaan sampah yang baik 3. Masih rendahnya pendanaan sektor Persampahan, baik dari APBD maupun dukungan pendanaan di luar APBD		T.2. Meningkatkan Sistem Kelembagaan Persampahan dan Mendorong Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dan Lingkungan.	S.2.1 Meningkatnya penerapan perda pengolahan sampah	S2.1.1 Menerapkan ketentuan yang diatur dalam Perda Pengelolaan Sampah dan review perencanaan teknisnya S2.1.2 Mendorong eksternalisasi dokumen SSK bersampa Pokja PKP ke pihak-pihak yang berpotensi menjadi sumber pendanaan non APBD untuk peningkatan layanan penanganan sampah (misal dana APBN, APBD Provinsi, CSR, KPBU, Swasta Murni)	3. Misi 4 (Sensitif Lokal), Misi 3 (Inovatif). 4. Misi 4 (Edukasi dan Pemberdayaan).
			S.2.2 Membuat skema insentif daerah bagi wilayah yang berhasil mencapai 100% bebas dari kegiatan buang sampah liar (zero open dumping) dan inovasi pemilahan dan pengolahan sampah di lingkungan.	S2.2.1 Menyusun kriteria penilaian dan mekanisme audit lapangan yang transparan untuk verifikasi status Zero Open Dumping (ZOD) di tingkat RW. S2.2.2 Memberikan penghargaan (seperti bantuan sarana komunal,	1. Misi 2 (Tata Kelola Responsif). 2. Misi 4 (Pemberdayaan Masyarakat), Misi 5 (Pengentasan Kemiskinan).

PERMASALAHAN MENDESAK	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN
				dana stimulan, atau alat kebersihan) kepada RW yang berhasil mencapai dan mempertahankan status ZOD.	
			S.2.3 Meningkatnya partisipasi pemilahan sampah dan praktik 3R di tingkat rumah tangga, didukung oleh TPS3R dan Bank Sampah Induk/Unit yang aktif dan terintegrasi.	S2.3.1 Meningkatkan kapasitas pengetahuan petugas angkut sampah mandiri untuk mereduksi sampah S2.3.2 Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang tepat S2.3.3 Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengurangan sampah dari sumbernya S2.3.4 Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk membantu meningkatkan layanan penanganan dan pengurangan sampah S2.3.5 Mengintegrasikan program/kegiatan sub sektor sanitasi persampahan ke dalam	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. 2. Pembangunan TPS (TPS3R Berbasis Masyarakat dan Kelembagaan), dan pengadaan alat angkut dari TPS, TPST ke TPA 3. Penguatan kelembagaan masyarakat tentang persampahan 4. Sosialisasi bank sampah dan promosi penggunaan produk daur ulang sampah 5. Fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 6. Fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

PERMASALAHAN MENDESAK	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN
				dokumen perencanaan daerah dan desa	

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Berdasarkan tabel diharapkan dengan strategi dan indikasi program/kegiatan tersebut diatas mampu mencapai tujuan meningkatkan cakupan layanan penanganan dan pengurangan sampah perkotaan serta mampu meningkatkan kesadaran masyarakat di perdesaan untuk melakukan pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah. Indikasi kegiatan diatas dapat disinergikan dengan program terkait khususnya sektor air limbah. Adapun ukuran terlaksananya kegiatan tersebut diantaranya adalah:

1. Terbangunnya TPA baru di Desa Kubangsari Kecamatan Ketanggungan dengan metode sanitary/controlled landfill atau RDF (Refuse Derived Fuel) serta prasarana pendukungnya
2. Terevitalisasinya TPA di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes dengan metode sanitary/controlled landfill atau RDF serta prasarana pendukungnya
3. Terbangunnya teknologi RDF minimal di satu TPA
4. Meningkatnya jumlah armada dalam pengelolaan sampah di TPA
5. Meningkatnya operasional penanganan sampah
6. Meningkatnya jumlah Bank Sampah dan BUMDes Persampahan
7. Meningkatnya sarana prasarana pengelolaan sampah (pewadahan, pengumpul, pengangkutan)
8. Meningkatnya cakupan layanan penanganan sampah di perkotaan
9. Meningkatnya cakupan pengurangan sampah di perkotaan dan perdesaan
10. Tersedianya dokumen Master Plan Persampahan
11. Masyarakat paham dan sadar akan perda pengelolaan sampah, sanksi dan retribusinya
12. Masyarakat paham dan praktek dalam mengelola sampah secara mandiri,
13. Meningkatnya kegiatan reduksi sampah melalui pemberdayaan masyarakat, optimalisasi TPST, Bank Sampah dan BUMDes Persampahan.

BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

5.1. Ringkasan

Untuk mencapai target yang ditentukan di akhir tahun 2030, maka disusun program/kegiatan beserta indikasi pendanaannya. Berdasarkan indikasi program/kegiatan yang telah disusun diperoleh angka yang diperlukan untuk memenuhi target pembangunan sanitasi lima tahun ke depan sebesar Rp 398.563.000.000 yang terdiri dari sub sektor air limbah domestik sebesar Rp 214.719.000.000 dan sum sektor pengelolaan persampahan sebesar Rp 183.844.000.000, padahal berdasarkan proyeksi kemampuan pendanaan sanitasi daerah Kabupaten Brebes dalam akumulasi APBD Kabupaten selama 5 tahun hanya berkisar Rp 150.241.961.164 sehingga terdapat funding gap sebesar -Rp 248.320.538.835 yang harus dicarikan sumber pendanaannya. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V. 1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun

X Rp. 1 juta

No	Uraian	Tahun anggaran					Total Anggaran
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	Air Limbah Domestik	23.641	28.642	51.492	54.392	56.552	214.719
2	Pengelolaan Persampahan	24.039	34.189	31.209	47.179	47.229	183.844
A,	Jumlah Kebutuhan	47.680	62.831	82.701	101.571	103.781	398.563

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Funding gap yang merupakan selisih antara jumlah anggaran yang dibutuhkan dikurangi dengan jumlah perkiraan komitmen pendanaan yang tersedia akan dicarikan sumber pendanaannya dari luar APBD Kabupaten. Adapun sumber pendanaan lain beserta perkiraan besarnya di luar APBD Kabupaten diperkirakan antara lain bersumber dari APBD Provinsi, APBN, Swasta/CSR dan pendanaan swadaya murni dari masyarakat sebagaimana tabel berikut:

Tabel V. 2 Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 tahun

X Rp. 1 juta

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Juta)					Total Anggaran
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	Kebutuhan Pendanaan	47.680	62.831	82.701	101.571	103.781	398.563
2	Kemampuan Pendanaan	22.147	25.544	29.454	33.957	39.140	150.242
3	Selisish (Rp)	-25.533	-37.287	-53.246	-67.614	-64.641	-248.321
4	Selisish (%)	-53,55%	-59,35%	-64,38%	-66,57%	-62,29%	-62,30%

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Tabel ini menggambarkan adanya defisit anggaran yang sangat signifikan antara rencana kebutuhan investasi sanitasi dan kemampuan riil keuangan daerah Kabupaten Brebes. Selama periode lima tahun, total Kebutuhan Pendanaan diproyeksikan mencapai Rp398,5 miliar, sementara Kemampuan Pendanaan yang tersedia hanya sebesar Rp150,2 miliar. Hal ini mengakibatkan terjadinya akumulasi kekurangan dana (funding gap) sebesar Rp248,3 miliar, yang berarti sumber daya keuangan yang ada saat ini hanya mampu menutupi sekitar 37% dari total target kebutuhan program sanitasi yang telah direncanakan.

Secara tren tahunan, celah pendanaan ini cenderung melebar seiring berjalannya waktu, menunjukkan bahwa kenaikan kebutuhan anggaran tumbuh lebih cepat daripada kenaikan kemampuan pendanaan. Pada tahun 2026, defisit tercatat sebesar Rp25,5 miliar (53,55%), namun angka ini terus membengkak hingga puncaknya pada tahun 2029 dengan defisit mencapai Rp67,6 miliar (66,57%). Secara rata-rata, Kabupaten Brebes menghadapi kekurangan anggaran sebesar 62,30% setiap tahunnya, yang mengindikasikan perlunya upaya agresif untuk mencari sumber pendanaan alternatif di luar APBD, seperti CSR, hibah pusat, atau kerjasama swasta, guna menutup celah besar tersebut.

Tabel V. 3 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran

X Rp. 1 juta

No	Uraian	Tahun Anggaran					Jumlah
		2026	2027	2028	2029	2030	
A.	Pemerintah						
1	APBD Kabupaten	23.429	28.392	30.982	34.932	39.162	156.896
2	APBD Provinsi	10.000	11.620	5.500	6.420	-	33.540
3	APBN	-	-	-	-	-	-
4	DAK	12.088	24.622	45.672	66.072	66.072	214.526
Jumlah A.		45.517	64.634	82.154	107.424	105.234	404.962
B.	Non-Pemerintah						
1	CSR Swasta	1.930	330	330	330	330	3.250
2	Masyarakat	455	689	689	739	739	3.311
Jumlah B.		2.385	1.019	1.019	1.069	1.069	6.561
Jumlah A+B.		47.902	65.653	83.173	108.493	106.303	411.523
Daftar Tunggu Kebutuhan - A-B-		-	-	-	-	-	-

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Tabel ini merinci rencana total kebutuhan dana untuk pengembangan sanitasi di Kabupaten Brebes selama lima tahun yang mencapai angka Rp411,5 miliar (tepatnya Rp411.523 juta). Dari total tersebut, struktur pendanaan sangat didominasi oleh sumber Pemerintah (Bagian A) yang menyumbang porsi terbesar yakni Rp404,9 miliar atau sekitar 98% dari total kebutuhan. Dalam kategori pemerintah ini, Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi penopang utama dengan kontribusi sebesar Rp214,5 miliar, diikuti oleh APBD Kabupaten sebesar Rp156,9 miliar, dan APBD Provinsi sebesar Rp33,5 miliar, sementara pos APBN tercatat kosong.

Sebaliknya, peran serta sektor Non-Pemerintah (Bagian B) masih sangat kecil dengan total kontribusi hanya Rp6,5 miliar selama lima tahun, yang terbagi hampir rata antara CSR Swasta (Rp3,25 miliar) dan swadaya Masyarakat (Rp3,3 miliar). Secara tren waktu, kebutuhan biaya ini terus meningkat tajam dari Rp47,9 miliar pada tahun 2026 hingga mencapai puncaknya di tahun 2029 sebesar Rp108,5 miliar, sebelum sedikit menurun di tahun 2030. Data ini menegaskan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer pusat (DAK) dan anggaran daerah untuk merealisasikan target sanitasi di Brebes.

5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah

Pengembangan Sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah terdiri dari sumber pendanaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, hingga DAK yang berumber dari pembiayaan APBN.

Tabel V. 4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten

X Rp. 1 juta

No	Uraian	Tahun anggaran					Total Anggaran
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	Air Limbah Domestik	10.470	12.683	14.553	16.633	20.813	75.152
2	Pengelolaan Persampahan	12.959	15.709	16.429	18.299	18.349	81.744
	Jumlah	23.429	28.392	30.982	34.932	39.162	156.896

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Dapat dilihat pada tabel diatas, proyeksi alokasi anggaran sanitasi yang bersumber khusus dari APBD Kabupaten Brebes selama periode 2026 hingga 2030, dengan total akumulasi dana mencapai Rp156,9 miliar. Data menunjukkan komitmen daerah yang terus meningkat setiap tahunnya, di mana total anggaran bergerak naik dari Rp23,4 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp39,1 miliar pada tahun 2030. Seluruh alokasi ini didistribusikan ke dalam dua sub-sektor utama sanitasi, yaitu Air Limbah Domestik dan Pengelolaan Persampahan, tanpa adanya alokasi untuk sektor drainase dalam rekapitulasi sumber dana APBD ini.

Secara komposisi, sektor Pengelolaan Persampahan mendapatkan porsi anggaran terbesar dengan total Rp81,7 miliar selama lima tahun, sedikit lebih tinggi dibandingkan sektor Air Limbah Domestik yang memperoleh Rp75,1 miliar. Namun, jika dilihat dari laju pertumbuhannya, sektor Air Limbah Domestik menunjukkan akselerasi investasi yang lebih agresif, nilainya meningkat hampir dua kali lipat dari Rp10,4 miliar (2026) menjadi Rp20,8 miliar (2030). Sebaliknya, anggaran persampahan tumbuh lebih moderat dari Rp12,9 miliar menjadi Rp18,3 miliar pada periode yang sama, mengindikasikan adanya fokus daerah untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur air limbah di masa depan.

Tabel V. 5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

X Rp. 1 juta

No	Uraian	Tahun anggaran					Total Anggaran
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	Air Limbah Domestik	-	1.620	-	6.420	-	8.040
2	Pengelolaan Persampahan	10.000	10.000	5.500	-	-	25.500
	Jumlah	10.000	11.620	5.500	6.420	-	33.540

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Tabel ini menggambarkan rencana kebutuhan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi untuk sektor sanitasi di Kabupaten Brebes yang bersifat fluktuatif dan terkonsentrasi pada periode awal perencanaan (2026–2029). Total alokasi dana yang disiapkan selama lima tahun tercatat sebesar Rp33,5 miliar, namun distribusinya tidak merata setiap tahunnya. Dukungan tertinggi terjadi pada tahun 2027 dengan nilai Rp11,6 miliar, namun trennya menurun di tahun-tahun berikutnya hingga akhirnya tercatat nihil (nol) pada tahun 2030, menandakan bahwa bantuan provinsi tidak diproyeksikan sebagai sumber pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan hingga akhir periode perencanaan.

Dilihat dari pembagian sektornya, prioritas utama pendanaan provinsi sangat condong pada Pengelolaan Persampahan, yang mendapatkan porsi dominan sebesar Rp25,5 miliar (sekitar 76% dari total bantuan provinsi). Sektor ini mendapat kucuran dana yang cukup besar dan stabil pada tiga tahun pertama (2026–2028), sebelum akhirnya berhenti. Sebaliknya, sektor Air Limbah Domestik hanya mendapatkan dukungan yang bersifat insidental atau sporadis, yakni hanya muncul pada tahun 2027 (Rp1,6 miliar) dan tahun 2029 (Rp6,4 miliar) tanpa ada kesinambungan tahunan.

Tabel V. 6 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN

X Rp. 1 juta

No	Uraian	Tahun anggaran					Total Anggaran
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	Air Limbah Domestik	11.488	16.622	37.672	36.872	36.872	139.526
2	Pengelolaan Persampahan	600	8.000	8.000	29.200	29.200	75.000
	Jumlah	12.088	24.622	45.672	66.072	66.072	214.526

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Tabel ini mengilustrasikan peran krusial Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber pendanaan terbesar dalam rencana pengembangan sanitasi Kabupaten Brebes, dengan total usulan kebutuhan mencapai Rp214,5 miliar selama lima tahun. Berbeda dengan kebutuhan pendanaan dari APBD Provinsi, kebutuhan pendanaan dari APBN melalui DAK menunjukkan tren pertumbuhan yang agresif. Alokasi dana bermula dari angka Rp12 miliar pada tahun 2026, kemudian melonjak lebih dari lima kali lipat hingga mencapai angka stabil sebesar Rp66 miliar per tahun pada 2029 dan 2030. Pola kenaikan drastis ini mengindikasikan bahwa proyek-proyek infrastruktur sanitasi berskala besar dan berbiaya tinggi (IPLT dan TPA) direncanakan untuk dieksekusi pada paruh kedua periode perencanaan (2028–2030).

Dari sisi alokasi sektoral, APBN menitikberatkan prioritasnya pada pembangunan infrastruktur Air Limbah Domestik, yang mendominasi porsi anggaran dengan total Rp139,5 miliar atau sekitar 65% dari total dana APBN. Sektor ini mendapat kucuran dana yang konsisten besar, terutama mulai tahun 2028 dengan rata-rata di atas Rp36 miliar per tahun. Sementara itu, sektor Pengelolaan Persampahan memiliki pola pendanaan yang unik; anggarannya sangat minim di tahun awal (hanya Rp600 juta pada 2026), namun mengalami lonjakan ekstrem pada tahun 2029 dan 2030 menjadi Rp29,2 miliar per tahun. Lonjakan ini kemungkinan besar menandakan adanya rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu (seperti TPST atau TPA Regional) yang didanai pusat pada akhir periode tersebut.

5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Pengembangan Sanitasi dengan sumber pendanaan non-pemerintah terdiri dari sumber pendanaan Swasta/CSR dan dari Masyarakat langsung yang dapat berupa iuran atau retribusi maupun bentuk lainnya yang lebih bersifat swadaya.

Tabel V. 7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR

X Rp. 1 juta

No	Uraian	Tahun anggaran					Total Anggaran
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	Air Limbah Domestik	1.600	-	-	-	-	1.600
2	Pengelolaan Persampahan	330	330	330	330	330	1.650
	Jumlah	1.930	330	330	330	330	3.250

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Partisipasi sektor swasta atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Brebes diproyeksikan mencapai total Rp3,25 miliar selama lima tahun (2026–2030). Pola pendanaan menunjukkan karakteristik front-loading, di mana kontribusi terbesar terjadi pada tahun pertama (2026) dengan nilai Rp1,93 miliar, kemudian menurun dan mendatar di angka Rp330 juta per tahun untuk empat tahun berikutnya. Penurunan signifikan setelah tahun pertama ini mengindikasikan bahwa keterlibatan swasta diharapkan difokuskan pada penyediaan Mobil Sedot Limbah Tinja di awal periode, sementara tahun-tahun selanjutnya hanya berupa dukungan rutin berskala kecil.

Secara sektoral, terdapat perbedaan strategi alokasi yang mencolok antara penanganan air limbah dan sampah. Sektor Air Limbah Domestik memiliki perkiraan kebutuhan dana besar yaitu Rp1,6 miliar pada tahun 2026 yang berbentuk Mobil Sedot Limbah yang bersumber dari sektor swasta di tahun-tahun awal. Sektor Pengelolaan Persampahan memiliki pola pendanaan yang berkelanjutan dan stabil, dengan alokasi tetap sebesar Rp330 juta setiap tahunnya selama periode lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa CSR swasta cenderung mendukung program persampahan yang bersifat rutin (mungkin berbasis komunitas atau bank sampah), sementara dukungan untuk air limbah lebih bersifat project-based atau insidental.

Tabel V. 8 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat

X Rp. 1 juta

No	Uraian	Tahun anggaran					Total Anggaran
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	Air Limbah Domestik	255	289	289	289	289	1.411
2	Pengelolaan Persampahan	200	400	400	450	450	1.900
	Jumlah	455	689	689	739	739	3.311

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

Tabel ini merangkum proyeksi kontribusi langsung masyarakat (swadaya) dalam pendanaan sanitasi di Kabupaten Brebes yang diperkirakan mencapai total Rp3,31 miliar selama periode lima tahun (2026–2030). Berbeda dengan sumber pendanaan lain yang mungkin fluktuatif, partisipasi masyarakat menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat secara bertahap. Partisipasi dimulai dari angka terendah sebesar Rp455 juta pada tahun 2026, kemudian mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp689 juta pada tahun 2027, dan terus tumbuh hingga mencapai angka stabil sebesar Rp739 juta per tahun pada dua tahun terakhir periode perencanaan (2029–2030).

Secara sektoral, masyarakat terlihat lebih aktif dan konsisten berpartisipasi dalam Pengelolaan Persampahan, yang menyumbang porsi terbesar yakni Rp1,9 miliar atau sekitar 57% dari total dana swadaya. Kontribusi di sektor persampahan ini menunjukkan peningkatan progresif—bermula dari Rp200 juta dan naik hingga Rp450 juta per tahun—yang kemungkinan besar mencerminkan kesediaan warga membayar retribusi atau iuran pengelolaan sampah lingkungan. Sementara itu, partisipasi pada sektor Air Limbah Domestik cenderung stagnan (flat) setelah tahun pertama, dengan nilai kontribusi yang tertahan tetap di angka Rp289 juta per tahun mulai dari 2027 hingga 2030, menghasilkan total akumulasi yang lebih rendah yaitu Rp1,41 miliar.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

6.1. Gambaran Umum Struktur Monitoring dan Evaluasi Sanitasi

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam perencanaan pembangunan di bidang sanitasi diperlukan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sanitasi dimana penyusunan program kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif
3. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standart pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tata cara pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan sanitasi Kabupaten Brebes, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsisten antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan.
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai rencana sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

6.2. Pelaporan Monev Implementasi SSK

Adapun rencana monitoring dan evaluasi implementasi SSK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI. Pelaporan Monev dan Implementasi SSK

No.	Objek Pemantauan	Rencana Monev												Penanggung Jawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data dan Dokumentasi	Pengolah Data/ Pemantau		
1	Input Capaian Strategis													Bapperida	OPD Bidang Sanitasi (Dinperwaskim, DPU, DLH, Dinkesda)	Pokja PKP	Jan - Feb	Bupati / Kepala OPD
2	Input Menu Investasi													Bapperida	OPD Bidang Sanitasi (Dinperwaskim, DPU, DLH, Dinkesda)	Pokja PKP	Feb - Mei	Bupati / Kepala OPD
3	Input Menu Akses													Bapperida	OPD Bidang Sanitasi (Dinperwaskim, DPU, DLH, Dinkesda)	Pokja PKP	Feb - Mei	Bupati / Kepala OPD
4	Input Menu Infrastruktur													Bapperida	OPD Bidang Sanitasi (Dinperwaskim, DPU, DLH, Dinkesda)	Pokja PKP	Mei - Nov	Bupati / Kepala OPD
5	Input Menu Progres													Bapperida	OPD Bidang Sanitasi (Dinperwaskim, DPU, DLH, Dinkesda)	Pokja PKP	Mei - Des	Bupati / Kepala OPD
6	Pelatihan													Bapperida	OPD Bidang Sanitasi (Dinperwaskim, DPU, DLH, Dinkesda, Dinpermasdes)	Pokja PKP	Feb	Bupati / Kepala OPD

Sumber: Analisa Tim Penyusun SSK, 2025

LAMPIRAN

Lampiran ini berisi hasil kajian yang dilaksanakan dalam penyusunan SSK baik EHRA maupun Kajian Lainnya serta ringkasan eksekutifnya. Selain itu, lampiran ini juga berisi hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan, deskripsi program/kegiatan, daftar perusahaan CSR yang potensial, kesiapan implementasi (*readiness criteria*) dan rencana kerja tahunan.

BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA